

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1 Pendahuluan

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung mengubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2015.

Kabupaten Natuna mengawali penerapan pelaksanaan basis akrual pada tahun 2015. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan kebijakan akuntansi untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akrual. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Proses dan implementasi penerapan basis akrual dengan segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan terutama terkait dengan penyajian kembali

beberapa pos dan pelaksanaan perubahan basis akrual pada laporan keuangan tahun 2020.

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara:

1. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Kabupaten Natuna.

7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
 15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53);
 16. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 67);
 17. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 68).

7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 (tujuh) Bab yaitu:

7.1 Pendahuluan

- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

7.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 7.2.1 Ekonomi Makro
- 7.2.2 Kebijakan Keuangan

- 7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD
- 7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
- 7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 7.3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- 7.4 Kebijakan Akuntansi**
- 7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
- 7.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah
- 7.5 Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**
- Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah.
- 7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 7.5.1.1 Pendapatan-LRA
- 7.5.1.2 Belanja
- 7.5.1.3 Transfer
- 7.5.1.4 Surplus/defisit-LRA
- 7.5.1.5 Pembiayaan
- 7.5.1.6 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran
- 7.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
- 7.5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- 7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
- 7.5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 7.5.3 Neraca
- 7.5.3.1 Aset Lancar
- 7.5.3.2 Investasi Jangka Panjang
- 7.5.3.3 Aset Tetap
- 7.5.3.4 Aset Lainnya
- 7.5.3.5 Kewajiban
- 7.5.3.6 Ekuitas
- 7.5.4 Laporan Operasional

- 7.5.4.1 Pendapatan-LO
- 7.5.4.2 Beban-LO
- 7.5.4.3 Surplus/Defisit-LO
- 7.5.5 Laporan Arus Kas
 - 7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
 - 7.5.5.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas
 - 7.5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD, BLUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan
 - 7.5.5.7 Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan
- 7.5.6 Laporan Perubahan Ekuitas
 - 7.5.6.1 Ekuitas Awal
 - 7.5.6.2 Surplus/Defisit-LO
 - 7.5.6.3 Koreksi-koreksi
- 7.5.7 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya.
- 7.6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan**
 - 7.6.1 Domisili dan Operasional Entitas
 - 7.6.2 Penerapan IPSAP Nomor 02
 - 7.6.3 Penerimaan Dana APBN dan Tugas Pembantuan Tahun 2020
- 7.7 Penutup**

7.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

7.2.1 Ekonomi Makro

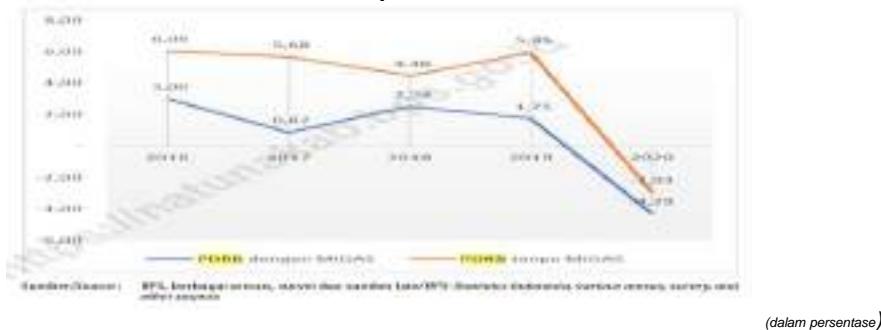
Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tenram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya atau kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Perekonomian suatu daerah dikatakan mengalami pertumbuhan bila terdapat peningkatan nilai tambah dari hasil produksi barang dan jasa pada periode tertentu. Dengan kata lain pertumbuhan ekonomi daerah tercermin melalui pertumbuhan angka PDRB. Selama tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Natuna mengalami kontraksi sekitar (4,29%). Penurunan PDRB ini disebabkan oleh menurunnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2016-2020) struktur perekonomian Kabupaten Natuna menurut PDRB Dengan Migas didominasi oleh kategori Pertambangan dan Penggalian. Kategori ini merupakan kontributor terbesar yang mencapai 66,76 % di tahun 2020 menurun dari tahun sebelumnya. Kategori berikutnya adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; kategori Konstruksi, sementara peranan kategori lainnya di bawah 5 %.

Kategori Pertambangan dan Penggalian mencakup empat subkategori, yaitu pertambangan miyak dan gas bumi, pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam dan pertambangan penggalian lainnya. Secara keseluruhan pada tahun 2020, kategori Pertambangan dan Penggalian menunjukkan kontraksi pertumbuhan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dari 0,2 % di tahun 2019 menjadi (4,82)% di tahun 2020.

Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja dengan memberikan kontribusi sebesar 13,34 % di tahun 2020. Dapat dilihat pada *series* lima tahun kontribusi dari kategori ini, tahun 2020 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 kategori konstruksi menyumbang sebesar 9,04% terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna. Hal ini menunjukkan bahwa peran pembangunan konstruksi semakin penting untuk mendorong perekonomian Kabupaten Natuna secara keseluruhan.

Gambar 7.2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 di Kabupaten Natuna 2016-2020



Selain pertumbuhan ekonomi, indikator makro ekonomi yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna menunjukkan tren kecenderungan meningkat setiap tahunnya.

Besaran nilai PDRB dapat menentukan struktur perekonomian suatu daerah. Struktur perekonomian tersebut menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi, dengan mengamati struktur perekonomian akan tampak seberapa besar kekuatan ekonomi suatu negara atau daerah. Indikator makro sangat penting bagi pengambilan keputusan untuk menentukan arah dan sasaran kebijakan pembangunan yang akan datang.

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal tersebut juga menunjukkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap sektor ekonominya. Makin besar nilai tambah yang dapat diraih oleh suatu sector, maka semakin besarlah peranannya dalam perekonomian daerah tersebut. Besaran peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2.1 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna, 2016-2020

(dalam miliar rupiah)

No	Lapangan Usaha/ Industry	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1.929,41	2.116,11	2.323,56	2.512,63	2.455,46
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	13.672,14	14.227,34	15.327,88	15.500,97	12.287,84
3	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	140,17	151,17	156,78	161,71	166,70
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	15,56	16,37	16,93	17,11	17,27
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang / <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	1,04	1,17	1,16	1,12	1,17
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.349,65	1.480,21	1.573,36	1.749,05	1.664,05
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	572,61	652,54	706,20	746,27	716,83
8	Transportasi dan	128,99	141,96	149,91	163,10	126,28

No	Lapangan Usaha/ Industry	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
9	Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>					
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	84,54	92,99	100,48	106,43	101,04
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	98,87	115,70	125,21	137,67	147,41
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	24,00	26,82	28,83	30,11	30,75
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	109,03	121,14	129,13	137,44	139,15
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	326,41	352,75	369,33	409,84	428,20
14	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	32,38	36,16	38,15	41,62	43,12
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Work Activities</i>	55,44	59,58	63,11	66,33	66,25
16	Jasa Lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	12,05	12,94	13,58	14,04	14,35
Produk Domestik Bruto/<i>Gross Domestic Product</i>		18.552,2 9	19.604,9 5	21.123,6 0	21.795,4 4	18.405,8 7

Sumber: Natuna Dalam Angka 2020

Tabel 7.2.2 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Natuna, 2016-2020

(dalam persentase)						
No	Lapangan Usaha/ Industry	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	10,40	10,79	11,00	11,53	13,34
2	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	73,70	72,57	72,56	71,12	66,76
3	Industri Pengolahan / <i>Manufacturing</i>	0,76	0,77	0,74	0,74	0,91
4	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang / <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
6	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,27	7,55	7,45	8,02	9,04
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of</i>	3,09	3,33	3,34	3,42	3,89

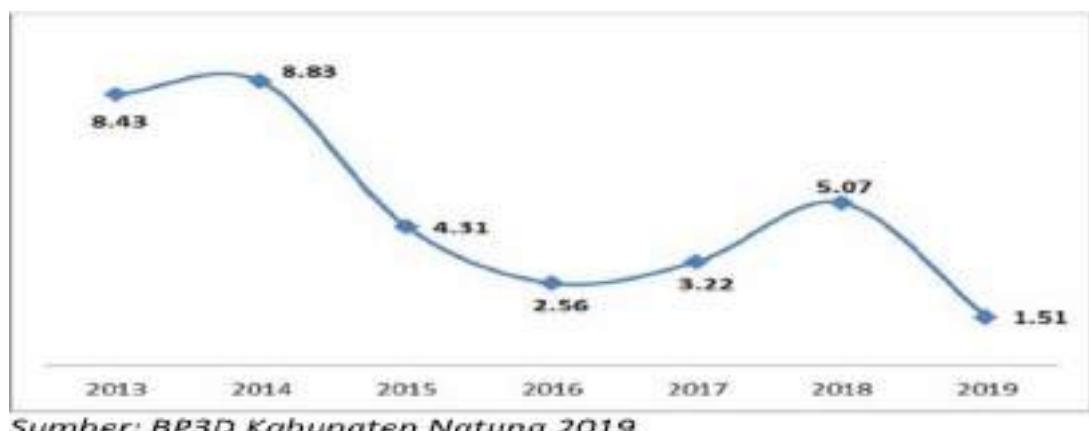
No	Lapangan Usaha/ Industry	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Motor Vehicles and Motorcycles</i>					
8	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0,70	0,72	0,71	0,75	0,69
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,46	0,47	0,48	0,49	0,55
10	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	0,53	0,59	0,59	0,63	0,80
11	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,13	0,14	0,14	0,14	0,17
12	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	0,59	0,62	0,61	0,63	0,76
13	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial <i>Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1,76	1,80	1,75	1,88	2,33
14	Jasa Pendidikan / <i>Education</i>	0,17	0,18	0,18	0,19	0,23
15	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Work Activities</i>	0,30	0,30	0,30	0,30	0,36
16	Jasa Lainnya/ <i>Other Service Activities</i>	0,06	0,07	0,06	0,06	0,08
Produk Domestik Bruto/<i>Gross Domestic Product</i>		100,01	99,99	100,00	99,99	100,01

2. Tingkat Inflasi

Indek Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk melihat perkembangan perekonomian suatu wilayah secara makro. Perubahan IHK dari waktu ke waktu dapat menggambarkan tingkat inflasi atau deflasi dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Perubahan harga tersebut erat kaitannya dengan kemampuan daya beli dari uang yang dimiliki masyarakat. Terutama bagi mereka yang berpenghasilan tetap. Semakin tinggi inflasi, semakin rendah nilai uang dan semakin rendah daya belinya.

Tekanan inflasi di Ranai tahun 2019 adalah sebesar 1,51%. Bila dibandingkan dengan enam tahun terakhir, inflasi Ranai cukup mengembirakan karena bisa melakukan penekanan peningkatan harga yang cukup dalam (2013 = 8,43%). Tetapi bila dibandingkan dengan tahun 2018, inflasi Ranai lebih rendah sebesar 3,56%. Salah satu penyebab rendahnya inflasi Ranai sepanjang tahun 2019 adalah adanya penurunan harga pada beberapa kelompok makanan. Adapun perkembangan inflasi Tahun 2013 s/d 2019, dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 7.2.2. Perkembangan Inflasi Tahun 2013 s/d 2019

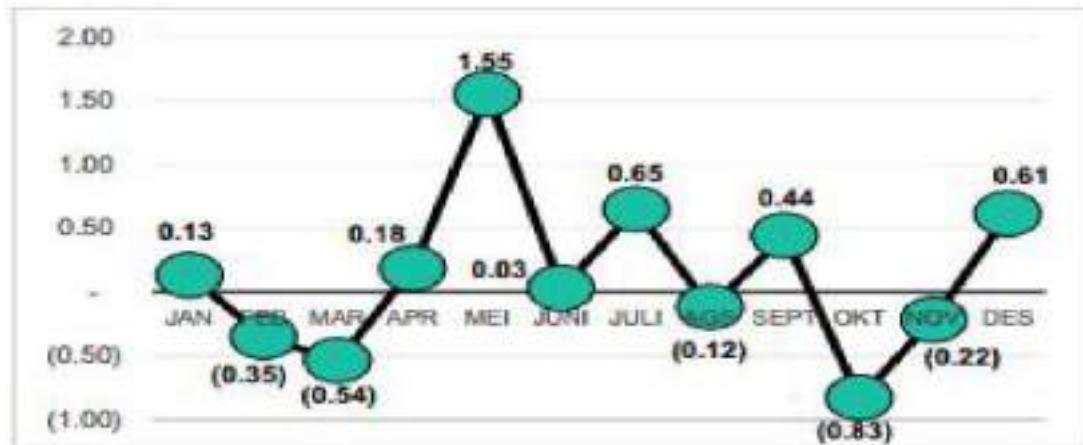


Sumber: BP3D Kabupaten Natuna 2019

Selama tahun 2019 Ranai mengalami lima kali deflasi bulanan dan tujuh kali inflasi bulanan. Deflasi terjadi pada Februari (0,35)%, Maret (0,54)%, Agustus (0,12)%, Oktober (0,83)%, dan November (0,22)%. Tekanan deflasi terdalam pada bulan Oktober terjadi karena adanya penurunan indeks pada kelompok bahan makanan sebesar (3,98)%. Di sisi lain, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 1,55%.

Tingginya inflasi di bulan itu terjadi karena adanya penigkatan harga pada kelompok bahan makanan sebesar 6,45%.

Gambar 7.2.3. Perkembangan Inflasi Bulanan Ranai Tahun 2019
(dalam persentase)



Sumber: BP3D Kabupaten Natuna 2019

Kelompok sandang merupakan kelompok pengeluaran yang paling besar menyumbangkan inflasi. Hal ini karena kelompok sandang merupakan pengeluaran yang paling pokok selain pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Pada tahun 2019, laju inflasi yang sebesar 1,51%, di antaranya disumbangkan dari kelompok sandang sebesar 4,00%. Kemudian diikuti oleh kelompok bahan makanan sebesar 3,66% dan kelompok kesehatan sebesar 1,72% terdapat di tabel berikut ini.

Tabel 7.2.3. Nilai Inflasi/Deflasi Ranai Tahun 2015-2019

No	Kelompok Pengeluaran	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)
	Umum	4,31	2,56	3,22	5,07	1,51
1	Bahan Makanan Makanan Jadi,	1,73	-2,20	9,37	-1,44	3,66
2	Minuman, Rokok dan Tembakau Perumahan, Air,	10,45	0,41	3,09	1,93	-1,41
3	Listrik, Gas,dan Bahan Bakar	5,33	5,84	-0,21	14,39	1,36
4	Sandang	5,55	10,26	2,58	5,40	4,00
5	Kesehatan Pendidikan,	7,12	6,95	2,97	8,55	1,72
6	Rekreasi dan Olahraga Transportasi,	3,96	3,41	4,27	12,50	0,00
7	Komunikasi dan Jasa Keuangan	-3,15	1,43	0,20	-4,08	1,61

Sumber: BP3D Kabupaten Natuna

IKK Kabupaten Natuna merupakan IKK tertinggi kedua di Provinsi Kepulauan Riau setelah Kabupaten Kepulauan Anambas. IKK Kabupaten Natuna tahun 2019 sebesar 130,28. Angka IKK Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2019 adalah sebesar 147,92. Hal ini disebabkan dari filosofis IKK yang menunjukkan tingkat kesulitan geografis suatu wilayah. Daerah Kabupaten Natuna yang sangat jauh dengan ibukota provinsi, hampir seluruh wilayah Kabupaten Natuna berada pada daerah perairan dan terpisah antar kecamatan karena berbentuk pulau-pulau sehingga harga-harga bangunan/konstruksi relatif mahal sebagai akibat biaya transportasi. Lebih rinci tentang IKK Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, terdapat di tabel berikut ini.

Tabel 7.2.4. Perbandingan IKK Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018-2019

No	Kabupaten/ Kota	IKK	
		2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Karimun	118,56	122,91
2	Bintan	115,04	122,19
3	Natuna	139,70	130,28
4	Lingga	127,84	126,96
5	Kep. Anambas	158,84	147,92
6	Batam	118,79	124,08
7	Tanjungpinang	120,56	125,75
	Provinsi Kepri	122,72	128,34

Jika dibandingkan dengan IKK Provinsi Kepulauan Riau maka nilai IKK Kabupaten Natuna dapat diartikan bahwa tingkat kemahalan membangun suatu bangunan per satuan ukuran luas di Kabupaten Natuna lebih mahal 1,94% dibandingkan dengan tingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi per satuan ukuran luas di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini disebabkan faktor letak geografis Kabupaten Natuna yang mempengaruhi besarnya biaya transportasi pengiriman barang-barang bahan bangunan/konstruksi menuju kabupaten ini. Besarnya biaya transportasi ini, berpengaruh besar terhadap harga bahan bangunan/konstruksi tersebut. Angka ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya baik IKK Kabupaten Natuna maupun Provinsi Kepulauan Riau.

3. Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam %. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Secara umum tingkat pengangguran dipengaruhi oleh:

a. Kependudukan

Pertumbuhan penduduk yang cukup besar akan menyebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang ada. Hal ini kemudian membawa dampak semakin besarnya jumlah orang yang mencari pekerjaan ataupun jumlah orang yang menganggur.

Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan Hasil Sensus Penduduk tahun 2020 berjumlah 81.495 jiwa yang terdiri atas 41.890 jiwa penduduk laki-laki dan 39.605 jiwa penduduk perempuan dengan *sex ratio* 106,29 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 106 sampai 107 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dari 15 kecamatan, Kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak dari tahun 2010 sampai 2020. Jumlah penduduk Bunguran Timur tahun 2020 mencapai 27.806 jiwa, dengan persentase sebesar 34,12%, dimana Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna tahun 2019 yaitu 40,56 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 15 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Midai dengan kepadatan sebesar 261,16 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bunguran Utara sebesar 11,15 jiwa/km².

Dilihat dari komposisi kependudukan, penduduk Kabupaten Natuna didominasi oleh penduduk dari empat kelompok usia muda yaitu, 0-4 tahun sebesar 7.658 jiwa, 5-9 tahun sebesar 7.540 jiwa, 10-14 tahun sebesar 7.387 jiwa, dan 15-19 sebesar 8.149 jiwa. *Dependency Ratio* atau biasa disebut Angka Ketergantungan Kabupaten Natuna pada tahun 2020 adalah 49,03, yaitu dari 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung 49

sampai 50 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun).

b. Ketenagakerjaan

Bericara mengenai penduduk tidak akan terlepas dengan berbagai masalah kependudukan. Salah satu masalah terkait kependudukan adalah dari sisi ketenagakerjaan, sebagai contoh yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk yang akan berpengaruh terhadap penyediaan tenaga kerja. Namun di sisi lain, ketersediaan lapangan pekerjaan masih terbatas.

Kabupaten Natuna pada tahun 2020 memiliki jumlah angkatan kerja sebesar 40.130 jiwa, sedangkan yang bukan merupakan angkatan kerja (sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya) sebesar 17.704 jiwa. Salah satu indikator ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh BPS adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Nilai TPAK di Kabupaten Natuna pada tahun 2020 adalah sebesar 69,39%. Angkatan kerja dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu Jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna tahun 2020 sebanyak 38.486 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 1.644 jiwa dengan tingkat pengangguran terbuka yaitu sebesar 4,10%.

Jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.2.5 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

Kelompok Umur Age Group	Jenis Kelamin / Sex		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
1	2	3	4
0-4	3.897	3.761	7.658
5-9	3.746	3.794	7.540
10-14	3.780	3.607	7.387
15-19	4.187	3.962	8.149
20-24	3.686	3.298	6.984
25-29	3.214	2.895	6.109
30-34	3.122	3.189	6.311
35-39	3.147	2.947	6.094
40-44	2.979	2.647	5.626
45-49	2.649	2.347	4.996
50-54	2.132	1.992	4.124
55-59	1.763	1.838	3.601
60-64	1.396	1.293	2.689
65-69	987	861	1.848
70-74	623	592	1.215
75+	582	582	1.164
Jumlah/Total	41.890	39.605	81.495

Sumber: Hasil Perapianan Umur dari Data Administratif dan SP2020 (September)

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai patokan keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah. IPM disusun berdasarkan tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran. Dimensi kesehatan dilihat dari indikator Angka Harapan Hidup, sedangkan dimensi Pendidikan terdiri atas indikator Harapan Lama Sekolah (*Expected Years School*) dan Rata-rata Lama Sekolah (*Mean Years School*).

Jika dilihat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, IPM di Kabupaten Natuna menunjukkan tren yang positif. Nilai IPM Kabupaten Natuna selalu mengalami kenaikan sampai pada tahun 2019 yang bernilai sebesar 72,63. Masing-masing dimensi penyusun IPM pun juga menunjukkan tren yang positif, yaitu selalu mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Nilai IPM yang diperoleh Kabupaten Natuna pada tahun 2019 juga sudah tergolong ke dalam kategori “tinggi”.

Tabel 7.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2015-2019 di Kabupaten Natuna

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Indeks Pembangunan Manusia	70,87	71,23	71,52	72,1	72,63

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

7.2.2 Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) jenis yakni:

a. Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus.

b. Pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran;
2. Penerimaan pinjaman daerah;
3. Dana cadangan daerah;
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Di samping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2020 semaksimal mungkin dan ditambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- 1) Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD;
- 2) Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB;
- 3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD;
- 5) Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *updating database* wajib pajak (aktif dan non aktif);
- 6) Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan;
- 7) Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait;
- 8) Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislatif dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan upaya sebagai berikut:
 - a) Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
 - b) Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
 - c) Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
 - d) Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.
 - e) Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.

- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 - a) Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 - b) Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
 - c) Operasional pemungutan PBB.
 - d) Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
 - e) Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
 - f) Pelaksanakan pemutakhiran dan *updating* data PBB.
 - g) Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
 - h) Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
 - i) Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil
- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

2. Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran

adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Sebagai tindak lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan pada setiap satuan kerja pada Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Natuna menetapkan sasaran dan prioritas bidang pembangunan, yang tertuang dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Natuna dengan DPRD tentang Kebijakan umum Perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun 2020 dan selanjutnya dijabarkan dalam Perubahan PPAS yang tersebar pada seluruh satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun 2020 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna tahun 2020. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna tahun 2020.

1. Pendapatan

Target kinerja pendapatan pada tahun 2020 tergolong kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari persentase penerimaan pendapatan yang dianggarkan sebesar Rp1.052.403.143.059,41 dan terealisasi sebesar Rp926.418.003.270,96 atau 88,03% dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.350.963.641.174,67. Realisasi pendapatan tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp(424.545.637.903,71) atau (31,43) % dari realisasi pendapatan tahun lalu.

2. Belanja

Belanja Tahun Anggaran 2020, dianggarkan sebesar Rp1.211.049.185.920,00 terealisasi sebesar Rp1.069.464.043.135,79 atau sebesar 88,31% dibandingkan dengan realisasi belanja pada Tahun 2019 sebesar Rp1.261.455.405.821,30 terjadi penurunan sebesar Rp(191.991.263.328,57) atau sebesar (15,22)% dari realisasi belanja tahun sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD Tahun Anggaran 2020 tercermin dari indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata 156,09% dari target, indikator yang menjadi tolok ukur adalah kenaikan jumlah kunjungan wisatawan;
- b. Meningkatnya nilai investasi di sektor potensial daerah sebesar 111,03% dari target awal dan 74,02% dari target RPJMD;
- c. Meningkatnya indeks pembangunan manusia sebesar 100,18% atau 72,83 dari target yaitu 72,50. Indeks pembangunan manusia setiap tahun mengalami peningkatan dana secara keseluruhan realisasi sebesar 99,22% dari target RPJMD;
- d. Terwujudnya lingkungan yang bersih, hijau, nyaman, indah, dan aman. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya indeks status air yaitu sebesar 128,62% dari target yang telah direncanakan;
- e. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan pendapatan perkapita realisasi sebesar 115,37%;
- f. Meningkatnya konektivitas kecamatan dan desa. Hal ini menunjukkan pembangunan infrastruktur berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Indikator keberhasilan ditunjukkan dengan konektivitas dari pelabuhan, akses angkutan darat, akses jalan dan akses transportasi laut dalam menunjang aktivitas ekonomi;
- g. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Program Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Supremasi Hukum sehingga memberikan kepastian kenyamanan dalam investasi maupun dalam aktivitas ekonomi;
- h. Meningkatnya pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup rumah tangga miskin ditunjukkan dengan tingkat pengangguran turun, memberikan gambaran bahwa pemerintah daerah berhasil menekan angka pengangguran;
- i. Terwujudnya efektivitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan melalui Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan dengan penyusunan dokumen perencanaan serta pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- j. Terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dengan Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Daerah, antara lain meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

7.3 Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

7.3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan pemerintah daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Berdasarkan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menjelaskan ruang lingkup aturan dalam Paragraf 21 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas pada Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Natuna telah menerapkan penganggaran berbasis kas secara lebih luas pada tahun 2020. Artinya, angka-angka yang telah ditetapkan dalam APBD bukan hanya pendapatan dan belanja yang melalui mekanisme kas daerah, namun juga mencakup pendapatan dan belanja yang tidak melalui kas daerah. Sebagai contoh, penganggaran pendapatan dan belanja dana Jaminan Kapitasi Nasional (JKN) pada FKTP yang langsung dikelola oleh Puskesmas dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pelaksanaannya langsung dikelola oleh masing-masing sekolah negeri di Kabupaten Natuna tanpa melalui rekening kas umum daerah.

Pada tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Natuna menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.052.403.143.059,41 dan terealisasi Rp926.418.003.270,96 atau 88,03%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.350.963.641.174,67, realisasi pendapatan tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp(424.545.637.903,71) atau (31,43)% dari realisasi pendapatan tahun lalu.

Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2020, Pemerintah Kabupaten Natuna menganggarkan sebesar Rp1.211.049.185.920,00 terealisasi sebesar Rp1.069.464.043.135,79 atau sebesar 88,31%. Dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun 2019 sebesar Rp1.261.455.405.821,30 terjadi penurunan sebesar Rp(191.991.362.685,51) atau sebesar (15,22)% dari realisasi belanja tahun sebelumnya.

**Tabel 7.3.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja
Tahun Anggaran 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Pendapatan	1.052.403.143.059,41	926.418.003.270,96	88,03	1.350.963.641.174,67
	Belanja Daerah	1.211.049.185.920,00	1.069.464.043.135,79	88,31	1.261.455.405.821,30
2	a. Belanja Tidak Langsung	588.387.432.696,00	535.705.286.409,00	91,05	536.509.204.533,50
	b. Belanja Langsung	622.661.753.224,00	533.758.756.726,79	85,72	724.946.201.287,80

Anggaran dan realisasi pendapatan setiap SKPD untuk tahun anggaran 2020 dan 2019 dijelaskan pada Tabel 7.3.2 di bawah ini:

Tabel 7.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1.02.01.01	Dinas Kesehatan	6.925.787.600,00	7.241.940.770,00	104,56	6.895.026.667,00
1.02.01.02	Rumah Sakit Umum Daerah	15.800.000.000,00	15.271.271.870,33	96,65	19.597.872.446,72
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	40.000.000,00	16.000.000,00	40,00	8.700.000,00
1.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	87.103.000,00	0,00	44.344.000,00
1.15.01.	Dinas Perhubungan	70.000.000,00	62.400.000,00	89,14	58.800.000,00
1.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65.000.000,00	51.649.756,00	79,46	94.246.228,00
2.04.01.	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi dan Usaha Mikro	20.000.000,00	8.012.000,00	40,06	19.775.000,00
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah	1.018.748.955.459,41	892.133.177.358,83	87,57	1.309.148.546.358,78
3.02.02.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	10.733.400.000,00	11.546.448.515,80	107,57	15.096.330.474,17
Jumlah		1.052.403.143.059,41	926.418.003.270,96	88,03	1.350.963.641.174,67

Sedangkan anggaran dan realisasi belanja setiap SKPD untuk tahun anggaran 2020 dan 2019 dijelaskan pada Tabel 7.3.3 di bawah ini:

Tabel 7.3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 dan 2019
(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1.01.01.	Dinas Pendidikan	197.899.206.467,08	187.909.466.608,17	94,95	210.487.794.524,35
1.01.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	12.610.881.405,00	9.378.586.012,00	74,37	0,00
1.02.01.01	Dinas Kesehatan	153.311.475.724,00	132.438.111.919,79	86,38	128.360.695.940,27
1.02.01.02	Rumah Sakit Umum Daerah	45.229.057.056,00	39.120.015.713,00	86,49	54.060.491.240,38
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	55.092.745.703,00	41.712.312.835,00	75,71	147.368.590.025,26
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	120.632.113.658,00	111.925.810.477,00	92,78	92.447.946.606,00
1.05.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	7.086.314.859,00	6.348.912.630,00	89,59	6.838.940.456,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	18.338.684.354,00	17.164.251.476,00	93,60	19.021.348.019,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran	9.540.495.875,00	7.344.900.478,00	76,99	7.618.175.700,00
1.06.01.	Dinas Sosial	4.625.908.834,50	4.224.530.662,00	91,32	0,00
1.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.143.437.703,00	6.346.515.775,00	88,84	8.604.318.248,00
1.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.435.923.434,00	9.570.459.619,00	83,69	8.628.135.725,00
1.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan	6.215.581.964,00	5.322.426.837,00	85,63	6.628.726.331,00
1.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	9.847.572.330,00	9.206.484.833,00	93,49	9.599.050.216,00
1.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.440.570.056,00	5.510.156.756,00	85,55	7.029.215.663,00
1.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.655.939.169,99	6.842.687.649,00	89,38	7.323.762.282,00
1.15.01.	Dinas Perhubungan	13.713.610.316,00	11.564.678.826,83	84,33	24.816.039.066,99
1.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.773.363.716,00	6.799.282.850,00	87,47	8.708.206.001,00
1.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.019.932.617,15	7.197.462.889,00	89,74	8.595.849.165,00
1.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.867.525.731,00	5.046.903.915,00	86,01	6.873.172.177,00
2.01.01.	Dinas Perikanan	11.030.231.669,00	10.258.439.477,00	93,00	13.245.247.272,00
2.02.01.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.623.859.102,00	7.800.926.395,00	57,26	12.638.366.087,00
2.03.01.	Dinas Pertanian	10.257.259.022,00	9.327.393.141,00	90,93	11.873.901.342,00
2.04.01.	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi dan Usaha Mikro	8.148.065.979,33	7.152.083.805,00	87,78	11.227.937.955,00

Kode	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
3.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	13.565.350.821,00	12.007.437.617,00	88,52	17.252.186.753,00
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	217.266.843.138,44	187.008.787.829,00	86,07	184.432.906.819,00
3.02.02.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	8.924.733.457,00	8.282.849.464,00	92,81	9.159.553.434,79
3.03.01.	Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.229.445.816,81	8.088.449.151,00	79,07	11.784.990.030,00
3.05.02.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	480.470.203,56	479.044.756,00	99,70	467.778.656,00
3.05.03.	Sekretariat Daerah	75.266.245.259,00	64.034.483.367,00	85,08	83.900.658.213,00
3.05.04.	Sekretariat DPRD	48.841.021.728,00	43.736.694.089,00	89,55	48.421.659.295,00
3.05.05.	Inspektorat	10.170.928.636,00	9.336.509.804,00	91,80	11.540.843.674,00
3.05.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	6.737.489.293,00	6.345.093.628,00	94,18	6.629.447.883,00
3.05.07.	Kecamatan Bunguran Timur	11.044.027.600,00	10.266.996.917,00	92,96	11.410.450.765,00
3.05.08.	Kecamatan Bunguran Barat	6.542.929.820,00	6.273.786.490,00	95,89	6.711.066.109,00
3.05.09.	Kecamatan Bunguran Utara	4.687.463.079,00	4.538.493.579,00	96,82	5.381.519.026,00
3.05.10.	Kecamatan Pulau Laut	4.157.264.272,00	4.034.146.115,00	97,04	4.612.976.936,00
3.05.11.	Kecamatan Midai	5.810.894.796,00	5.634.918.313,00	96,97	6.035.621.944,00
3.05.12.	Kecamatan Serasan	5.593.839.811,21	5.223.281.837,00	93,38	7.273.354.756,00
3.05.13.	Kecamatan Subi	4.106.946.007,00	3.971.004.237,00	96,69	5.427.928.327,00
3.05.14.	Kecamatan Pulau Tiga	4.625.352.401,00	4.477.848.523,00	96,81	5.207.554.125,39
3.05.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	2.983.483.999,90	2.646.925.836,00	88,72	3.297.215.464,00
3.05.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.524.152.578,00	3.366.076.900,00	95,51	3.841.240.699,87
3.05.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	2.947.395.084,00	2.838.640.135,00	96,31	3.297.426.757,00
3.05.18.	Kecamatan Serasan Timur	3.637.407.419,00	3.443.356.934,00	94,67	4.229.242.650,00
3.05.19.	Kecamatan Suak Midai	2.768.100.870,00	2.668.777.052,00	96,41	2.916.837.624,00
3.05.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	2.900.160.134,03	2.680.866.054,00	92,44	2.864.052.218,00
3.05.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	2.697.482.951,00	2.566.772.930,00	95,15	3.362.983.620,00
Jumlah		1.211.049.185.920,00	1.069.464.043.135,79	88,31	1.261.455.405.821,30

Terhadap besaran anggaran dan realisasi belanja per SKPD sesuai Tabel 7.3.4 tersebut, rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan kelompok belanja per SKPD untuk tahun anggaran 2020 dan 2019 yang dibagi dalam kelompok belanja langsung dan tidak langsung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7.3.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020 dan 2019

(dalam rupiah)					
Kode	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1.01.01.	Dinas Pendidikan	119.536.366.298,08	114.750.729.865,00	96,00	115.076.565.615,00
1.01.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.373.386.177,00	4.052.120.019,00	92,65	0,00
1.02.01.01	Dinas Kesehatan	56.700.615.449,00	52.816.557.388,00	93,15	33.520.169.348,00
1.02.01.02	Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	0,00	0,00	15.355.476.372,00
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.272.019.320,00	6.773.339.004,00	93,14	7.602.122.171,00
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	5.926.170.290,00	5.494.724.218,00	92,72	5.259.492.379,00
1.05.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	4.342.886.999,00	4.015.287.252,00	92,46	4.320.770.471,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	10.182.315.201,00	9.465.605.624,00	92,96	9.786.948.998,00
1.05.03	Dinas Pemadam Kebakaran	4.432.176.389,00	4.152.473.570,00	93,69	4.391.145.286,00
1.06.01.	Dinas Sosial	3.039.820.888,50	2.757.412.568,00	90,71	0,00
1.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.641.028.935,00	4.301.446.307,00	92,68	4.893.594.223,00
1.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian	3.532.635.926,00	3.296.806.565,00	93,32	4.234.871.468,00

Kode	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
	Penduduk dan Keluarga Berencana				
1.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan	4.157.677.477,00	3.611.806.843,00	86,87	4.087.485.524,00
1.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	4.125.527.919,00	3.863.116.570,00	93,64	3.689.698.681,00
1.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.225.942.291,00	3.491.722.059,00	82,63	3.924.064.990,00
1.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.406.780.312,99	4.089.593.393,00	92,80	3.541.437.929,00
1.15.01.	Dinas Perhubungan	5.068.552.917,00	4.745.075.227,00	93,62	5.492.399.002,00
1.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.518.456.910,00	3.329.611.664,00	94,63	3.301.992.223,00
1.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.348.775.314,15	4.986.965.068,00	93,24	5.666.746.341,00
1.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.227.871.374,00	2.997.508.016,00	92,86	3.117.323.642,00
2.01.01.	Dinas Perikanan	6.050.773.417,00	5.686.425.486,00	93,98	7.022.260.006,00
2.02.01.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.593.359.627,00	4.378.297.473,00	95,32	4.944.377.367,00
2.03.01.	Dinas Pertanian	7.401.531.304,00	6.791.794.035,00	91,76	7.349.194.459,00
2.04.01.	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi dan Usaha Mikro	5.127.488.984,33	4.741.045.673,00	92,46	5.428.911.593,00
3.01.01.	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.796.593.269,00	6.364.504.763,00	93,64	7.340.809.908,00
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan. Pendapatan dan Aset Daerah	203.164.736.540,44	174.149.361.090,00	85,72	169.778.187.756,00
3.02.02.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	5.899.084.282,00	5.456.643.812,00	92,50	6.331.862.755,50
3.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.892.008.957,81	5.250.688.575,00	89,12	5.735.976.405,00
3.05.02.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	480.470.203,56	479.044.756,00	99,70	467.778.656,00
3.05.03.	Sekretariat Daerah	18.999.204.530,00	17.555.222.358,00	92,40	19.802.903.155,00
3.05.04.	Sekretariat DPRD	15.051.006.614,00	14.211.663.361,00	94,42	14.655.523.654,00
3.05.05.	Inspektorat	7.115.769.452,00	6.584.479.588,00	92,53	7.161.372.153,00
3.05.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.469.909.936,00	4.093.578.946,00	91,58	4.617.658.386,00
3.05.07.	Kecamatan Bunguran Timur	6.546.021.710,00	6.053.753.874,00	92,48	5.564.107.984,00
3.05.08.	Kecamatan Bunguran Barat	3.909.872.669,00	3.684.850.491,00	94,24	3.892.927.628,00
3.05.09.	Kecamatan Bunguran Utara	2.645.500.309,00	2.512.188.009,00	94,96	2.810.898.267,00
3.05.10.	Kecamatan Pulau Laut	2.142.139.509,00	2.030.780.622,00	94,80	2.065.626.304,00
3.05.11.	Kecamatan Midai	2.661.770.501,00	2.517.074.621,00	94,56	2.505.231.779,00
3.05.12.	Kecamatan Serasan	3.233.422.373,21	3.004.755.117,00	92,93	3.451.790.756,00
3.05.13.	Kecamatan Subi	2.495.600.303,00	2.368.518.825,00	94,91	2.620.894.132,00
3.05.14.	Kecamatan Pulau Tiga	1.938.567.308,00	1.832.623.941,00	94,53	2.052.911.353,00
3.05.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	1.901.418.120,90	1.813.689.941,00	95,39	2.034.156.188,00
3.05.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	2.368.261.744,00	2.229.207.750,00	94,13	2.240.546.404,00
3.05.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	1.875.666.904,00	1.768.907.395,00	94,31	1.775.475.670,00
3.05.18.	Kecamatan Serasan Timur	2.427.533.522,00	2.287.685.180,00	94,24	2.561.818.394,00
3.05.19.	Kecamatan Suak Midai	1.689.197.648,00	1.595.145.730,00	94,43	1.497.408.562,00
3.05.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	1.932.170.152,03	1.822.719.120,00	94,34	1.897.778.727,00
3.05.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1.519.346.418,00	1.448.734.657,00	95,35	1.638.511.469,00
Jumlah		588.387.432.696,00	535.705.286.409,00	91,05	536.509.204.533,50

**Tabel 7.3.5 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2020 dan 2019**

(dalam rupiah)

Kode	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1.01.01.	Dinas Pendidikan	78.362.840.169,00	73.158.736.743,17	93,36	95.411.228.909,35
1.01.02.	Dinas Pemuda dan Olahraga	8.237.495.228,00	5.326.465.993,00	64,66	0,00

Kode	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1.02.01.01	Dinas Kesehatan	96.610.860.275,00	79.621.554.531,79	82,41	94.840.526.592,27
1.02.01.02	Rumah Sakit Umum Daerah	45.229.057.056,00	39.120.015.713,00	86,49	38.705.014.868,38
1.03.01.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.820.726.383,00	34.938.973.831,00	73,06	139.766.467.854,26
1.04.01.	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	114.705.943.368,00	106.431.086.259,00	92,79	87.188.454.227,00
1.05.01.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	2.743.427.860,00	2.333.625.378,00	85,06	2.518.169.985,00
1.05.02.	Satuan Polisi Pamong Praja	8.156.369.153,00	7.698.645.852,00	94,39	9.234.399.021,00
1.05.03.	Dinas Pemadam Kebakaran	5.108.319.486,00	3.192.426.908,00	62,49	3.227.030.414,00
1.06.01.	Dinas Sosial	1.586.087.946,00	1.467.118.094,00	92,50	0,00
1.07.01.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.502.408.768,00	2.045.069.468,00	81,72	3.710.724.025,00
1.08.01.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.903.287.508,00	6.273.653.054,00	79,38	4.393.264.257,00
1.09.01.	Dinas Ketahanan Pangan	2.057.904.487,00	1.710.619.994,00	83,12	2.541.240.807,00
1.11.01.	Dinas Lingkungan Hidup	5.722.044.411,00	5.343.368.263,00	93,38	5.909.351.535,00
1.12.01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.214.627.765,00	2.018.434.697,00	91,14	3.105.150.673,00
1.13.01.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3.249.158.857,00	2.753.094.256,00	84,73	3.782.324.353,00
1.15.01.	Dinas Perhubungan	8.645.057.399,00	6.819.603.599,83	78,88	19.323.640.064,99
1.16.01.	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.254.906.806,00	3.469.671.186,00	81,55	5.406.213.778,00
1.18.01.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.671.157.303,00	2.210.497.821,00	82,75	2.929.102.824,00
1.23.01.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.639.654.357,00	2.049.395.899,00	77,64	3.755.848.535,00
2.01.01.	Dinas Perikanan	4.979.458.252,00	4.572.013.991,00	91,82	6.222.987.266,00
2.02.01.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.030.499.475,00	3.422.628.922,00	37,90	7.693.988.720,00
2.03.01.	Dinas Pertanian	2.855.727.718,00	2.535.599.106,00	88,79	4.524.706.883,00
2.04.01.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	3.020.576.995,00	2.411.038.132,00	79,82	5.799.026.362,00
3.01.01.	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.768.757.552,00	5.642.932.854,00	83,37	9.911.376.845,00
3.02.01.	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	14.102.106.598,00	12.859.426.739,00	91,19	14.654.719.063,00
3.02.02.	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	3.025.649.175,00	2.826.205.652,00	93,41	2.827.690.679,29
3.03.01.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.337.436.859,00	2.837.760.576,00	65,42	6.049.013.625,00
3.05.02.	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.05.03.	Sekretariat Daerah	56.267.040.729,00	46.479.261.009,00	82,60	64.097.755.058,00
3.05.04.	Sekretariat DPRD	33.790.015.114,00	29.525.030.728,00	87,38	33.766.135.641,00
3.05.05.	Inspektorat	3.055.159.184,00	2.752.030.216,00	90,08	4.379.471.521,00
3.05.06.	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	2.267.579.357,00	2.251.514.682,00	99,29	2.011.789.497,00
3.05.07.	Kecamatan Bunguran Timur	4.498.005.890,00	4.213.243.043,00	93,67	5.846.342.781,00
3.05.08.	Kecamatan Bunguran Barat	2.633.057.151,00	2.588.935.999,00	98,32	2.818.138.481,00
3.05.09.	Kecamatan Bunguran Utara	2.041.962.770,00	2.026.305.570,00	99,23	2.570.620.759,00
3.05.10.	Kecamatan Pulau Laut	2.015.124.763,00	2.003.365.493,00	99,42	2.547.350.632,00
3.05.11.	Kecamatan Midai	3.149.124.295,00	3.117.843.692,00	99,01	3.530.390.165,00
3.05.12.	Kecamatan Serasan	2.360.417.438,00	2.218.526.720,00	93,99	3.821.564.000,00
3.05.13.	Kecamatan Subi	1.611.345.704,00	1.602.485.412,00	99,45	2.807.034.195,00
3.05.14.	Kecamatan Pulau Tiga	2.686.785.093,00	2.645.224.582,00	98,45	3.154.642.772,39
3.05.15.	Kecamatan Bunguran Tengah	1.082.065.879,00	833.235.895,00	77,00	1.263.059.276,00
3.05.16.	Kecamatan Bunguran Timur Laut	1.155.890.834,00	1.136.869.150,00	98,35	1.600.694.295,87
3.05.17.	Kecamatan Bunguran Selatan	1.071.728.180,00	1.069.732.740,00	99,81	1.521.951.087,00
3.05.18.	Kecamatan Serasan Timur	1.209.873.897,00	1.155.671.754,00	95,52	1.667.424.256,00

Kode	SKPD	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
3.05.19.	Kecamatan Suak Midai	1.078.903.222,00	1.073.631.322,00	99,51	1.419.429.062,00
3.05.20.	Kecamatan Bunguran Batubi	967.989.982,00	858.146.934,00	88,65	966.273.491,00
3.05.21.	Kecamatan Pulau Tiga Barat	1.178.136.533,00	1.118.038.273,00	94,90	1.724.472.151,00
Jumlah		622.661.753.224,00	533.758.756.726,79	85,72	724.946.201.287,80

7.3.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target dan Telah Ditetapkan

Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan pendapatan daerah selama Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) hanya terserap sebesar 92,10% dari yang dianggarkan dan ditetapkan Rp91.494.699.400,00 terserap Rp84.265.627.606,00. DAK fisik tidak terserap dikarenakan beberapa bidang kegiatan DAK Reguler terlambat dilaksanakan dan melewati batas tanggal yang telah ditentukan dan kegiatan tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ditentukan sehingga daftar kontrak tidak disampaikan menyebabkan Tahap I dan II tidak disalurkan. Di samping itu, terdapat juga DAK Fisik Afirmasi Kesehatan Tahap III tidak disalurkan karena pihak ketiga tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Sedangkan untuk DAK Non Fisik penyaluran sesuai dengan ketentuan yaitu dari pagu yang ditetapkan dikurangi dengan SiLPA DAK Non Fisik di RKUD.
2. Dana Bagi Hasil Pajak dana perimbangan terserap sebesar 88,47% dari yang dianggarkan dan ditetapkan Rp108.033.819.450,00 terserap Rp95.573.589.308,00. Dana bagi hasil pajak dana perimbangan tidak terserap dikarenakan tunda salur yang telah ditetapkan yang menjadi komponen Pendapatan dalam APBD tahun 2019 tidak ditransfer oleh Pemerintah Pusat dan Triwulan IV tahun berjalan tidak disalurkan.

Realisasi belanja hanya terserap 88,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.211.049.185.920,00 terserap sebesar Rp1.069.464.043.135,79. Belanja yang tidak terserap disebabkan oleh beberapa kegiatan DAK Fisik dan Kegiatan DAK Non Fisik yang belum maksimal, di samping itu terdapat sisa anggaran dari hasil efisiensi setiap program dan kegiatan.

Sehubungan adanya hambatan-hambatan tersebut, terdapat beberapa langkah antisipatif yang sudah dilakukan, yaitu:

1. Melakukan perencanaan yang matang pada saat penyusunan anggaran kegiatan yang didasarkan pada perubahan-perubahan yang mungkin terjadi, sehingga meminimalisir ketidakefektifan pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Melakukan pengkajian alternatif pemecahan masalah pengadaan barang/jasa yang gagal lelang, sehingga ditemukan solusi-solusi yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya kondisi yang serupa.
3. Meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme SDM pengelola keuangan SKPD dengan mengikuti diklat dan kursus yang diselenggarakan oleh lembaga/instansi lain atau pembinaan secara mandiri.
4. Meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan dengan fasilitasi pembinaan yang dilakukan secara proaktif dan intensif.

7.4 Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Bupati Natuna Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut:

7.4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab Laporan Keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas Laporan Keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

Entitas Akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Kabupaten Natuna yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan Laporan Keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan Laporan Pertanggungjawaban, berupa Laporan Keuangan.

Dalam penetapan Entitas Pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.

7.4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan – LO, Beban dan Pos-pos Luar Biasa dalam Laporan Operasional dan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas dalam Neraca.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah dan Beban diakui pada saat Kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau Pemerintah Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh Pemerintah Daerah, serta Belanja, Transfer dan

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

7.4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusun Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

7.4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilih menjadi 2 (dua), yakni:

1) Pendapatan - LO

Pendapatan - LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan - LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan - LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan - LRA menggunakan basis kas sehingga Pendapatan LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

7.4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode Pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode Pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas, dan

diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan atas bruto.

7.4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

7.4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran Pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing, dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar kurs tengah bank (Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

7.4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan setara kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal Neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa utang PFK.

Kas dan setara kas yang diakui, terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah (Kasd)

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) berasal dari Saldo Kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke Kas Daerah per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening Bendahara Penerimaan.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

5) Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di Bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya di luar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

7.4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

1) Piutang Pajak/Piutang Retribusi

Piutang Pajak/Piutang Retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau Retribusi Daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah Daerah sering kali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada Pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan Aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada Tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk tujuan penyusunan Neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan Neraca dihitung berapa Bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

3) Bagian Lancar Tuntutan Perpendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perpendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain Aset yang berupa Aset Lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan Neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah TGR yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan Neraca perlu dihitung beberapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian lancar tagihan penjualan angsuran, Bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, bagian lancar tuntutan perpendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset berupa piutang di Neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

- 2) Penyajian nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam Laporan Keuangan pada catatan atas Laporan Keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya persentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
- a) Piutang Pajak

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Pajak %	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,5%	10%	50%	100%	
	Nilai Yang Dapat direalisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan kualitas piutang pajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/atau
 - c. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib pajak likuid; dan/atau
 - f. Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak kurang kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau

- b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. Umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun; dan/atau
 - b. Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/atau
 - c. Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - d. Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - e. Wajib pajak mengalami musibah (*force majeurs*).

b) Piutang Retribusi

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Pajak	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat direalisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan kualitas piutang retribusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
 - a. Jika umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Jika umur piutang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/atau

- b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a. Jika umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a. jika umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Negara.

c) Piutang Lainnya

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
1.	Piutang Pajak	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	% penyisihan	0,5%	10%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....
	Nilai Yang Dapat direalisasikan	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....	Rp.....

Penggolongan kualitas piutang lainnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar

Apabila belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.

2. Kualitas Kurang Lancar

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.

3. Kualitas Diragukan

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.

4. Kualitas Macet

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan Piutang Negara.

- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di Neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
 - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
 - b) Penghapusbukuan (*write down*)

Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian Penghapusbukuan.
- (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari Penghapusbukuan pada Neraca Pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan Penghapusbukuan.
- (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Bupati yang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku. Pengambilan Keputusan Penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan Penghapusbukuan tersebut.

c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan Keputusan Hapus Tagih bagi Pemerintah Daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
- (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyegarkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.

- (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
 - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
 - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
 - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
- d) Penerimaan Tunai atas Piutang yang telah dihapusbukukan
- Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.
- e) Restrukturisasi
- Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

7.4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat berdasarkan metode perpetual dimana fungsi akuntansi selalu mencatat nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit biaya perolehannya. Untuk penerimaan dan pengeluaran fisik barang yang mempunyai kadaluarsa, diterapkan praktek bisnis yang sehat guna meminimalisir adanya barang yang rusak/usang, sedangkan pengeluarannya menggunakan metode penilaian.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil *stock opname* yang disebabkan persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan

pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga-nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan Transaksi wajar.

7.4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan *royalty* atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

a) Dicatat sebesar nilai perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk Surat Berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.

b) Dicatat sebesar nilai wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

- c) Dicatat sebesar nilai nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

- d) Dicatat sebesar nilai tercatat atau nilai wajar lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar Aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek Pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

- 2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

- a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang dari 20%.

- b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

- c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat non permanen-dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir di neraca dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perlakuan dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.

7.4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

7.4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset tetap merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional Pemerintah. Aset Tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu informasi tentang nilai Aset Tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk Pengambilan Keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai suatu aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam Neraca dan beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan metode penyusutan per bulan dihitung mulai pada bulan perolehan. Untuk aset tetap yang diperoleh sebelum tahun 2016, bulan perolehan dihitung pada bulan Desember tahun perolehan.

7.4.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola:
 - (a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
 - (b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
 - (c) biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
2. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
 - (a) biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
 - (b) biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
 - (c) biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
 - (d) biaya penyewaan sarana dan peralatan;
 - (e) biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
3. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
 - (a) asuransi;
 - (b) biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
 - (c) biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi; dan
 - (d) biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.
4. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 - (a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - (b) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - (c) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

7.4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam:

1) Tagihan Jangka Panjang.

- a) Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak berita acara penjualan Aset yang bersangkutan.
- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, diukur sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.

2) Aset Tidak Berwujud (ATB)

Aset Tidak Berwujud dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tidak Berwujud dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tidak Berwujud didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Cara perolehan diklasifikasikan sebagai berikut:

- Perolehan Terpisah

- a. Jika suatu Aset Tidak Berwujud diperoleh secara terpisah, biaya Aset Tidak Berwujud biasanya dapat diukur secara andal. Hal itu akan tampak jelas jika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya.
- b. Biaya perolehan suatu Aset Tidak Berwujud terdiri atas harga beli, termasuk pajak dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, misalnya imbalan profesional konsultan hukum. Apabila terdapat diskonto atau rabat, maka diskonto atau rabat tersebut mengurangi biaya perolehan Aset.

- Pertukaran Aset

Suatu aset tidak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah aset tidak berwujud yang tidak sejenis atau dengan aset lainnya. Biaya perolehan aset tidak berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara kas yang diserahkan.

- Aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal (swakelola)

Biaya perolehan aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal (swakelola) terdiri atas semua pengeluaran yang dapat dikaitkan langsung, atau dapat dialokasikan atas dasar yang rasional dan konsisten, yang dilakukan untuk menghasilkan dan mempersiapkan aset tersebut sehingga

siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya. Biaya perolehan aset tidak berwujud mencakup, apabila dapat diterapkan:

- a. Pengeluaran untuk bahan baku dan jasa yang digunakan atau dikonsumsi dalam menghasilkan Aset Tidak Berwujud;
 - b. Gaji, upah dan biaya pegawai terkait lainnya dari pegawai yang langsung terlibat dalam menghasilkan Aset tersebut; dan
 - c. Pengeluaran yang langsung terkait dengan dihasilkannya Aset tersebut, seperti biaya pendaftaran hak hukum.
- 3) Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah direklasifikasi ke aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai buku.

7.4.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 2) Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar Surat Utang Pemerintah Daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilainya dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.
- 3) Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
 - a) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal Neraca.
 - b) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar Surat Utang Pemerintah Daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
 - c) Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

7.4.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari:

1) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah. Saldo ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah/dikurang oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap dan lain-lain.

2) Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup rekening koran PPKD/SKPD.

7.4.4 Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

7.4.4.1 Koreksi Kesalahan

Setiap kesalahan harus dikoreksi segera setelah diketahui. Koreksi kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi Laporan Keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang; dan
- b. Kesalahan berulang dan sistemik.

Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan - LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila Laporan Keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan - LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan - LO atau akun beban.

7.4.4.2 Penyajian Kembali (*Restatement*) Neraca

Laporan Keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah (*trend*) posisi keuangan, kinerja dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada Laporan Keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan.

Terkait penyajian kembali Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

- 1) Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan Nilai Buku pada periode berkenaan sesuai perubahan kebijakan akuntansi.
- 2) Menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara Laporan Keuangan baru dibandingkan dengan Laporan Keuangan yang telah diterbitkan periode sebelumnya.

7.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

7.5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasi pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.

7.5.1.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan - LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Sisa Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan	Tahun 2020		Tahun 2019	
	(Rp)		(Rp)	
	926.418.003.270,96		1.350.963.641.174,67	

Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah pada tahun 2020. Anggaran pendapatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.052.403.143.059,41 dengan realisasi sebesar Rp926.418.003.270,96 atau sebesar 88,03% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2019, realisasi pendapatan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp(424.545.637.903,71) sebesar 31,43%.

Sementara rincian anggaran dan realisasi pendapatan tahun 2020 dan 2019 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 dan 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pendapatan Asli Daerah	70.235.630.500,00	51.528.266.743,05	73,36	56.417.450.262,53	(4.889.183.519,48)	(8,67)
2	Pendapatan Transfer	970.915.332.559,41	861.412.971.434,00	88,72	1.283.425.574.227,00	(422.012.602.793,00)	(32,88)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	11.252.180.000,00	13.476.765.093,91	119,77	11.120.616.685,14	2.356.148.408,77	21,19
	Jumlah	1.052.403.143.059,41	926.418.003.270,96	88,03	1.350.963.641.174,67	(424.545.637.903,71)	(31,43)

7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp51.528.266.743,05 Realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp(4.889.183.519,48) atau (8,67%). Berikut ini disajikan rincian anggaran dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 7.5.2 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	10.678.400.000,00	11.545.052.215,25	108,12	15.096.327.674,17	(3.551.275.458,92)	(23,52)
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	441.000.000,00	689.889.656,00	156,44	435.390.328,00	254.499.328,00	58,45
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	7.028.824.500,00	5.119.170.581,00	72,83	4.008.805.474,00	1.110.365.107,00	27,70
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	52.087.406.000,00	34.174.154.290,80	65,61	36.876.926.786,36	(2.702.772.495,56)	(7,33)
	Jumlah	70.235.630.500,00	51.528.266.743,05	73,36	56.417.450.262,53	(4.889.183.519,48)	(8,67)

7.5.1.1.1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2020 adalah sebesar Rp11.545.052.215,25 atau sebesar 108,12% dari anggaran yang telah ditetapkan. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.3 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Hotel - LRA	101.200.000,00	132.936.644,00	131,36	183.556.671,00	(50.620.027,00)	(27,58)
2	Pajak Restoran - LRA	2.201.200.000,00	2.127.274.603,47	96,64	3.270.846.325,70	(1.143.571.722,23)	(34,96)
3	Pajak Hiburan - LRA	14.500.000,00	27.213.825,00	187,68	19.780.000,00	7.433.825,00	37,58
4	Pajak Reklame - LRA	85.000.000,00	93.123.000,00	109,56	146.935.000,00	(53.812.000,00)	(36,62)
5	Pajak Penerangan Jalan - LRA	5.600.000.000,00	5.834.966.658,00	104,20	7.906.826.933,00	(2.071.860.275,00)	(26,20)
6	Pajak Parkir - LRA	5.000.000,00	6.162.000,00	123,24	7.470.000,00	(1.308.000,00)	(17,51)
7	Pajak Air Tanah - LRA	2.500.000,00	1.190.000,00	47,60	0,00	1.190.000,00	100,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	1.009.000.000,00	759.308.631,50	75,25	1.211.994.056,00	(452.685.424,50)	(37,35)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	1.160.000.000,00	1.515.585.184,00	130,65	1.427.611.475,00	87.973.709,00	6,16
10	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	500.000.000,00	1.047.291.669,28	209,46	921.307.213,47	125.984.455,81	13,67
Jumlah		10.678.400.000,00	11.545.052.215,25	108,12	15.096.327.674,17	(3.551.275.458,92)	(23,52)

Pendapatan pajak di Pemerintah Kabupaten Natuna dikelola oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Berdasarkan pengelolaan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, dan pajak parkir dipungut dengan sistem *self assessment* yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang, dimana pajak-pajak tersebut pada umumnya terealisasi lebih besar dari target yang ditetapkan, sebagai gambaran pendapatan pajak hotel yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp132.936.644,00 atau sebesar 131,36% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2019, realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp(3.549.931.046,37) atau sebesar (23,52%). Diantara pajak yang mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya adalah pajak hotel mengalami penurunan sebesar Rp(50.620.027,00) atau sebesar (27,58%). Pajak restoran mengalami penurunan sebesar Rp(1.143.571.722,23) atau sebesar (34,96%) dari realisasi pendapatan pajak restoran tahun 2019. Pajak hiburan mengalami kenaikan sebesar Rp7.433.825,00 atau sebesar 37,58% dari tahun 2019. Pajak penerangan jalan juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp(2.071.860.275,00) atau sebesar (26,20%). Pajak parkir mengalami penurunan sebesar Rp(1.308.000,00) atau sebesar (17,51%) dari tahun 2019.

Sedangkan pajak reklame dan pajak air tanah dipungut dengan sistem *official assesment*, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang. Adapun pendapatan pajak reklame yang dipungut Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2020 adalah sebesar Rp93.123.000,00 atau sebesar 109,56% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sementara pendapatan pajak air tanah pada tahun 2020 yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp1.190.000,00 mengalami kenaikan sebesar 100% dari anggaran yang telah ditetapkan.

Realisasi pendapatan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp1.515.585.184,00, sedangkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) terealisasi sebesar Rp1.047.291.669,28 atau sebesar 209,46%. Sedangkan pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp759.308.631,50 atau sebesar 75,25%.

7.5.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2020 adalah sebesar Rp689.889.656,00 atau sebesar 156,44% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding dengan pendapatan retribusi tahun 2019, Pendapatan retribusi 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp254.499.328,00 atau sebesar 58,45%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.4 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan – LRA	246.000.000,00	464.724.900,00	188,91	209.525.100,00	255.199.800,00	121,80
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan – LRA	30.000.000,00	87.103.000,00	290,34	44.344.000,00	42.759.000,00	96,43
3	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus – LRA	10.000.000,00	16.000.000,00	160,00	8.700.000,00	7.300.000,00	83,91
4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang – LRA	20.000.000,00	8.012.000,00	40,06	19.775.000,00	(11.763.000,00)	(59,48)
5	Retribusi Penyeberangan Air – LRA	70.000.000,00	62.400.000,00	89,14	58.800.000,00	3.600.000,00	6,12
6	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan – LRA	65.000.000,00	51.649.756,00	79,46	94.246.228,00	(42.596.472,00)	(45,20)
Jumlah		441.000.000,00	689.889.656,00	156,44	435.390.328,00	254.499.328,00	58,45

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Anggaran pendapatan retribusi pelayanan kesehatan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp246.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp464.724.900,00 atau sebesar 188,91% dari anggaran yang ditargetkan. Retribusi pelayanan kesehatan mengalami peningkatan sebesar Rp255.199.800,00 dibanding tahun 2019 atau sebesar 121,80%. Retribusi pelayanan kesehatan didapatkan dari pelayanan kesehatan di Puskesmas dan dicatat pada Dinas Kesehatan.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Anggaran pendapatan retribusi persampahan/kebersihan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp30.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp87.103.000,00 atau sebesar 290,34% dari anggaran yang ditargetkan. Retribusi persampahan/kebersihan mengalami peningkatan sebesar Rp42.759.000,00 dibanding tahun 2019 atau sebesar 96,43%. Pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

c) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Anggaran pendapatan retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus pada tahun 2020 adalah sebesar Rp10.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp16.000.000,00 atau sebesar 160,00% dari anggaran. Realisasi retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus dibanding tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp7.300.000,00 atau sebesar 83,91%. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus secara teknis dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

d) Retribusi Pelayanan Tera-tera Ulang

Anggaran pendapatan retribusi pelayanan tera-tera ulang pada tahun 2020 adalah sebesar Rp20.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp8.012.000,00 atau sebesar 40,06% dari anggaran yang ditargetkan. Realisasi retribusi pelayanan tera-tera dibanding tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp(11.763.000,00) atau sebesar 59,48%. Pendapatan pelayanan tera-tera ulang ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

e) Retribusi Penyeberangan Air

Anggaran pendapatan retribusi penyeberangan air pada tahun 2020 adalah sebesar Rp70.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp62.400.000,00 atau sebesar 89,14% dari anggaran yang ditargetkan. Realisasi retribusi penyeberangan air dibanding tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp3.600.000,00 atau sebesar 6,12%. Pendapatan retribusi penyeberangan air dikelola oleh Dinas Perhubungan.

f) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Anggaran pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp65.000.000,00, sedangkan realisasi sebesar Rp51.649.756,00 atau sebesar 79,46% dari anggaran yang ditargetkan. Retribusi izin mendirikan bangunan dibanding tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp(42.596.472,00) atau sebesar (45,20%). Retribusi mendirikan bangunan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sebagian besar pendapatan retribusi daerah pada tahun 2020 terealisasi lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan, kecuali Retribusi Pelayanan Kesehatan–LRA, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan–LRA dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus–LRA yang realisasinya melebihi target yang ditetapkan. Ini disebabkan belum optimalnya pemungutan dan kebijakan yang diterapkan di lapangan.

7.5.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2020 adalah sebesar Rp5.119.170.581,00 atau sebesar 72,83% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp7.028.824.500,00.

Rincian anggaran dan realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.5 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	Deviden Bank Riau	7.028.824.500,00	5.119.170.581,00	72,83	4.008.805.474,00	1.110.365.107,00	27,70
	Jumlah	7.028.824.500,00	5.119.170.581,00	72,83	4.008.805.474,00	1.110.365.107,00	27,70

7.5.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2020 adalah sebesar Rp34.174.154.290,80 atau sebesar 65,61% dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dibanding tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp(2.702.772.495,56) atau sebesar (7,33%). Rincian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.6 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	0,00	0,00	0,00	699.940.000,00	(699.940.000,00)	(100,00)
2	Penerimaan Jasa Giro - LRA	5.462.206.553,00	1.918.868.787,08	35,13	2.756.578.460,10	(837.709.673,02)	(30,39)
3	Pendapatan Bunga - LRA	10.000.000.000,00	2.724.845.337,35	27,25	2.218.767.123,42	506.078.213,93	22,81
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	265.523.493,60	100,00	592.322.240,54	(326.798.746,94)	(55,17)
5	Pendapatan Denda Pajak - LRA	55.000.000,00	119.186.134,32	216,70	142.343.151,59	(23.157.017,27)	(16,27)
6	Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0,00	92.158,00	100,00	0,00	92.158,00	(100,00)
7	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	618.203.281,00	100,00	1.510.599.805,00	(892.396.524,00)	(59,08)
8	Pendapatan BLUD - LRA	15.800.000.000,00	15.271.271.870,33	96,65	19.597.872.446,72	(4.326.600.576,39)	(22,08)
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LRA	6.679.787.600,00	6.777.215.870,00	101,46	6.685.501.567,00	91.714.303,00	1,37
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	14.090.411.847,00	6.478.947.359,12	45,98	2.673.001.991,99	3.805.945.367,13	142,38
	Jumlah	52.087.406.000,00	34.174.154.290,80	65,62	36.876.926.786,36	(2.702.772.495,56)	(7,33)

a) Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp0,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp0,00 atau sebesar 0,00% dari anggaran yang ditargetkan. Realisasi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan dibanding tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp(699.940.000,00) atau sebesar (100%), ini disebabkan pada tahun 2020 tidak ada realisasi atas pendapatan tersebut.

Penurunan Pendapatan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan disebabkan tidak adanya penjualan peralatan dan mesin berupa kendaraan roda empat yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

b) Penerimaan Jasa Giro

Anggaran penerimaan jasa giro pada tahun 2020 adalah sebesar Rp5.462.206.553,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp1.918.868.787,08 atau sebesar 35,13% dari anggaran yang ditargetkan. Dibanding dengan tahun 2019, realisasi penerimaan jasa giro mengalami penurunan sebesar Rp(837.709.637,02) atau sebesar 30,39%. Adapun rincian penerimaan jasa giro sebagai berikut:

Tabel 7.5.7 Penerimaan Jasa Giro

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan / Penurunan	(dalam rupiah)	
1	Jasa Giro Kas Daerah	5.172.707.553,00	1.670.750.358,08	32,30	2.479.935.805,09	(809.185.447,01)	(32,63)	
2	Jasa Giro Bendahara	289.499.000,00	248.118.429,00	85,71	276.642.655,01	(28.524.226,01)	(10,31)	
	Jumlah	5.462.206.553,00	1.918.868.787,08	35,13	2.756.578.460,10	(837.709.637,02)	(30,39)	

c) Pendapatan Bunga

Anggaran pendapatan bunga pada tahun 2020 adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp2.724.845.337,35 atau sebesar 27,25% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, pendapatan bunga naik sebesar Rp506.078.213,93 atau sebesar 22,81%. Pendapatan bunga merupakan pendapatan dari bunga deposito yang ditempatkan pada bank yang sehat yang jangka waktunya 1 (satu) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis.

d) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Anggaran pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp265.523.493,60 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Dibanding tahun 2019 pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan mengalami penurunan sebesar Rp(326.798.746,94). Adapun rincian pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:

Tabel 7.5.8 Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan / Penurunan	(dalam rupiah)	
1	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan	0,00	265.523.493,60	100,00	580.306.240,54	(314.782.746,94)	(54,24)	
2	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Kesehatan	0,00	0,00	0,00	12.016.000,00	(12.016.000,00)	(100,00)	
	Jumlah	0,00	265.523.493,60	100,00	592.322.240,54	(326.798.746,94)	(55,17)	

e) Pendapatan Denda Pajak

Anggaran pendapatan denda pajak pada tahun 2020 adalah sebesar Rp55.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp119.186.134,32 atau sebesar 216,70% dari anggaran yang ditetapkan. Dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi pendapatan denda pajak mengalami penurunan sebesar Rp(23.157.017,27) atau sebesar (16,27%). Rincian pendapatan denda pajak sebagai berikut:

Tabel 7.5.9 Pendapatan Denda Pajak

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan / Penurunan	(dalam rupiah)	
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA	0,00	657.975,00	100,00	421.120,00	236.855,00	56,24	
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran – LRA	0,00	1.478.830,44	100,00	1.327.876,58	150.953,86	11,37	
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA	0,00	341.304,00	100,00	509.000,00	(167.696,00)	(32,95)	
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA	0,00	1.194.020,00	100,00	3.437.540,00	(2.243.520,00)	(65,27)	

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan / Penurunan	%
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA	0,00	53.760,00	100,00	57.000,00	(3.240,00)	(5,68)
6	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	45.000.000,00	110.970.385,00	246,60	134.598.743,00	(23.628.358,00)	(17,55)
7	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA	10.000.000,00	4.472.699,88	44,73	1.967.772,01	2.504.927,87	127,30
8	Pendapatan denda pusat kebugaran – LRA	0,00	17.160,00	100,00	24.100,00	(6.940,00)	(28,80)
	Jumlah	55.000.000,00	119.186.134,32	216,70	142.343.151,59	(23.157.017,27)	(16,27)

f) Pendapatan Denda Retribusi

Pendapatan denda retribusi pada tahun 2020 tidak dianggarkan dan terealisasi sebesar Rp92.158,00. Dibanding tahun 2019, Pendapatan denda retribusi mengalami kenaikan sebesar Rp92.158,00 atau sebesar 100%, rincian pendapatan denda retribusi dilampirkan sebagai berikut:

Tabel 7.5.10 Pendapatan Denda Retribusi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu (LRA)	0,00	92.158,00	0,00	0,00	92.158,00	100,00
	Jumlah	0,00	92.158,00	0,00	0,00	92.158,00	100,00

g) Pendapatan dari Pengembalian

Anggaran pendapatan dari pengembalian pada tahun 2020 tidak dianggarkan, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp618.203.281,00 atau sebesar 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding dengan tahun 2019, pendapatan dari pengembalian mengalami penurunan sebesar Rp(892.396.524,00) atau sebesar 59,08%. Adapun rincian pendapatan dari pengembalian sebagai berikut:

Tabel 7.5.11 Pendapatan dari Pengembalian

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – LRA	0,00	374.108.225,00	100,00	1.431.093.937,00	(1.056.985.712,00)	(73,86)
2	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas – LRA	0,00	239.095.056,00	100,00	79.505.868,00	159.589.188,00	200,73
3	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja pemeliharaan bangunan	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00	5.000.000,00	100,00
	Jumlah	0,00	618.203.281,00	100,00	1.510.599.805,00	(892.396.524,00)	(59,08)

h) Pendapatan BLUD

Anggaran pendapatan BLUD pada tahun 2020 adalah sebesar Rp15.800.000.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp15.271.271.870,33 atau sebesar 96,65% dari anggaran yang telah ditetapkan. Dibanding tahun 2019 pendapatan BLUD mengalami penurunan sebesar Rp(4.326.600.576,39) atau sebesar (22,08%). Pendapatan BLUD merupakan pendapatan yang berasal dari jasa layanan umum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna yang menjalankan pengelolaan keuangan BLUD.

i) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Anggaran pendapatan dana kapitasi JKN tahun 2020 adalah sebesar Rp6.679.787.600,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp6.777.215.870,00 atau 101,46% dari anggaran. Dibanding dengan tahun 2019, pendapatan dana kapitasi JKN mengalami kenaikan sebesar Rp91.714.303,00 atau 1,37%. Pendapatan dana kapitasi JKN merupakan pendapatan dana kapitasi yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) yang belum menerapkan pengelolaan keuangan BLUD.

j) Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

Anggaran lain-lain PAD yang sah lainnya pada tahun 2020 adalah sebesar Rp14.090.411.847,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp6.478.947.359,12 atau sebesar 45,98% dari anggaran. Dibanding dengan tahun 2019, lain-lain PAD yang sah lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp3.805.945.367,13 atau sebesar 142,38%. Lain-lain PAD yang sah lainnya merupakan pendapatan yang secara informasi transaksi tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak bisa diklasifikasikan ke kodifikasi pendapatan yang sudah ada. Lain-lain PAD yang sah lainnya selama tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 7.5.12 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya

<i>(dalam rupiah)</i>							
No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA	14.090.411.847,00	6.478.947.359,12	12,24	2.673.001.991,99	3.805.945.367,13	142,38
	Jumlah	14.090.411.847,00	6.478.947.359,12	12,24	2.673.001.991,99	3.805.945.367,13	142,38

7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi pendapatan transfer tahun 2020 adalah sebesar Rp861.412.971.434,00 atau sebesar 88,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp970.915.332.559,41. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar Rp(358.380.124.793,00) atau sebesar (29,38%). Penurunan Pendapatan Transfer terjadi akibat perubahan alokasi dana transfer yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat baik untuk pendapatan murni dan tunda salur yang diakibatkan adanya *refocusing*, penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), pemerintah daerah diwajibkan melakukan penyesuaian APBD sebagai akibat dari penurunan Penerimaan Negara dan berdampak terhadap penyaluran transfer ke daerah dan Dana Desa serta realisasi bagi hasil dari Provinsi mengalami penurunan dikarenakan aktivitas ekonomi yang terganggu sebagai akibat dari adanya Covid-19. Rincian Pendapatan Transfer sebagai berikut:

Tabel 7.5.13 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

<i>(dalam rupiah)</i>							
No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	813.529.521.812,41	718.829.186.603,00	88,36	1.145.678.638.470,00	(426.849.451.867,00)	(37,26)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	93.062.189.000,00	93.062.189.000,00	100,00	91.459.336.000,00	1.602.853.000,00	1,75
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LRA	63.823.621.747,00	49.021.595.831,00	76,81	46.287.599.757,00	2.733.996.074,00	5,91
4	Bantuan Keuangan – LRA	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	0,00	500.000.000,00	100,00
	Jumlah	970.915.332.559,41	861.412.971.434,00	88,72	1.283.425.574.227,00	(422.012.602.793,00)	(32,88)

7.5.1.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan tahun 2020 adalah sebesar Rp718.829.186.603,00 atau sebesar 88,36% dari yang dianggarkan. Dibanding tahun 2019, transfer pemerintah pusat dana perimbangan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp(426.849.451.867,00) atau sebesar (37,26%). Penurunan Pendapatan Transfer terjadi akibat perubahan alokasi dana transfer yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat baik untuk pendapatan murni dan tunda salur yang diakibatkan adanya *refocussing* penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), pemerintah daerah diwajibkan melakukan penyesuaian APBD sebagai akibat dari penurunan Penerimaan Negara dan berdampak terhadap penyaluran transfer ke daerah dan Dana Desa. Rincian transfer pemerintah pusat-dana perimbangan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.14 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Bagi Hasil Pajak – LRA	108.033.819.450,00	95.573.589.308,00	88,47	69.545.550.405,00	26.028.038.903,00	37,43
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	216.215.298.962,41	142.606.417.689,00	65,96	521.979.922.656,00	(379.373.504.967,00)	(72,68)
3	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	397.785.704.000,00	396.383.552.000,00	99,65	391.521.681.000,00	4.861.871.000,00	1,24
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	91.494.699.400,00	84.265.627.606,00	92,10	162.631.484.409,00	(78.365.856.803,00)	(48,19)
Jumlah		813.529.521.812,41	718.829.186.603,00	88,36	1.145.678.638.470,00	(426.849.451.867,00)	(37,26)

7.5.1.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak

Anggaran pendapatan bagi hasil pajak tahun 2020 adalah sebesar Rp108.033.819.450,00 sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp95.573.589.308,00 atau sebesar 88,47% dari anggaran. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.15 Rincian Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 -	14.995.685.364,00	14.224.322.854,00	94,86	5.937.698.165,00	8.286.624.689,00	139,56
2	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau – LRA	30.839.247,00	29.013.389,00	94,08	290.418.240,00	(261.404.851,00)	(90,01)
3	Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan	90.116.193.278,00	78.920.187.274,00	87,58	61.390.385.979,00	17.529.801.295,00	28,55
4	Bagi hasil dari biaya pungut PBB	2.891.101.561,00	2.400.065.791,00	83,02	1.927.048.021,00	473.017.770,00	24,55
Jumlah		108.033.819.450,00	95.573.589.308,00	88,47	69.545.550.405,00	26.028.038.903,00	37,43

7.5.1.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam

Anggaran pendapatan bagi hasil bukan pajak sumber daya alam adalah sebesar Rp216.215.298.962,41, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp142.606.417.689,00 atau sebesar 65,96% dari anggaran. Dibanding dengan tahun 2019, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam mengalami penurunan yaitu sebesar Rp(379.373.504.967,00) atau sebesar (72,68)%.. Penurunan dikarenakan penerimaan negara turun sebagai dampak dari adanya Covid-19. Adapun rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil bukan pajak sumber daya alam adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.16 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LRA	102.202.439,00	55.846.503,00	54,64	47.914.015,00	7.932.488,00	16,56
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksplorasi (Royalti) - LRA	4.415.632.567,00	3.695.534.467,00	83,69	5.765.443.000,00	(2.069.908.533,00)	(35,90)
3	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA	1.592.666.192,00	784.599.000,00	49,26	394.262.571,00	390.336.429,00	99,00
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	0,00	3.677.289,00	100,00	295.077.900,00	(291.400.611,00)	(98,75)
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	98.596.713.539,30	73.514.540.564,00	74,56	168.948.744.605,00	(95.434.204.041,00)	(56,49)
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	111.508.084.225,11	64.552.219.866,00	57,89	346.528.480.565,00	(281.976.260.699,00)	(81,37)
Jumlah		216.215.298.962,41	142.606.417.689,00	65,96	521.979.922.656,00	(379.373.504.967,00)	(72,68)

7.5.1.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Anggaran pendapatan Dana Alokasi Umum tahun 2020 sebesar Rp397.785.704.000,00, sedangkan realisasinya adalah sebesar Rp396.383.552.000,00 atau sebesar 99,65%. Dibanding dengan tahun 2019, dana alokasi umum mengalami kenaikan Rp4.861.871.000,00 atau sebesar 1,24%, dimana penerimaan Dana Alokasi Umum tahun 2019 adalah sebesar Rp391.521.681.000,00.

7.5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Anggaran pendapatan Dana Alokasi Khusus tahun 2020 adalah sebesar Rp91.494.699.400,00 sedangkan realisasinya adalah Rp84.265.627.606,00 atau sebesar 92,10% dari anggaran. Dana Alokasi Khusus dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

1. Dana Alokasi Khusus Fisik

Anggaran Dana Alokasi khusus (DAK) Fisik Rp46.542.672.000,00 dengan realisasinya sebesar Rp40.353.364.546,00 atau sebesar 86,70% dari anggaran. Dibanding dengan tahun 2019, Dana Alokasi Khusus Fisik mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp(80.551.643.250,00) atau sebesar (66,62%). Adapun rincian Dana Alokasi Khusus Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.17 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Fisik Bidang Infrastruktur Jalan – LRA	0,00	0,00	0,00	31.208.770.950,00	(31.208.770.950,00)	(100,00)
2	DAK Fisik Bidang Infrastruktur Irigasi – LRA	0,00	0,00	0,00	2.163.782.137,00	(2.163.782.137,00)	(100,00)
3	DAK Fisik Bidang Infrastruktur Air Minum – LRA	751.269.000,00	751.269.000,00	100,00	5.726.255.466,00	(4.974.986.466,00)	(86,88)
4	DAK Fisik Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	5.133.333.000,00	5.133.333.000,00	100,00	6.117.589.999,00	(984.256.999,00)	(16,09)
5	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA	3.588.702.000,00	3.588.702.000,00	100,00	6.448.801.000,00	(2.860.099.000,00)	(44,35)
6	DAK Fisik Bidang Kesehatan - LRA	21.307.921.000,00	19.076.847.223,00	89,53	37.144.188.300,00	(18.067.341.077,00)	(48,64)
7	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA	1.090.498.000,00	1.090.497.995,00	100,00	1.497.261.000,00	(406.763.005,00)	(27,17)
8	DAK Fisik Bidang Transportasi Perdesaan - LRA	2.598.052.000,00	2.095.449.128,00	80,65	7.112.108.134,00	(5.016.659.006,00)	(70,54)
9	DAK Fisik Bidang Pertanian - LRA	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00	1.069.754.987,00	(849.754.987,00)	(79,43)
10	DAK Fisik Bidang Pendidikan - LRA	8.399.182.000,00	8.397.266.200,00	99,98	20.273.753.273,00	(11.875.487.073,00)	(58,58)
11	DAK Fisik Bidang pariwisata - LRA	3.453.715.000,00	0,00	0,00	1.212.023.250,00	(1.212.023.250,00)	(100,00)
12	DAK Fisik Bidang pasar - LRA	0,00	0,00	0,00	930.719.300,00	(930.719.300,00)	(100,00)
Jumlah		46.542.672.000,00	40.353.364.546,00	86,70	120.905.007.796,00	(80.551.643.250,00)	(66,62)

2. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Anggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik tahun 2020 adalah sebesar Rp44.952.027.400,00 dengan realisasi sebesar Rp43.912.263.060,00 atau sebesar 97,70% dari anggaran. Dibanding dengan tahun 2019, Dana Alokasi Khusus Non Fisik mengalami kenaikan sebesar Rp2.185.786.447,00 atau sebesar 5,24%. Rincian anggaran dan realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.18 Rincian Pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	DAK Non Fisik Tunjangan khusus Guru – LRA	658.239.400,00	653.430.000,00	99,27	1.520.411.000,00	(866.981.000,00)	(57,02)
2	DAK Non Fisik Tambahan penghasilan guru PNSD - LRA	760.500.000,00	760.500.000,00	100,00	531.500.000,00	229.000.000,00	43,09
3	DAK Non Fisik Tunjangan profesi guru PNSD - LRA	18.526.638.000,00	18.526.638.000,00	100,00	18.521.352.987,00	5.285.013,00	0,03
4	DAK Non Fisik Bantuan operasional penyelenggaraan PAUD (BOP) - LRA	2.162.400.000,00	2.119.755.000,00	98,03	1.893.448.100,00	226.306.900,00	11,95
5	DAK Non Fisik Bantuan operasional kesehatan - LRA	18.121.557.000,00	18.997.557.000,00	104,83	14.244.379.576,00	4.753.177.424,00	33,37
6	DAK Non Fisik Akreditasi rumah sakit – LRA	304.100.000,00	152.050.000,00	50,00	635.700.000,00	(483.650.000,00)	(76,08)
7	DAK Non Fisik Akreditasi puskemas – LRA	0,00	0,00	0,00	358.000.000,00	(358.000.000,00)	(100,00)
8	DAK Non Fisik Jaminan persalinan - LRA	664.050.000,00	373.619.040,00	56,26	798.225.000,00	(424.605.960,00)	(53,19)
9	DAK Non Fisik Bantuan operasional Keluarga Berencana - LRA	2.762.849.000,00	1.359.862.000,00	49,22	2.087.416.700,00	(727.554.700,00)	(34,85)
10	DAK Non Fisik Data pelayanan administrasi kependudukan - LRA	991.694.000,00	968.852.020,00	97,70	1.136.043.250,00	(167.191.230,00)	(14,72)
Jumlah		44.952.027.400,00	43.912.263.060,00	97,70	41.726.476.613,00	2.185.786.447,00	5,24

7.5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2020 adalah sebesar Rp93.062.189.000,00 atau sebesar 100,00% dari yang dianggarkan. Dibanding tahun 2019 transfer pemerintah pusat lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp65.235.331.000,00 atau sebesar 234,43%. Kenaikan ini bersumber dari Dana Insentif Daerah yang diperoleh Kabupaten Natuna pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp28.129.235.000,00. Sedangkan Dana Desa yang sebelumnya masuk ke rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan pada tahun 2020 masuk ke rekening Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar

Rp64.932.954.000,00, sehingga secara struktur mengalami kenaikan dibandingkan Tahun sebelumnya. Rincian transfer pemerintah pusat lainnya tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.19 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Penyesuaian - LRA	28.129.235.000,00	28.129.235.000,00	100,00	27.826.858.000,00	302.377.000,00	1,09
2	Dana Desa - LRA	64.932.954.000,00	64.932.954.000,00	100,00	63.632.478.000,00	1.300.476.000,00	2,04
	Jumlah	93.062.189.000,00	93.062.189.000,00	97,70	91.459.336.000,00	1.602.853.000,00	1,75

7.5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2020 adalah sebesar Rp49.521.595.831,00 atau sebesar 76,99% dari yang dianggarkan sebesar Rp64.323.621.747,00. Dibanding dengan tahun 2019, Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi mengalami kenaikan sebesar Rp3.233.996.074,00 atau sebesar 6,99%. Rincian Transfer Pemerintah Provinsi merupakan transfer dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.20 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak – LRA	11.890.848.681,00	8.067.477.076,00	67,85	9.191.043.776,00	(1.123.566.700,00)	(12,22)
2	Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor	9.046.917.373,00	6.217.732.788,00	68,73	5.463.483.748,00	754.249.040,00	13,81
3	Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor	34.835.087.757,00	25.615.360.745,00	73,53	25.370.686.352,00	244.674.393,00	0,96
4	Bagi hasil dari pajak air permukaan	41.809.936,00	32.804.292,00	78,46	102.769.969,00	(69.965.677,00)	(68,08)
5	Bagi hasil dari pajak rokok	8.008.958.000,00	9.088.220.930,00	113,48	6.159.615.912,00	2.928.605.018,00	47,55
6	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LRA		0,00	500.000.000,00	100,00	0,00	500.000.000,00
	Jumlah	64.323.621.747,00	49.521.595.831,00	76,99	46.287.599.757,00	3.233.996.074,00	6,99

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2020 adalah sebesar Rp13.476.765.093,91 atau sebesar 119,77% dari yang dianggarkan Rp11.252.180.000,00. Dibanding dengan tahun 2019, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan sebesar Rp2.356.148.408,77 atau sebesar 21,19%. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan dana bantuan operasional sekolah tingkat pendidikan dasar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.21 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Dana Bantuan Operasional Sekolah	11.252.180.000,00	13.476.765.093,91	119,77	11.120.616.685,14	2.356.148.408,77	21,19
	Jumlah	11.252.180.000,00	13.476.765.093,91	119,77	11.120.616.685,14	2.356.148.408,77	21,19

7.5.1.2 Belanja

Belanja	Tahun 2020		Tahun 2019	
	(Rp)	954.314.455.585,79	(Rp)	1.111.409.674.258,30

Realisasi belanja tahun 2020 sebesar Rp954.314.455.585,79 atau 88,93% dari anggaran belanja sebesar Rp1.073.157.737.920,00. Dibanding tahun 2019 realisasi belanja mengalami penurunan sebesar Rp(157.095.218.672,51) atau sebesar (14,13)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.22 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Operasi	858.751.336.792,34	769.259.481.687,54	89,58	845.438.202.047,75	(76.178.720.360,21)	(9,01)
2	Belanja Modal	196.819.794.737,00	171.347.334.782,25	87,06	265.671.982.005,55	(94.324.647.223,30)	(35,50)
3	Belanja Tak Terduga	17.586.606.390,66	13.707.639.116,00	77,94	299.490.205,00	13.408.148.911,00	4.476,99
	Total	1.073.157.737.920,00	954.314.455.585,79	88,93	1.111.409.674.258,30	(157.095.218.672,51)	(14,13)

7.5.1.2.1 Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp769.259.481.687,54 atau sebesar 89,58% dari anggaran yang sudah ditetapkan. Dibanding dengan tahun 2019, realisasi belanja operasi mengalami penurunan sebesar Rp(76.178.720.360,21) atau sebesar 9,01%. Realisasi belanja operasi sebagai berikut:

Tabel 7.5.23 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja Pegawai	507.476.855.432,34	474.900.033.974,00	93,58	463.445.704.863,50	11.454.329.110,50	2,47
2	Belanja Barang dan Jasa	311.224.123.262,00	256.393.965.953,54	82,38	371.387.003.184,25	(114.993.037.230,71)	(30,96)
4	Belanja Hibah	36.801.258.098,00	35.219.806.760,00	95,70	3.763.000.000,00	31.456.806.760,00	835,95
5	Belanja Bantuan Sosial	3.249.100.000,00	2.745.675.000,00	84,51	6.842.494.000,00	(4.096.819.000,00)	(59,87)
Total		858.751.336.792,34	769.259.481.687,54	89,58	845.438.202.047,75	(-76.178.720.360,21)	(9,01)

Rincian masing-masing jenis belanja operasi tersebut diuraikan sebagai berikut:

7.5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sebesar Rp474.900.033.974,00 atau sebesar 93,58% dari anggaran yang sudah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp11.454.329.110,50, atau sebesar 2,47%. Rincian belanja pegawai sebagai berikut:

Tabel 7.5.24 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	196.628.552.654,34	192.825.236.809,00	98,07	165.754.931.382,00	27.070.305.427,00	16,33
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	190.199.130.553,00	170.027.458.199,00	89,39	203.297.229.416,00	(33.269.771.217,00)	(16,37)
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.026.960.000,00	6.026.500.000,00	99,99	6.075.000.000,00	(48.500.000,00)	(0,80)
4	Belanja Incentif Pemungutan Retribusi Daerah	4.377.000,00	3.382.975,00	77,29	431.327.967,50	(427.944.992,50)	(99,22)
5	Belanja Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	73.524.000,00	(73.524.000,00)	(100,00)
6	Belanja Honorarium PNS	12.299.007.383,00	10.145.863.917,00	82,49	8.492.207.676,00	1.653.656.241,00	19,47
7	Belanja Honorarium NON PNS	100.839.728.809,00	94.482.138.311,00	93,7	76.904.921.755,00	17.577.216.556,00	22,86
8	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	0,00	0,00	0,00	310.498.000,00	(310.498.000,00)	(100,00)
9	Belanja Pegawai BOS	1.479.099.033,00	1.389.453.763,00	93,94	2.106.064.667,00	(716.610.904,00)	(34,03)
Total		507.476.855.432,34	474.900.033.974,00	93,58	463.445.704.863,50	11.454.329.110,50	2,47

7.5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa tahun 2020 sebesar Rp256.393.965.953,54 atau 82,38% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp311.224.123.262,00. Dibanding dengan tahun 2019, belanja barang dan jasa mengalami penurunan sebesar Rp(114.993.037.230,71) atau sebesar 30,96%. Rincian belanja barang dan jasa sebagai berikut:

Tabel 7.5.25 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja alat tulis kantor	7.247.639.618,00	6.837.637.482,00	94,34	6.928.318.877,00	(90.681.395,00)	(1,31)
2	Belanja dokumen/administrasi tender	51.793.687,00	33.391.700,00	64,47	40.743.200,00	(7.351.500,00)	(18,04)
3	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	551.776.600,00	470.497.130,00	85,27	925.550.573,00	(455.053.443,00)	(49,17)
4	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	1.063.668.620,00	947.401.373,00	89,07	1.104.240.236,00	(156.838.863,00)	(14,20)
5	Belanja perlengatan kebersihan dan bahan pembersih	1.814.432.000,00	1.657.928.191,00	91,37	1.563.338.299,00	94.589.892,00	6,05
6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	2.991.633.500,00	1.761.265.525,00	58,87	442.240.502,00	1.319.025.023,00	298,26
7	Belanja pengisian tabung gas	8.800.000,00	7.800.000,00	88,64	8.400.000,00	(600.000,00)	(7,14)
8	Belanja spanduk	1.214.712.808,00	1.093.032.165,00	89,98	1.071.958.347,00	21.073.818,00	1,97
9	Belanja dekorasi	400.505.200,00	360.271.500,00	89,95	384.283.000,00	(24.011.500,00)	(6,25)
10	Belanja bahan baku bangunan	68.590.000,00	64.230.000,00	93,64	114.479.100,00	(50.249.100,00)	(43,89)
11	Belanja bahan/bibit tanaman	184.900.000,00	183.725.000,00	99,36	155.820.000,00	27.905.000,00	17,91
12	Belanja bibit ternak	1.530.000,00	1.500.000,00	98,04	68.000.000,00	(-66.500.000,00)	(97,79)
13	Belanja bahan obatan-obatan	6.395.338.606,00	5.128.376.425,00	80,19	7.452.855.218,00	(2.324.478.793,00)	(31,19)
14	Belanja bahan kimia	123.890.000,00	122.704.500,00	99,04	54.905.000,00	67.799.500,00	123,49
15	Belanja bahan alat-alat olahraga	33.650.000,00	26.400.000,00	78,45	1.028.984.700,00	(1.002.584.700,00)	(97,43)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
16	Belanja alat pertengkaran	11.047.646.745,00	10.474.358.232,00	94,81	10.605.870.570,30	(131.512.338,30)	(1,24)
17	Belanja material/hadiah	237.700.000,00	215.531.030,00	90,67	355.554.900,00	(140.023.870,00)	(39,38)
18	Belanja pengadaan tempat sampah	156.286.840,00	150.140.000,00	96,07	103.609.280,00	46.530.720,00	44,91
19	Belanja bahan medis pakai habis	9.529.775.000,00	4.638.628.234,00	48,68	0,00	4.638.628.234,00	100,00
20	Belanja telepon	189.060.000,00	109.903.596,00	58,13	105.471.301,00	4.432.295,00	4,20
21	Belanja air	897.236.230,00	607.607.700,00	67,72	484.101.209,00	123.506.491,00	25,51
22	Belanja listrik	5.682.393.300,00	4.930.937.716,00	86,78	4.400.870.874,00	530.066.842,00	12,04
23	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenangan lelang	10.000.000,00	9.980.000,00	99,80	0,00	9.980.000,00	100,00
24	Belanja surat kabar/majalah	819.003.000,00	697.999.001,00	85,23	1.075.645.500,00	(377.646.499,00)	(35,11)
25	Belanja kawat/faksimili/internet	3.558.628.172,00	2.826.299.644,00	79,42	2.785.648.286,00	40.651.358,00	1,46
26	Belanja paket/pengiriman	326.215.940,00	123.261.150,00	37,79	270.774.772,00	(147.513.622,00)	(54,48)
27	Belanja Sertifikasi	299.616.000,00	134.684.831,00	44,95	91.849.916,00	42.834.915,00	46,64
28	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00	4.665.000,00	(4.665.000,00)	(100,00)
29	Belanja jasa medis/laboratorium	6.497.938.400,00	5.326.366.990,00	81,97	13.946.835.634,58	(8.620.468.644,58)	(61,81)
30	Belanja jasa kebersihan	2.214.307.100,00	2.124.646.349,00	95,95	2.382.419.742,50	(257.773.393,50)	(10,82)
31	Belanja jasa kesenian	78.100.000,00	68.900.000,00	88,22	340.725.000,00	(271.825.000,00)	(79,78)
32	Belanja jasa administrasi	2.036.399.550,00	1.698.156.465,00	83,39	1.578.145.974,00	120.010.491,00	7,60
33	Belanja jasa publikasi	7.344.395.500,00	6.989.189.500,00	95,16	6.374.451.000,00	614.738.500,00	9,64
34	Belanja jasa humas	6.600.000.000,00	5.657.902.000,00	85,73	6.792.320.000,00	(1.134.418.000,00)	(16,70)
35	Belanja jasa keamanan	26.000.000,00	23.600.000,00	90,77	28.300.000,00	(4.700.000,00)	(16,61)
36	Belanja perangkat lunak (software)	65.382.000,00	24.803.290,00	37,94	26.000.000,00	(1.196.710,00)	(4,60)
37	Belanja upah	102.820.000,00	98.330.440,00	95,63	137.279.843,00	(38.949.403,00)	(28,37)
38	kalibrasi alat kesehatan/laboratorium	0,00	0,00	0,00	48.585.000,00	(48.585.000,00)	(100,00)
39	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	22.046.481.339,00	21.538.617.771,00	97,70	15.731.692.427,00	5.806.925.344,00	36,91
40	Belanja Premi Asuransi Kecelakaan Kerja	111.172.686,00	75.585.150,00	67,99	96.115.750,00	(20.530.600,00)	(21,36)
41	Belanja Premi Asuransi Kematian	281.018.870,00	95.226.177,00	33,89	119.371.808,00	(24.145.631,00)	(20,23)
42	Belanja Jasa Service	2.401.077.826,00	1.656.069.024,00	68,97	2.040.860.013,00	(384.790.989,00)	(18,85)
43	Belanja Pengantian Suku Cadang	2.723.591.725,00	2.328.029.276,00	85,48	2.511.669.400,00	(183.640.124,00)	(7,31)
44	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.498.525.100,00	3.942.468.357,00	87,64	5.767.742.663,00	(1.825.274.306,00)	(31,65)
45	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	505.509.831,00	163.632.855,00	32,37	225.988.667,00	(62.355.812,00)	(27,59)
46	Belanja cetak	4.145.715.597,00	3.552.672.031,00	85,70	5.434.529.552,00	(1.881.857.521,00)	(34,63)
47	Belanja Penggandaan	4.089.683.863,00	3.681.568.084,00	90,02	4.478.169.987,00	(796.601.903,00)	(17,79)
48	Belanja dokumentasi	324.712.997,00	266.171.800,00	81,97	390.888.800,00	(124.717.000,00)	(31,91)
49	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas	294.000.000,00	213.000.000,00	72,45	236.000.000,00	(23.000.000,00)	(9,75)
50	Belanja sewa gedung/kantor/tempat	1.250.080.000,00	1.046.142.600,00	83,69	1.221.206.700,00	(175.064.100,00)	(14,34)
51	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan	451.010.000,00	276.326.600,00	61,27	291.660.000,00	(15.333.400,00)	(5,26)
52	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat	911.315.000,00	588.989.760,00	64,63	1.099.101.200,00	(510.111.440,00)	(46,41)
53	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air	1.853.789.000,00	1.198.429.950,00	64,65	1.737.229.850,00	(538.799.900,00)	(31,01)
54	Belanja sewa meja kursi	15.000.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00	(6.970.000,00)	(100,00)
55	Belanja sewa generator	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	3.400.000,00	(400.000,00)	(11,76)
56	Belanja sewa tenda	25.000.000,00	0,00	0,00	77.900.000,00	(77.900.000,00)	(100,00)
57	Belanja sewa peralatan sound sistem	188.600.000,00	101.840.000,00	54,00	167.540.000,00	(65.700.000,00)	(39,21)
58	Belanja sewa peralatan survey	0,00	0,00	0,00	11.240.000,00	(11.240.000,00)	(100,00)
59	Belanja sewa alat selam	128.000.000,00	111.842.500,00	87,38	0,00	111.842.500,00	100,00
60	Belanja makanan dan minuman harian pegawai	2.032.188.000,00	1.746.853.598,00	85,96	4.560.920.660,00	(2.814.067.062,00)	(61,70)
61	Belanja makanan dan minuman rapat	5.939.034.600,00	4.574.816.300,00	77,03	3.673.961.700,00	900.854.600,00	24,52
62	Belanja makanan dan minuman tamu	2.478.491.400,00	2.182.604.600,00	88,06	2.631.663.800,00	(449.059.200,00)	(17,06)
63	Belanja makanan dan minuman kegiatan	11.680.707.350,00	9.515.615.050,00	81,46	17.471.959.040,00	(7.956.343.990,00)	(45,54)
64	Belanja makanan dan minuman pelajar/siswa	0,00	0,00	0,00	608.760.000,00	(608.760.000,00)	(100,00)
65	Belanja makanan dan minuman pasien	416.300.000,00	389.803.030,00	93,64	411.989.450,00	(22.186.420,00)	(5,39)
66	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	0,00	0,00	11.250.000,00	(11.250.000,00)	(100,00)
67	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	113.870.000,00	106.320.000,00	93,37	107.954.000,00	(1.634.000,00)	(1,51)
68	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	25.800.000,00	25.800.000,00	100,00	194.786.000,00	(168.986.000,00)	(86,75)
69	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	138.168.000,00	134.315.500,00	97,21	275.375.000,00	(141.059.500,00)	(51,22)
70	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	76.450.000,00	56.450.000,00	73,84	159.581.500,00	(103.131.500,00)	(64,63)
71	Belanja pakaian sipil (PSR)	50.000.000,00	49.720.000,00	99,44	45.100.000,00	4.620.000,00	10,24
72	Belanja pakaian dinas lengkap (PDL)	0,00	0,00	0,00	217.010.380,00	-217.010.380,00	(100,00)
73	Belanja atribut	29.815.000,00	23.308.000,00	78,18	467.665.970,00	-444.357.970,00	(95,02)
74	Belanja pakaian kerja lapangan	598.200.000,00	504.593.852,00	84,35	261.173.640,00	243.420.212,00	93,20

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
75	Belanja pakaian dinas non PNS	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	(10.500.000,00)	(100,00)
76	Belanja sepatu lapangan	16.330.000,00	16.300.000,00	99,82	207.238.460,00	(190.938.460,00)	(92,13)
77	Belanja pakaian adat daerah	381.400.000,00	372.336.700,00	97,62	194.272.975,00	178.063.725,00	91,66
78	Belanja pakaian batik tradisional	11.200.000,00	10.900.000,00	97,32	46.000.000,00	(35.100.000,00)	(76,30)
79	Belanja pakaian olahraga	380.250.000,00	335.776.800,00	88,30	680.710.330,00	(344.933.530,00)	(50,67)
80	Belanja pakaian muslim	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	12.600.000,00	67.400.000,00	534,92
81	Belanja pakaian seragam	249.750.000,00	249.416.000,00	99,87	194.479.900,00	54.936.100,00	28,25
82	Belanja pakaian kegiatan	63.750.000,00	63.500.000,00	99,61	51.337.500,00	12.162.500,00	23,69
83	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	59.236.086.257,00	48.436.818.489,00	81,77	54.784.852.250,00	(6.348.033.761,00)	(11,59)
84	Belanja perjalanan dinas luar daerah	39.264.138.925,00	28.759.460.659,50	73,25	73.335.286.804,00	(44.575.826.144,50)	(60,78)
85	Belanja perjalanan dinas luar negeri	0,00	0,00	0,00	435.556.231,00	(435.556.231,00)	(100,00)
86	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.363.384.516,00	2.346.340.650,00	69,76	3.508.354.076,00	(1.162.013.426,00)	(33,12)
87	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	12.175.342.284,00	11.538.149.811,46	94,77	14.714.224.209,08	(3.176.074.397,62)	(21,59)
88	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.158.866.800,00	2.522.874.632,00	79,87	4.007.220.345,00	(1.484.345.713,00)	(37,04)
89	Belanja pemeliharaan sistem komputernisasi (software)	8.000.000,00	0,00	0,00	81.070.000,00	(81.070.000,00)	(100,00)
90	Belanja pemeliharaan lahan	100.000.000,00	83.212.671,00	83,21	188.767.402,00	(105.554.731,00)	(55,92)
91	Belanja pemeliharaan perlengkapan	485.427.000,00	430.062.616,64	88,59	795.351.947,73	(365.289.331,09)	(45,93)
92	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	1.385.000.000,00	660.631.000,00	47,70	1.120.502.500,00	(459.871.500,00)	(41,04)
93	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	2.613.000.000,00	1.209.296.275,00	46,28	14.255.779.985,00	(13.046.483.710,00)	(91,52)
94	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan	297.121.500,00	256.256.000,00	86,25	8.570.852.970,00	(8.314.596.970,00)	(97,01)
95	Belanja jasa konsultasi IT	0,00	0,00	0,00	79.442.000,00	(79.442.000,00)	(100,00)
96	Belanja jasa konsultan penilai	0,00	0,00	0,00	213.847.700,00	(213.847.700,00)	(100,00)
97	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	10.130.877.920,00	9.269.455.534,00	91,50	10.424.608.870,00	(1.155.153.336,00)	(11,08)
98	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	7.889.571.000,00	6.010.607.504,00	76,18	10.755.781.871,00	(4.745.174.367,00)	(44,12)
99	Belanja beasiswa tugas belajar D3	0,00	0,00	0,00	160.000.000,00	(160.000.000,00)	(100,00)
100	Belanja beasiswa tugas belajar S1	144.000.000,00	144.000.000,00	100,00	180.000.000,00	(36.000.000,00)	(20,00)
101	Belanja beasiswa tugas belajar S2	156.000.000,00	156.000.000,00	100,00	250.000.000,00	(94.000.000,00)	(37,60)
102	Belanja beasiswa tugas belajar spesialis	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00	135.000.000,00	0,00	0,00
103	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	369.750.000,00	342.512.000,00	92,63	2.426.397.352,00	(2.083.885.352,00)	(85,88)
104	Belanja kontribusi bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lokakarya	101.775.000,00	44.575.000,00	43,80	371.895.747,00	(327.320.747,00)	(88,01)
105	Belanja penelitian dan studi	210.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Belanja kontribusi diklat struktural	136.000.000,00	126.897.000,00	93,31	162.158.000,00	(35.261.000,00)	(21,74)
107	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur	4.701.843.808,00	3.978.935.000,00	84,62	12.972.127.000,00	(8.993.192.000,00)	(69,33)
108	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	8.500.000,00	(8.500.000,00)	(100,00)
109	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	3.530.500.000,00	3.468.450.000,00	98,24	413.500.000,00	3.054.950.000,00	738,80
110	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber ber	3.332.062.485,00	2.859.742.000,00	85,82	3.674.610.000,00	(814.868.000,00)	(22,18)
111	Belanja Barang dan Jasa BOSS - LRA	7.410.123.167,00	6.700.285.586,94	90,42	5.885.007.948,06	815.277.638,88	13,85
112	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan	7.000.000,00	7.000.000,00	100,00	13.500.000,00	(6.500.000,00)	(48,15)
113	Belanja kontribusi bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lokakarya	2.500.000,00	1.975.000,00	79,00	34.000.000,00	(32.025.000,00)	(94,19)
Total		311.224.123.262,00	256.393.965.953,54	82,38	371.387.003.184,25	(114.993.037.230,71)	30,96

Pemerintah Kabupaten Natuna belum menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 atas konversi belanja barang dan jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat dan pihak ketiga menjadi belanja hibah dengan total anggaran sebesar Rp18.020.448.920,00 dan realisasi sebesar Rp15.280.063.038,00.

7.5.1.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah tahun 2020 terealisasi sebesar Rp35.219.806.760,00 atau sebesar 95,70%. Dibanding dengan tahun 2019 belanja hibah naik sebesar

Rp31.456.806.760,00 atau sebesar 835,95 %. Rincian belanja hibah disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.5.26 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah	28.627.901.000,00	28.038.970.000,00	97,94	820.000.000,00	27.218.970.000,00	3.319,39
2	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	5.722.500.000,00	5.125.000.000,00	89,56	1.237.500.000,00	3.887.500.000,00	314,14
3	Belanja Hibah Dana BOP PAUD	1.757.440.000,00	1.584.000.000,00	90,13	1.705.500.000,00	(121.500.000,00)	(7,12)
4	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	693.417.098,00	471.836.760,00	68,05	0,00	471.836.760,00	100
	TOTAL	36.801.258.098,00	35.219.806.760,00	95,70	3.763.000.000,00	31.456.806.760,00	835,95

Jika dibandingkan dengan tahun 2019, belanja hibah kepada pemerintah tahun 2020 terdapat realisasi sebesar Rp28.038.970.000,00 atau sebesar 97,94%. Kenaikan belanja hibah disebabkan oleh adanya pelaksanaan Pilkada sehingga pengalokasian untuk kegiatan tersebut mengalami kenaikan. Hibah dialokasikan untuk KPU, Bawaslu, Polres Natuna dan Kodim 0318. Di samping itu digunakan juga untuk kegiatan penanggulangan Covid-19.

Sedangkan belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan terealisasi sebesar Rp 5.125.000.000,00 atau sebesar 89,56% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp 5.722.500.000,00, belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan terdiri dari:

Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Keagamaan	4.650.000.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Bidang Sosial Kemasyarakatan	250.000.000,00
Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang pendidikan dan penelitian	225.000.000,00
JUMLAH	5.125.000.000,00

Belanja hibah BOP PAUD pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp1.584.000.000,00 atau sebesar 90,13% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.757.440.000,00. Belanja hibah BOP PAUD merupakan hibah yang diperuntukkan untuk sekolah yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2020.

Kemudian belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp471.836.760,00 atau sebesar 68,05% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp693.417.098,00. Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi merupakan hibah yang diperuntukkan kepada Partai Politik.

7.5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial tahun 2020 sebesar Rp 2.745.675.000,00 atau sebesar 84,51% dari anggaran yang ditetapkan. Dibanding dengan tahun 2019, bantuan sosial mengalami penurunan sebesar Rp(4.096.819.000,00) atau (59,87)% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.27 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	2.749.100.000,00	2.415.675.000,00	87,87	6.422.500.000,00	(4.006.825.000,00)	(62,39)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	500.000.000,00	330.000.000,00	66	419.994.000,00	(89.994.000,00)	(21,43)
	TOTAL	3.249.100.000,00	2.745.675.000,00	84,51	6.842.494.000,00	(4.096.819.000,00)	(59,87)

Realisasi belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan sebesar Rp 2.415.675.000,00 merupakan belanja bantuan sosial untuk kelompok masyarakat yang bersumber dari DAK bidang perumahan dan permukiman tahun anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.28 Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk perlindungan sosial	2.749.100.000,00	2.415.675.000,00	87,87	0,00	2.415.675.000,00	100,00
2	Belanja bantuan sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan untuk penanggulangan kemiskinan	0,00	0,00	0,00	6.422.500.000,00	(6.422.500.000,00)	(100,00)
	JUMLAH	2.749.100.000,00	2.415.675.000,00	87,87	6.422.500.000,00	(4.006.825.000,00)	(62,39)

Realisasi belanja bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat sebesar Rp330.000.000,00 yang merupakan Belanja bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat untuk jaminan sosial, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.29 Rincian Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat untuk jaminan sosial	500.000.000,00	330.000.000,00	66,00	419.994.000,00	(89.994.000,00)	(21,43)
	JUMLAH	500.000.000,00	330.000.000,00	66,00	419.994.000,00	(89.994.000,00)	(21,43)

7.5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi belanja modal tahun 2020 sebesar Rp171.347.334.782,25 atau sebesar 87,06% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp196.819.794.737,00. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi belanja modal tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar Rp(94.324.647.223,30) atau sebesar (35,50)% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.30 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja Modal Tanah	8.065.728.398,00	7.081.073.899,00	87,79	1.984.075.000,00	5.096.998.899,00	256,90
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.835.342.923,00	27.049.557.263,00	79,94	27.115.901.154,00	(66.343.891,00)	(0,24)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	84.343.715.066,00	78.647.132.575,66	93,25	79.044.504.071,61	(397.371.495,95)	(0,50)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.744.308.550,00	52.918.743.156,59	78,12	154.248.747.663,99	(101.330.004.507,40)	(65,69)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.830.699.800,00	5.650.827.888,00	199,63	3.278.754.115,95	2.372.073.772,05	72,35
	JUMLAH	196.819.794.737,00	171.347.334.782,25	87,06	265.671.982.005,55	(94.324.647.223,30)	(35,50)

7.5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Belanja modal pengadaan tanah tahun 2020 sebesar Rp7.081.073.899,00 atau sebesar 87,79 % dari anggaran yang ditetapkan. Dibanding dengan tahun 2019 belanja modal tanah mengalami kenaikan sebesar Rp5.096.998.899,00 atau sebesar 256,90% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.31 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan	120.000.000,00	80.000.000,00	66,67	0,00	80.000.000,00	100
2	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	797.500.000,00	740.222.200,00	92,82	1.950.000.000,00	1.209.777.800,00	(62,04)
3	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	7.148.228.398,00	6.260.851.699,00	87,59	34.075.000,00	6.226.776.699,00	18.273,74
	TOTAL	8.065.728.398,00	7.081.073.899,00	87,79	1.984.075.000,00	5.096.998.899,00	256,9

Belanja modal tanah untuk bangunan gedung berasal dari belanja modal pengadaan tanah untuk tanah kuburan sebesar Rp80.000.000,00. Belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa sebesar Rp740.222.200,00, sedangkan belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan bukan gedung sebesar Rp6.260.851.699,00.

7.5.1.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2020 sebesar Rp27.049.557.263,00 atau sebesar 79,94% dari anggaran yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, belanja modal peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar Rp(66.343.891,00) atau sebesar (0,24)% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.32 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja modal pengadaan mesin pengolah air bersih (reservoir osmosis)	0,00	0,00	0,00	198.000.000,00	(198.000.000,00)	(100,00)
2	Belanja modal Pengadaan Compressor	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set	252.000.000,00	225.555.000,00	89,51	232.067.000,00	(6.512.000,00)	(2,81)
4	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor	5.000.000,00	4.650.000,00	93	1.788.000,00	2.862.000,00	160,07
5	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang	600.000.000,00	596.970.000,00	99,5	927.200.000,00	(330.230.000,00)	(35,62)
6	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	211.000.000,00	211.000.000,00	100	0,00	211.000.000,00	100,00
7	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus	1.700.000.000,00	199.540.000,00	11,74	98.560.000,00	100.980.000,00	102,46
8	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	619.400.000,00	562.403.000,00	90,8	1.134.562.300,00	(572.159.300,00)	(50,43)
9	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang	663.385.000,00	63.360.000,00	9,55	0,00	63.360.000,00	100,00
10	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang	2.615.002.051,00	2.375.937.960,00	90,86	0,00	2.375.937.960,00	100,00
11	Belanja modal Pengadaan Perakas Bengkel Kerja	93.500.000,00	81.760.800,00	87,44	151.587.000,00	(69.826.200,00)	(46,06)
12	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal	463.369.000,00	9.200.000,00	1,99	475.300.000,00	(466.100.000,00)	(98,06)
13	Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan	96.500.000,00	91.658.000,00	94,98	42.576.000,00	49.082.000,00	115,28
14	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan	1.000.000,00	1.000.000,00	100	30.644.845,00	(29.644.845,00)	(96,74)
15	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan	2.500.000,00	1.800.000,00	72	0,00	1.800.000,00	100,00
16	Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas	76.152.000,00	69.936.000,00	91,84	45.151.100,00	24.784.900,00	54,89
17	Belanja modal pengadaan papan visual elektronik	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	(1.200.000,00)	(100,00)
18	Belanja modal pengadaan tabung pemadam kebakaran	36.550.000,00	18.398.800,00	50,34	91.940.000,00	(73.541.200,00)	(79,99)
19	Belanja modal pengadaan alat pendingin ruangan	1.004.404.000,00	948.841.041,00	94,47	857.870.400,00	90.970.641,00	10,60
20	Belanja modal pengadaan mesin absensi	0,00	0,00	0,00	71.590.000,00	(71.590.000,00)	(100,00)
21	Belanja modal pengadaan peralatan audio visual	109.000.000,00	91.632.900,00	84,07	0,00	91.632.900,00	100,00
22	Belanja modal pengadaan penghisap debu	27.100.000,00	20.389.000,00	75,24	3.828.000,00	16.561.000,00	432,63
23	Belanja modal pengadaan papan piang kantor	30.500.000,00	13.195.455,00	43,26	28.900.000,00	(15.704.545,00)	(54,34)
24	Belanja modal pengadaan mesin laminating	0,00	0,00	0,00	48.272.000,00	(48.272.000,00)	(100,00)
25	Belanja modal pengadaan kipas angin	39.000.000,00	36.082.726,00	92,52	123.905.000,00	(87.822.274,00)	(70,88)
26	Belanja modal pengadaan TV	191.660.000,00	182.075.636,00	95	176.089.000,00	5.986.636,00	3,40
27	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya	705.900.000,00	651.102.145,00	92,24	857.218.900,00	(206.116.755,00)	(24,04)
28	Belanja modal mesin akses kontrol pintu	45.000.000,00	45.000.000,00	100	0,00	45.000.000,00	100,00
29	Belanja modal pengadaan alat anti petir	0,00	0,00	0,00	197.945.000,00	(197.945.000,00)	(100,00)
30	Belanja modal Pengadaan Meubelair	2.323.887.500,00	2.195.363.329,00	94,47	4.408.880.593,00	(2.213.517.264,00)	(50,21)
31	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur	153.522.000,00	131.084.318,00	85,38	433.475.047,00	(302.390.729,00)	(69,76)
32	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.681.072.400,00	1.268.537.663,00	75,46	2.847.620.618,00	(1.579.082.955,00)	(55,45)
33	Belanja Modal Pengadaan Tangki Air	3.000.000,00	2.850.000,00	95	9.000.000,00	(6.150.000,00)	(68,33)
34	Belanja Modal Tempat Cuci Tangan	88.000.000,00	79.700.000,00	90,57	0,00	79.700.000,00	100,00
35	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	153.846.000,00	72.843.600,00	47,35	2.497.357.700,00	(2.424.514.100,00)	(97,08)
36	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe	33.000.000,00	33.000.000,00	100	420.420.300,00	(387.420.300,00)	(92,15)
37	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	958.044.000,00	899.160.559,00	93,85	849.408.661,00	49.751.898,00	5,86
38	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	5.812.853.324,00	5.391.163.265,00	92,75	4.012.091.318,00	1.379.071.947,00	34,37
39	Belanja modal pengadaan software/aplikasi komputer	328.500.000,00	213.740.000,00	65,07	35.905.000,00	177.835.000,00	495,29
40	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat	603.884.885,00	564.387.285,00	93,46	491.891.500,00	72.495.785,00	14,74
41	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual	1.542.479.000,00	1.110.081.846,00	71,97	1.161.704.742,00	(51.623.096,00)	(4,44)
42	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone	26.100.000,00	26.092.000,00	99,97	0,00	26.092.000,00	100,00
43	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM	47.823.000,00	45.333.000,00	94,79	62.475.000,00	(17.142.000,00)	(27,44)
44	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	(12.000.000,00)	(100,00)
45	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum	9.353.266.535,00	7.486.536.651,00	80,04	2.001.045.528,00	5.485.491.123,00	274,13
46	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi	13.706.560,00	1.532.727,00	11,18	393.907.609,00	(392.374.882,00)	(99,61)
47	Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi Bedah	0,00	0,00	0,00	11.265.000,00	(11.265.000,00)	(100,00)
48	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah	984.418.768,00	903.943.157,00	91,83	0,00	903.943.157,00	100,00
49	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00	859.357.543,00	(859.357.543,00)	(100,00)
50	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika	45.816.900,00	42.819.600,00	93,46	0,00	42.819.600,00	100,00
51	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja	84.200.000,00	79.900.000,00	94,89	392.652.816,00	(312.752.816,00)	(79,65)
52	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya	0,00	0,00	0,00	79.192.872,00	(79.192.872,00)	(100,00)
53	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	340.054.762,00	(340.054.762,00)	(100,00)
54	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Total	33.835.342.923,00	27.049.557.263,00	79,94	27.115.901.154,00	(66.343.891,00)	(0,24)

7.5.1.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja gedung dan bangunan tahun 2020 sebesar Rp78.647.132.575,66 atau 93,25% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp84.343.715.066,00. Jika dibanding dengan tahun 2019, belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar Rp(397.371.495,95) atau sebesar (0,50%). Realisasi belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.33 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	37.251.273.277,00	35.570.846.397,77	95,49	16.841.200.746,31	18.729.645.651,46	111,21
2	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung , Kerja Lainnya	43.498.503.614,00	39.609.411.887,72	91,06	46.918.716.348,77	(7.309.304.461,05)	(15,58)
3	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	2.167.007.216,00	2.123.819.945,02	98,01	14.576.571.072,00	(12.452.751.126,98)	(85,43)
4	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas	0,00	0,00	0,00	26.458.200,00	(26.458.200,00)	(100,00)
5	Belanja Modal Bangunan Penerangan jalan	867.830.000,00	814.599.001,00	93,87	0,00	814.599.001,00	100,00
6	Belanja modal Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas Darat lainnya	559.100.959,00	528.455.344,15	94,52	307.086.904,53	221.368.439,62	72,09
8	Belanja modal Pengadaan Flood Light	0,00	0,00	0,00	374.470.800,00	(374.470.800,00)	(100,00)
	TOTAL	84.343.715.066,00	78.647.132.575,66	93,25	79.044.504.071,61	(397.371.495,95)	(0,50)

7.5.1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Anggaran belanja jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp67.744.308.550,00 dengan realisasi sebesar Rp52.918.743.156,59 atau sebesar 78,12% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibanding dengan tahun 2019, realisasi belanja jalan, irigasi dan jaringan mengalami penurunan sebesar Rp(101.330.004.507,40) atau sebesar (65,69%) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.34 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi	12.361.285.188,00	10.287.232.757,00	83,22	59.149.127.208,82	(48.861.894.451,82)	(82,61)
2	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	25.972.918.012,00	21.798.460.776,00	83,93	52.113.069.233,51	(30.314.608.457,51)	(58,17)
3	Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan	3.496.876.100,00	502.375.500,00	14,37	2.911.090.770,00	(2.408.715.270,00)	(82,74)
4	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi	0,00	0,00	0,00	2.041.366.137,38	(2.041.366.137,38)	(100,00)
5	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman	21.233.481.250,00	16.030.283.786,00	75,5	21.333.463.937,00	(5.303.180.151,00)	(24,86)
6	Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku	3.094.668.000,00	2.865.322.195,00	92,59	6.958.547.355,00	(4.093.225.160,00)	(58,82)
7	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut	1.297.558.000,00	1.159.145.940,59	89,33	9.645.702.611,28	(8.486.556.670,69)	(87,98)
8	Belanja modal pengadaan instalasi listrik dan telepon	287.522.000,00	275.922.202,00	95,97	96.380.411,00	179.541.791,00	186,28
	TOTAL	67.744.308.550,00	52.918.743.156,59	78,12	154.248.747.663,99	(101.330.004.507,40)	(65,69)

7.5.1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Anggaran belanja aset tetap lainnya tahun 2020 sebesar Rp2.830.699.800,00 dengan realisasi sebesar Rp5.650.827.888,00 atau sebesar 199,63%. Realisasi belanja modal aset tetap lainnya terjadi pelampauan dari anggaran yang ada disebabkan penggunaan realisasi Dana BOS melebihi pagu yang ditetapkan. Jika dibanding dengan tahun 2019, belanja aset tetap lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp2.372.073.772,05 atau sebesar 72,35% yang terdiri dari:

Tabel 7.5.35 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Belanja modal Pengadaan Buku-buku Perpustakaan	175.632.000,00	25.632.000,00	14,59	204.260.500,00	(178.628.500,00)	(87,45)
2	Belanja modal Pengadaan Musik	280.000.000,00	279.922.500,00	99,97	176.286.000,00	103.636.500,00	58,79
3	Belanja modal Pengadaan Lukisan	0,00	0,00	0,00	13.992.000,00	(13.992.000,00)	(100,00)
4	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian	12.110.000,00	11.800.000,00	97,44	10.900.000,00	900.000,00	8,26
5	Belanja modal Pengadaan Tanaman Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.310.000,00	(2.310.000,00)	(100,00)
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dana BOS	2.362.957.800,00	5.333.473.388,00	225,7	2.871.005.615,95	2.462.467.772,05	85,77
	TOTAL	2.830.699.800,00	5.650.827.888,00	199,6	3.278.754.115,95	2.372.073.772,05	72,35

7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2020, realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp13.707.639.116,00 atau sebesar 77,94% dari yang dianggarkan sebesar Rp17.586.606.390,66. Penggunaan belanja tidak terduga digunakan untuk:

- Penanganan Bidang Kesehatan Covid-19 sebesar Rp13.435.238.643,00;
- Penanganan jaminan sosial biaya penyaluran bantuan langsung tunai sebesar Rp41.650.000,00;
- Dana tanggap darurat perbaikan putus jembatan di Kecamatan Pulau Tiga sebesar Rp230.750.473,00.

7.5.1.2 Transfer

Transfer	Tahun 2020		Tahun 2019	
	(Rp)	115.149.587.550,00	(Rp)	150.045.731.563,00

Realisasi transfer Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2020 sebesar Rp115.149.587.550,00 yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.36 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	(dalam rupiah)	
					Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan
1	Transfer Bagi Hasil Pendapatan	754.982.000,00	603.662.400,00	79,96	1.365.107.000,00	(761.444.600,00) (55,78)
2	Transfer Bantuan Keuangan	137.136.466.000,00	114.545.925.150,00	83,53	148.680.624.563,00	(34.134.699.413,00) (22,96)
	Jumlah	137.891.448.000,00	115.149.587.550,00	83,51	150.045.731.563,00	(34.896.144.013,00) (23,26)

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Realisasi transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp603.662.400,00 atau sebesar 79,96% yang terdiri dari rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.37 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	(dalam rupiah)	
					Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	704.372.000,00	578.546.400,00	82,14	1.314.875.000,00	(736.328.600,00) (56,00)
2	Transfer Bagi Hasil Retribusi	50.610.000,00	25.116.000,00	49,63	50.232.000,00	(25.116.000,00) (50,00)
	JUMLAH	754.982.000,00	603.662.400,00	79,96	1.365.107.000,00	(761.444.600,00) (55,78)

b. Transfer Bantuan Keuangan

Realisasi transfer bantuan keuangan sebesar Rp114.545.925.150,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.38 Rincian Anggaran dan Realisasi Transfer Bantuan Keuangan

No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	(dalam rupiah)	
					Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan
1	Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	0,00	0,00	0,00	480.000.000,00	(480.000.000,00) (100,00)
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	137.136.466.000,00	114.545.925.150,00	83,53	147.738.497.628,00	(33.192.572.478,00) (22,47)
3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	462.126.935,00	(462.126.935,00) (100,00)
	Jumlah	137.136.466.000,00	114.545.925.150,00	83,53	148.680.624.563,00	(34.134.699.413,00) (22,96)

Transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp114.545.925.150,00 terdiri dari:

- Transfer Alokasi Dana Desa yang merupakan 10% dari Bantuan Dana Perimbangan selain DAK sebesar Rp49.612.971.150,00;
- Transfer dana desa sebesar Rp64.932.954.000,00.

7.5.1.3 Surplus/Defisit LRA

Surplus/Defisit LRA	Tahun 2020		Tahun 2019	
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	(143.046.039.864,83)		89.508.235.353,37	

Surplus/defisit laporan realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp(143.046.039.864,83) dengan perhitungan:

Tabel 7.5.39 Surplus/Defisit LRA

<i>(dalam rupiah)</i>							
No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Pendapatan	1.052.403.143.059,41	926.421.008.386,66	88,03	1.350.963.641.174,67	(424.542.632.788,01)	(31,43)
2	Belanja	1.073.157.737.920,00	954.314.455.585,79	88,93	1.111.409.674.258,30	(157.095.218.672,51)	(14,13)
3	Transfer	137.891.448.000,00	115.149.587.550,00	83,51	150.045.731.563,00	(34.896.144.013,00)	(23,26)
	Surplus (Defisit)	(158.646.042.860,59)	(143.046.039.864,83)	90,17	89.508.235.353,37	(232.554.275.218,2)	(259,81)

7.5.1.4 Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp159.072.530.236,66 atau dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp158.646.042.860,59 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.40 Penggunaan SiLPA

<i>(dalam rupiah)</i>							
No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Penggunaan SiLPA	153.479.191.317,36	153.479.191.317,36	100,00	68.970.955.963,99	84.508.235.353,37	122,53
2	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.166.851.543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	5.593.338.919,30	100,00	0,00	5.593.338.919,30	0,00
	TOTAL	158.646.042.860,59	159.072.530.236,66	100,00	68.970.955.963,99	90.101.574.272,67	130,64

b. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.41 Penyertaan Modal

<i>(dalam rupiah)</i>							
No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/Penurunan	%
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100)
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	5.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)	(100)

7.5.1.5 Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran

SiLPA	Tahun 2020		Tahun 2019	
	(Rp)		(Rp)	
	16.026.490.371,83		153.479.191.317,36	

Sisa lebih pembiayaan anggaran Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp16.026.490.371,83 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.42 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

<i>(dalam rupiah)</i>						
No	Uraian	Anggaran TA 2020	Realisasi TA 2020	%	Realisasi TA 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pendapatan	1.052.403.143.059,41	926.418.003.270,96	88,03	1.350.963.641.174,67	(424.542.632.788,01)
2	Belanja	1.073.157.737.920,00	954.314.455.585,79	88,93	1.111.409.674.258,30	(157.095.218.672,51)
3	Transfer	137.891.448.000,00	115.149.587.550,00	83,51	150.045.731.563,00	(34.896.144.013,00)
4	Surplus (Defisit)	(158.646.042.860,59)	(143.046.039.864,83)	90,17	89.508.235.353,37	(232.554.275.218,20)
5	Pembayaran Netto	158.646.042.860,59	159.072.530.236,66	100,27	63.970.955.963,99	95.101.574.272,67
	SILPA	0,00	16.026.490.371,83	100,00	153.479.191.317,36	(137.452.700.945,53)
						(89,56)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2020 sebesar Rp16.026.490.371,83 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.43 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

<i>(dalam rupiah)</i>		
	Uraian	Jumlah Kas
	Kas di Kas Daerah	3.827.161.966,48
	Kas di BLUD	11.351.691.748,96
	Kas di Bendahara Penerimaan	30.000,00
	Kas Lainnya	847.606.656,39
	SILPA	16.026.490.371,83

7.5.2 LAPORAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat terjadi keadaan yang menyebabkan adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA). Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akumulasi SiLPA atau SiKPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.

Adapun rincian perhitungan perubahan SAL tahun 2020 adalah sebagai berikut:

7.5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
		153.479.191.317,36	68.970.955.963,99

Nilai SAL awal sebesar Rp153.479.191.317,36 merupakan saldo anggaran lebih akhir tahun 2019. Saldo tersebut adalah penerimaan pembiayaan tahun berjalan, yang digunakan untuk menutup anggaran defisit tahun 2020.

7.5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
		153.479.191.317,36	68.970.955.963,99

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2020 adalah seluruh SAL akhir tahun 2019. SAL tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun 2020 adalah sebesar Rp153.479.191.317,36.

7.5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
		16.026.490.371,83	153.479.191.317,36

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih antara realisasi pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Berdasarkan perhitungan dalam laporan realisasi anggaran. Nilai SiLPA pada akhir tahun 2020 adalah sebesar Rp16.026.490.371,83.

7.5.2.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
		0,00	0,00

Untuk tahun 2020 tidak ada koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya atau koreksi kesalahan tahun sebelumnya adalah Rp0,00.

7.5.2.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Tahun 2020	Tahun 2019
		(Rp)	(Rp)
		16.026.490.371,83	153.479.191.317,36

SAL akhir merupakan akumulasi SiLPA tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan nilai akumulatif SAL akhir pada tahun 2020 adalah sebesar Rp16.026.490.371,83.

7.5.3 NERACA

7.5.3.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	102.211.499.085,66	281.417.666.181,39

Aset lancar Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp102.211.499.085,66 terdiri dari kas, piutang, penyisihan piutang, persediaan dan beban dibayar di muka, dengan penjelasan sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas dan Bank	16.161.177.103,83	158.987.801.147,66
Piutang	34.627.464.828,32	72.154.417.522,60
Penyisihan Piutang	(7.955.201.764,59)	(5.917.201.454,04)
Beban Dibayar di Muka	274.808.333,33	312.458.333,33
Persediaan	59.103.250.584,77	55.880.190.631,84
Jumlah	102.211.499.085,66	281.417.666.181,39

7.5.3.1.1 Kas dan Bank

Kas dan Bank	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	16.161.177.103,83	158.987.801.147,66

Nilai saldo kas dan bank per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.161.177.103,83 merupakan saldo di Kas Daerah ditambah dengan Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Kas Lainnya yang merupakan saldo kas Dana BOS, dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kas di Kas Daerah	3.827.161.966,48	142.106.274.449,31
Kas di Bendahara Penerimaan	30.000,00	610.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	11.351.691.748,96	10.578.252.567,63
Kas Lainnya	982.293.388,39	6.302.664.130,72
Jumlah	16.161.177.103,83	158.987.801.147,66

Kas dan Bank per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.161.177.103,83 terdiri dari:

- a. Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.827.161.966,48 terdiri dari:

Tabel 7.5.44 Rincian Kas di Kas Daerah

No	Uraian	(dalam rupiah)	
		Saldo per 31 Desember 2020	
A.	BANK RIAU KEPRI KCP RANAI NATUNA		
1	Rekening Kas Umum Daerah (No. Rek. 117-02-00010)	1.304.637.740,70	
2	Rekening Penerimaan Daerah (No. Rek. 117-02-22222)	44.941.355,00	
3	Rekening Pengeluaran Daerah (No. Rek. 11-70-23333-3)	0,00	
B.	BANK MANDIRI KCP NATUNA		
1	Rekening Pengeluaran Daerah (No. Rek. 109-00-4448889-8)	11.140.251,78	
C.	KAS DANA KAPITASI JKN		
1	Kas Puskesmas Ranai	765.037.636,00	
2	Kas Puskesmas Tanjung	66.197.419,00	
3	Kas Puskesmas Bunguran Selatan	37.137.078,00	

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2020
4	Kas Puskesmas Bunguran Tengah	183.312.748,00
5	Kas Puskesmas Serasan	97.686.613,00
6	Kas Puskesmas Batubi Jaya	79.699.225,00
7	Kas Puskesmas Serasan Timur	56.314.047,00
8	Kas Puskesmas Pulau Tiga	374.190.514,00
9	Kas Puskesmas Kelarik	137.804.926,00
10	Kas Puskesmas Sedanau	300.554.037,00
11	Kas Puskesmas Midai	196.341.818,00
12	Kas Puskesmas Subi	60.154.536,00
13	Kas Puskesmas Pulau Laut	112.012.022,00
Jumlah Kas di Kas Daerah		3.827.161.966,48

- b. Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp30.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- c. Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.
- d. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.351.691.748,96 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.45 Rincian Kas di BLUD

Uraian	Jumlah	(dalam rupiah)
Kas di Rekening Bank Riau (No.Rek. 11-70-20213-9)	10.636.560.065,58	
Kas di Rekening Bank Mandiri (No.Rek. 109-00-1378157-0)	715.131.683,38	
Jumlah Kas di BLUD RSUD Natuna	11.351.691.748,96	

Saldo kas di BLUD merupakan saldo yang berada di rekening bank. Untuk saldo kas di bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan adalah Rp0,00.

- e. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	982.293.388,39	6.302.664.130,72

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp982.293.388,39 merupakan saldo dana BOS pada Dinas Pendidikan tahun 2020 sebesar Rp847.606.656,39, utang pajak daerah yang belum disetor ke kas daerah oleh bendahara BOS sebesar Rp12.622.135,00 dan saldo kas Dana Bergulir sebesar Rp122.064.597,00.

Saldo Dana BOS diakui dan dicatat oleh Dinas Dinas Pendidikan pada saat terbitnya Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah atas Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) yang diajukan. Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) disusun oleh Dinas Pendidikan berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan yang disampaikan oleh Sekolah.

Perhitungan kas Dana BOS tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 7.5.46 Perhitungan Posisi Kas Dana BOS Pada Dinas Pendidikan

No	Uraian	Saldo 31 Desember 2019	Pendapatan 2020	Belanja 2020	Saldo 31 Desember 2020	(dalam rupiah)
1	Dana BOS SMP	498.763.124,67	4.323.266.331,85	4.397.540.673,94	424.488.782,58	
2	Dana BOS SD	295.291.175,75	9.153.498.762,06	9.025.672.064,00	423.117.873,81	
	JUMLAH	794.054.300,42	13.476.765.093,91	13.423.212.737,94	847.606.656,39	

Rincian Saldo Dana BOS tingkat SMP sebagai berikut:

Tabel 7.5.47 Posisi Kas Dana BOS Tingkat SMP

No	Nama sekolah	Kecamatan	Saldo Kas	(dalam rupiah)
1	SMP Negeri 1 Midai	Kec. Midai	2.310.000,00	
2	SMP Negeri 1 Bunguran Barat	Kec. Bunguran Barat	15.165.456,41	
3	SMP N Satu Atap Pian Tengah	Kec. Bunguran Barat	64.313.725,38	
4	SMP Negeri 3 Satu Atap Bunguran Barat	Kec. Bunguran Barat	691.653,28	

No	Nama sekolah	Kecamatan	Saldo Kas
5	SMP Negeri 1 Bunguran Timur	Kec. Bunguran Timur	100.891.830,77
6	SMP Negeri 2 Bunguran Timur	Kec. Bunguran Timur	9.529.756,42
7	SMP Negeri 3 Bunguran Timur	Kec. Bunguran Timur	26.468.741,58
9	SMP Negeri 1 Serasan	Kec. Serasan	9.751.577,21
10	SMP Negeri 2 Satu Atap Serasan	Kec. Serasan	1.262.111,91
11	SMP Negeri 3 Satu Atap Serasan	Kec. Serasan	274.460,90
12	SMP Negeri 1 Subi	Kec. Subi	36.466.696,32
13	SMP Negeri Satu Atap Pulau Panjang	Kec. Subi	3.394.054,33
14	SMP Negeri 1 Bunguran Utara	Kec. Bunguran Utara	3.321.247,50
15	SMP Negeri 2 Bunguran Utara	Kec. Bunguran Utara	16.471.871,83
16	SMP Negeri 3 Satu Atap Bunguran Utara	Kec. Bunguran Utara	399.826,99
17	SMP Negeri 1 Pulau Laut	Kec. Pulau Laut	203.684,00
18	SMP Negeri 1 Pulau Tiga	Kec. Pulau Tiga	15.519.472,72
19	SMP Negeri 1 Bunguran Timur Laut	Kec. Bunguran Timur Laut	183.905,72
20	SMP Negeri Satu Atap Pengadah	Kec. Bunguran Timur Laut	55.082,35
21	SMP Negeri 1 Bunguran Tengah	Kec. Bunguran Tengah	40.497.729,85
22	SMP Negeri 1 Bunguran Selatan	Kec. Bunguran Selatan	67.704.427,59
23	SMP Negeri 2 Satu Atap Bunguran Selatan	Kec. Bunguran Selatan	10.000,00
24	SMP Negeri 1 Serasan Timur	Kec. Serasan Timur	7.274.938,04
25	SMP Negeri 1 Bunguran Batubi	Kec. Bunguran Batubi	2.237.972,23
26	SMP Negeri 1 Pulau Tiga Barat	Kec. Pulau Tiga Barat	88.559,25
Jumlah			424.488.782,58

Rincian Dana BOS tingkat SD sebagai berikut:

Tabel 7.5.48 Posisi Kas Dana BOS Tingkat SD

No	Nama Sekolah	Kecamatan	(dalam rupiah) Saldo Kas
1	SD Negeri 001 Midai	Kec. Midai	752.385,13
2	SD Negeri 002 Air Putih	Kec. Midai	241.281,07
3	SD Negeri 003 Sabang Barat	Kec. Midai	12.457,83
4	SD Negeri 004 Gurung Sebelat	Kec. Midai	1.083.665,77
5	SD Negeri 001 Sedanau	Kec. Bunguran Barat	13.513.291,07
6	SD Negeri 002 Sedanau	Kec. Bunguran Barat	10.351.986,29
7	SD Negeri 003 Sedanau	Kec. Bunguran Barat	32.618.623,76
8	SD Negeri 004 Pian Tengah	Kec. Bunguran Barat	4.826.620,70
9	SD Negeri 005 Sedanau	Kec. Bunguran Barat	21.440.556,29
10	SD Negeri 006 Sedanau	Kec. Bunguran Barat	1.762.800,00
11	SD Negeri 007 Selaut	Kec. Bunguran Barat	2.409.313,47
12	SD Negeri 008 Binjai	Kec. Bunguran Barat	2.461.999,74
13	SD Negeri 009 Mekar Jaya	Kec. Bunguran Barat	3.155.291,11
14	SD Negeri 010 Segeran/Sedanau	Kec. Bunguran Barat	898.206,99
15	SD Negeri 001 Sedanau Timur	Kec. Bunguran Batubi	30.686.140,13
16	SD Negeri 002 Batubi Jaya	Kec. Bunguran Batubi	4.710.817,42
17	SD Negeri 003 Gunung Putri	Kec. Bunguran Batubi	6.086.794,40
18	SD Negeri 004 Sedarat Baru	Kec. Bunguran Batubi	5.454.251,30
19	SD Negeri 005 Batubi Jaya	Kec. Bunguran Batubi	25.273,59
20	SD Negeri 001 Ranai	Kec. Bunguran Timur	269.999,99
21	SD Negeri 002 Ranai	Kec. Bunguran Timur	99.758,80
22	SD Negeri 003 Sungai Ulu	Kec. Bunguran Timur	8.105.997,00
23	SD Negeri 004 Ranai	Kec. Bunguran Timur	752.724,49
24	SD Negeri 005 Sepempang	Kec. Bunguran Timur	2.720.129,00
25	SD Negeri 006 Bandarsyah	Kec. Bunguran Timur	1.597.237,85
26	SD Negeri 007 Ranai Darat	Kec. Bunguran Timur	11.359.994,40
27	SD Negeri 008 Batu Gajah	Kec. Bunguran Timur	23.148.213,31
28	SD Negeri 009 Bandarsyah	Kec. Bunguran Timur	540.000,00
29	SD Negeri 010 Batu Gajah	Kec. Bunguran Timur	92.575,11
30	SD Negeri 011 Ranai	Kec. Bunguran Timur	445.479,67
31	SD Negeri 012 Ranai	Kec. Bunguran Timur	637.161,38
33	SD Negeri 001 Serasan	Kec. Serasan	6.253.771,97
34	SD Negeri 002 Serasan	Kec. Serasan	66.331,37
35	SD Negeri 003 Tanjung Balau	Kec. Serasan	169.021,58
36	SD Negeri 004 Jermalik	Kec. Serasan	85.970,61
37	SD Negeri 005 Pangkalan	Kec. Serasan	878.818,43
38	SD Negeri 006 Batu Berian	Kec. Serasan	362.268,35
39	SD Negeri 007 Hilir	Kec. Serasan	55.596,30
40	SD Negeri 001 Subi	Kec. Subi	12.746.599,79
41	SD Negeri 002 Meliah	Kec. Subi	8.181.317,15
42	SD Negeri 003 Subi	Kec. Subi	146,42
43	SD Negeri 004 Pulau Panjang	Kec. Subi	167.164,85
44	SD Negeri 005 Kerdau	Kec. Subi	1.500.668,95
45	SD Negeri 001 Kelarik Air Mali	Kec. Bunguran Utara	12.745.295,09
46	SD Negeri 002 Kelarik	Kec. Bunguran Utara	10.807.548,15
47	SD Negeri 003 Kelarik	Kec. Bunguran Utara	5.090.992,89
48	SD Negeri 004 Kelarik Barat	Kec. Bunguran Utara	172.435,24
49	SD Negeri 005 Teluk Buton	Kec. Bunguran Utara	11.792.250,31
50	SD Negeri 001 Air Payang	Kec. Pulau Laut	47.687.268,14
51	SD Negeri 002 Tanjung Pala	Kec. Pulau Laut	74.314,36
52	SD Negeri 003 Kadur	Kec. Pulau Laut	485.209,65
53	SD Negeri 001/002 Tanjung Batang	Kec. Pulau Tiga	31.456.451,29
54	SD Negeri 002 Sededad	Kec. Pulau Tiga	5.396.387,35
55	SD Negeri 003 Sabang Mawang	Kec. Pulau Tiga	5.695.843,64
56	SD Negeri 004 Serantas	Kec. Pulau Tiga	23.484.532,08
57	SD Negeri 001 Pulau Tiga	Kec. Pulau Tiga	107.246,41
58	SD Negeri 002 Selading	Kec. Pulau Tiga	961.219,66
59	SD Negeri 003 Setumuk	Kec. Pulau Tiga	6.943,47
60	SD Negeri 001 Tanjung	Kec. Bunguran Timur Laut	74.837,88
61	SD Negeri 002 Kelanga	Kec. Bunguran Timur Laut	40.458,72

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Saldo Kas
62	SD Negeri 003 Pengadah	Kec. Bunguran Timur Laut	1.091.410,46
63	SD Negeri 004 Ceruk	Kec. Bunguran Timur Laut	1.530.472,94
64	SD Negeri 005 Limau Manis	Kec. Bunguran Timur Laut	169.923,94
65	SD Negeri 006 Selemam	Kec. Bunguran Timur Laut	10.210.633,60
66	SD Negeri 007 Sebadai Hulu	Kec. Bunguran Timur Laut	101.150,36
67	SD Negeri 001 Harapan Jaya	Kec. Bunguran Tengah	11.808.429,44
68	SD Negeri 002 Tapau	Kec. Bunguran Tengah	1.512.100,64
69	SD Negeri 003 Air Lengit	Kec. Bunguran Tengah	531.036,29
70	SD Negeri 001 Cemaga	Kec. Bunguran Selatan	3.242.528,02
71	SD Negeri 002 Cemaga Tengah	Kec. Bunguran Selatan	713,37
72	SD Negeri 003 Cemaga Utara	Kec. Bunguran Selatan	2.806.335,73
73	SD Negeri 004 Cemaga Selatan	Kec. Bunguran Selatan	93.618,03
74	SD Negeri 005 Cemaga Selatan	Kec. Bunguran Selatan	41.277,46
75	SD Negeri 006 Cemaga Selatan	Kec. Bunguran Selatan	250.159,72
76	SD Negeri 001 Arung Ayam	Kec. Serasan Timur	8.647.551,14
77	SD Negeri 002 Air Nusa	Kec. Serasan Timur	-130,10
78	SD Negeri 003 Payak	Kec. Serasan Timur	-36.739,74
79	SD Negeri 004 Air Ringau	Kec. Serasan Timur	1.743.323,73
80	SD Negeri 001 Batu Belanak	Kec. Suak Midai	242.299,62
81	SD Negeri 002 Gunung Jambat	Kec. Midai	323.842,00
Jumlah			423.117.873,81

Sedang saldo kas dana bergulir sebesar Rp122.064.597,00 terdiri dari saldo dana bergulir UMKM sebesar Rp121.364.597,00 dan saldo dana bergulir perikanan sebesar Rp700.000,00 dengan rincian:

Tabel 7.5.49 Daftar Saldo Kas Lainnya Dana Bergulir

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Jenis Dana Bergulir	Nama Rekening	Nomor Rekening	Jumlah
1	UKM	Peng. Pokok Dana Bergulir Kab. Natuna 2007	11-70-20087-1	121.364.597,00
2	Perikanan	Dana Kredit Pengelolaan yg Belum Disalurkan	2106101000117	700.000,00
Jumlah				122.064.597,00

7.5.3.1.2 Piutang

Piutang	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	(Rp)	34.627.464.828,32	(Rp)	72.154.417.522,60

Piutang Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

Tabel 7.5.50 Saldo Piutang

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2020	Saldo per 31 Desember 2019	
1	Piutang Pajak	15.553.455.204,32	12.961.180.274,00	
2	Piutang Lainnya	19.074.009.624,00	59.193.237.248,60	
Jumlah				72.154.417.522,60

7.5.3.1.3 Piutang Pajak

Saldo piutang pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp15.553.455.204,32 merupakan nilai piutang pajak yang ada pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Saldo piutang pajak tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.51 Daftar Mutasi Saldo Piutang Pajak Tahun 2020

No	Uraian	Saldo Per 31 Des 2019 (Rp)	Penambahan 2020 (Rp)		Pembayaran 2020 (Rp)	Saldo per 31 Desember 2020 (Rp)
			Koreksi Pencatatan Piutang (Rp)	Penambahan 2020 (Rp)		
1	Piutang Pajak Reklame	46.052.000,00	0,00	105.495.000,00	93.123.000,00	58.424.000,00
2	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	12.915.128.274,00	0,00	3.892.470.203,00	1.515.585.184,00	15.292.013.293,00
3	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0,00	103.132.720,52	1.147.176.860,08	1.047.291.669,28	203.017.911,32
Jumlah		12.961.180.274,00	103.132.720,52	5.145.142.063,08	2.655.999.853,28	15.553.455.204,32

- 1) Piutang pajak reklame sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp58.424.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.52 Rincian Piutang Pajak Reklame

<i>(dalam rupiah)</i>				
Tahun	Saldo 31 Des 2019 (Rp)	Ketetapan baru (Piutang 2020)	Pembayaran 2020 (Rp)	Saldo Akhir per 31 Desember 2020
2015	17.832.000,00	0,00	0,00	17.832.000,00
2016	7.172.000,00	0,00	0,00	7.172.000,00

Tahun	Saldo 31 Des 2019 (Rp)	Ketetapan baru (Piutang 2020)	Pembayaran 2020 (Rp)	Saldo Akhir per 31 Desember 2020
2017	2.908.000,00	0,00	0,00	2.908.000,00
2018	3.738.000,00	0,00	0,00	3.738.000,00
2019	14.402.000,00	0,00	7.038.000,00	7.364.000,00
2020	0,00	105.495.000,00	86.085.000,00	19.410.000,00
Jumlah	46.052.000,00	105.495.000,00	93.123.000,00	58.424.000,00

2) Piutang pajak bumi dan bangunan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.292.013.293,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.53 Rincian Piutang Pajak Bumi dan Bangunan

Tahun Pajak	Saldo per 31 Des 2019 (Rp)	Penambahan 2020 (Rp)	Pembayaran 2020 (Rp)	(dalam rupiah)	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)
2010	471.718.702,00	0,00	25.714.783,00	446.003.919,00	
2011	973.246.299,00	0,00	23.953.443,00	949.292.856,00	
2012	888.878.299,00	0,00	23.811.287,00	865.067.012,00	
2013	938.257.266,00	0,00	26.377.853,00	911.879.413,00	
2014	951.890.329,00	0,00	35.246.634,00	916.643.695,00	
2015	954.561.906,00	0,00	32.784.556,00	921.777.350,00	
2016	923.273.401,00	0,00	26.263.554,00	897.009.847,00	
2017	1.880.851.230,00	0,00	51.719.184,00	1.829.132.046,00	
2018	2.376.954.081,00	0,00	71.701.382,00	2.305.252.699,00	
2019	2.555.496.761,00	0,00	143.121.104,00	2.412.375.657,00	
2020	0,00	3.892.470.203,00	1.054.891.404,00	2.837.578.799,00	
Jumlah	12.915.128.274,00	3.892.470.203,00	1.515.585.184,00		15.292.013.293,00

3) Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp203.017.911,32 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.54 Rincian Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Tahun	Saldo 31 Desember 2019	Penambahan		Pembayaran 2020 (Rp)	Saldo Akhir per 31 Desember 2020
		Koreksi Pencatatan Piutang	Ketetapan baru (Piutang 2020)		
2017	0,00	308.939,38	0,00	0,00	308.939,38
2018	0,00	48.057.188,01	0,00	3.793.037,50	44.264.150,51
2019	0,00	54.766.593,13	0,00	11.179.896,51	43.586.696,62
2020	0,00	0,00	1.147.176.860,08	1.032.318.735,27	114.858.124,81
Jumlah	0,00	103.132.720,52	1.147.176.860,08	1.047.291.669,28	203.017.911,32

7.5.3.1.5 Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan piutang pajak yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang dalam neraca disajikan dengan metode penyajian nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyisihan piutang pajak tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang pajak yang tidak tertagih dikecualikan untuk piutang yang bersumber dari Pemerintah Pusat. penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.55 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Pajak

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		<1 THN	<1 S.D 3 THN	3 S.D 5 THN	> 5 THN	
1	Piutang Pajak Reklame	19.410.000,00	11.102.000,00	10.080.000,00	17.832.000,00	58.424.000,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	97.050,00	2.775.500,00	5.040.000,00	17.832.000,00	25.744.550,00
	Nilai Yang Dapat direalisasikan	19.312.950,00	8.326.500,00	5.040.000,00	0,00	32.679.450,00
2	Piutang PBB	2.837.575.799,00	4.717.628.356,00	2.726.141.893,00	5.010.664.245,00	15.292.010.293,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	14.187.878,995	1.179.407.089,00	1.363.070.946,50	5.010.664.245,00	7.567.330.159,495
	Nilai Yang Dapat direalisasikan	2.823.387.920,005	3.538.221.267,00	1.363.070.946,50	0,00	7.724.680.133,505
3	Piutang BPHTB	114.858.124,81	87.850.847,13	308.939,38	0,00	203.017.911,32

No	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		<1 THN	<1 S.D 3 THN	3 S.D 5 THN	> 5 THN	
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	574.290,62	21.962.711,78	154.469,69	0,00	22.691.472,10
	Nilai Yang Dapat direalisasikan	114.283.834,19	65.888.135,35	154.469,69	0,00	180.326.439,22
	JUMLAH NRV	2.956.984.704,19	3.612.435.902,35	1.368.265.416,19	0,00	7.937.686.022,73
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	14.859.219,62	1.204.145.300,78	1.368.265.416,19	5.028.496.245,00	7.615.766.181,59

7.5.3.1.6 Piutang Lainnya

Piutang lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp19.074.009.624,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.56 Rincian Piutang Lainnya

Jenis Piutang Lainnya	Saldo per 31 Des 2019 (Rp)	Penambahan		Pengurangan		Saldo per 31 Des 2020 (Rp)	(dalam rupiah)
		Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	Penambahan Tahun 2020	Koreksi Pencatatan	Pembayaran tahun 2020 (Rp)		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	819.018.588,60	0,00	0,00	819.018.588,60	0,00	0,00	0,00
Piutang Dana Pensiun PNS	78.400.000,00	25.945.700,00	411.276.490,00	0,00	391.972.190,00	123.650.000,00	
Piutang Sky Aviation	258.664.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00	
Piutang BPJS	1.961.301.493,00	0,00	2.183.168.200,00	0,00	1.961.301.493,00	2.183.168.200,00	
Piutang BPJS Ketenagakerjaan	16.530.140,00	0,00	0,00	0,00	16.530.140,00	0,00	
Piutang Perusahaan	31.649.878,00	0,00	0,00	800,00	0,00	31.649.078,00	
Piutang TNI AL	4.494.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00	
Bagi Hasil Pajak	38.914.839.234,00	0,00	0,00	0,00	38.914.839.234,00	0,00	
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	1.667.167.309,00	0,00	0,00	0,00	1.667.167.309,00	0,00	
Bagi Hasil Provinsi	15.441.171.583,00	0,00	16.472.383.323,00	0,00	15.441.171.583,00	16.472.383.323,00	
Jumlah	59.193.237.248,60	25.945.700,00	19.066.828.013,00	819.019.388,60	58.392.981.949,00	19.074.009.624,00	

- 1) Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00.
- 2) Piutang dana pensiun PNS merupakan piutang yang terjadi akibat terlambatnya penyampaian SK pensiun oleh pensiunan PNS, sehingga menyebabkan gaji pensiunan PNS tersebut masih terbayarkan di atas tanggal SK pensiun. Pengembalian atas piutang tersebut dilakukan Oleh PT Taspen (Persero) selaku pengelola dana pensiunan PNS dengan memotong uang pensiunan bulanan PNS. Jumlah piutang dana pensiun per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 7.5.57 Rincian Piutang Dana Pensiun PNS

Jenis Piutang Lainnya	Saldo per 31 Des 2019	Penambahan		Pembayaran Tahun 2020	Saldo per 31 Des 2020	(dalam rupiah)
		Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	Penambahan Tahun 2020			
Piutang Dana Pensiun PNS	78.400.000,00	25.945.700,00	411.276.490,00	391.972.190,00	123.650.000,00	

- 3) Piutang Sky Aviation merupakan piutang yang timbul dikarenakan masih terdapat belanja subsidi penerbangan yang diberikan kepada PT Sky Aviation yang belum dipertanggungjawabkan. Sampai dengan tahun 2020 masih belum terdapat pelunasan dan jumlahnya masih sebesar Rp258.664.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.58 Rincian Piutang Sky Aviation

Uraian	Saldo 31 Des 2019	Penambahan 2019	Pengurangan 2019	Saldo 31 Des 2020	(dalam rupiah)
Piutang Sky Aviation	258.664.750,00	0,00	0,00	258.664.750,00	

- 4) Saldo piutang RSUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.219.311.551,00 merupakan piutang lainnya yang berasal dari RSUD selaku BLUD di Kabupaten Natuna dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.59 Rincian Piutang Pendapatan RSUD – BLUD

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Lainnya	Saldo per 31 Des 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)		Saldo per 31 Des 2020 (Rp)
			Koreksi Pencatatan	Pembayaran tahun 2020 (Rp)	
Piutang BPJS	1.961.301.493,00	2.183.168.200,00	0,00	1.961.301.493,00	2.183.168.200,00
Piutang BPJS Ketenagakerjaan	16.530.140,00	0,00	0,00	16.530.140,00	0,00
Piutang Perusahaan	31.649.878,00	0,00	800,00	0,00	31.649.078,00
Piutang TNI AL	4.494.273,00	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00
JUMLAH	2.013.975.784,00	2.183.168.200,00	800,00	1.977.831.633,00	2.219.311.551,00

- 5) Saldo Bagi Hasil Pajak per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.60 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Lainnya	Saldo per 31 Des 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran tahun 2020 (Rp)	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)
Piutang DBH dari PBB	37.422.044.037,00	0,00	37.422.044.037,00	0,00
Piutang DBH PPh 25/29	255.894.959,00	0,00	255.894.959,00	0,00
Piutang DBH dari biaya pungut PBB	1.227.868.991,00	0,00	1.227.868.991,00	0,00
Piutang DBH cukai hasil tembakau	9.031.247,00	0,00	9.031.247,00	0,00
JUMLAH	38.914.839.234,00	0,00	38.914.839.234,00	0,00

- 6) Saldo Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.61 Rincian Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Lainnya	Saldo per 31 Des 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran tahun 2020 (Rp)	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)
Piutang DBH dari provinsi sumber daya hutan	27.702.453,00	0,00	27.702.453,00	0,00
Piutang DBH dari iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi/royalty	1.635.787.567,00	0,00	1.635.787.567,00	0,00
Piutang DBH dari pungutan pengusahaan perikanan	3.677.289,00	0,00	3.677.289,00	0,00
JUMLAH	1.667.167.309,00	0,00	1.667.167.309,00	0,00

- 7) Saldo Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.472.383.323,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.62 Rincian Piutang Bagi Hasil Pajak

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Lainnya	Saldo per 31 Des 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pembayaran tahun 2020 (Rp)	Saldo per 31 Des 2020 (Rp)
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	2.189.516.681,00	2.689.958.524,00	2.189.516.681,00	2.689.958.524,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.165.184.373,00	1.570.283.227,00	3.165.184.373,00	1.570.283.227,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	9.666.936,00	12.539.402,00	9.666.936,00	12.539.402,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	9.224.735.757,00	12.199.602.170,00	9.224.735.757,00	12.199.602.170,00
Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	852.067.836,00	0,00	852.067.836,00	0,00
JUMLAH	15.441.171.583,00	16.472.383.323,00	15.441.171.583,00	16.472.383.323,00

7.5.3.1.7 Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan piutang lainnya yang tidak tertagih terdiri atas taksiran kemungkinan tidak tertagih pada setiap akhir periode. Piutang dalam neraca disajikan dengan metode penyajian nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyisihan piutang pajak tidak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang pajak yang tidak tertagih dikecualikan untuk piutang yang bersumber dari Pemerintah Provinsi. Penyisihan piutang tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.63 Rincian Perhitungan Piutang Tak Tertagih Atas Piutang Lainnya

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		<1 THN	<1 S.D 3 THN	3 S.D 5 THN	> 5 THN	
1	Piutang Dana Pensiun PNS	51.250.000,00	0,00	72.400.000,00	0,00	123.650.000,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	256.250,00	0,00	36.200.000,00	0,00	36.456.250,00
	Nilai Yang Dapat direalisasikan	50.993.750,00	0,00	36.200.000,00	0,00	87.193.750,00
2	Piutang Sky Aviation	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00	258.664.750,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	

No.	Uraian	Umur Piutang				Jumlah (Rp)
		Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	
		<1 THN	<1 S.D 3 THN	3 S.D 5 THN	> 5 THN	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	258.664.750,00	258.664.750,00
	Nilai Yang Dapat direalisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Piutang BPJS	2.183.168.200,00	0,00	0,00	0,00	2.183.168.200,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	10.915.841,00	0,00	0,00	0,00	10.915.841,00
	Nilai Yang Dapat direalisasikan	2.172.252.359,00	0,00	0,00	0,00	2.172.252.359,00
4	Piutang Perusda	0,00		5.489.218,00	26.159.860,00	31.649.078,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	2.744.609,00	26.159.860,00	28.904.469,00
	Nilai Yang Dapat direalisasikan	0,00	0,00	2.744.609,00	0,00	2.744.609,00
5	Piutang TNI AL	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00	4.494.273,00
	% penyisihan	0,50%	25%	50%	100%	
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	4.494.273,00	4.494.273,00
	Nilai Yang Dapat direalisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH NRV	2.223.246.109,00	0,00	38.944.609,00	0,00	2.262.190.718,00
	JUMLAH PIUTANG TAK TERTAGIH	11.172.091,00	0,00	38.944.609,00	289.318.883,00	339.435.583,00

7.5.3.1.8 Beban Dibayar Di Muka

Beban Dibayar Di Muka	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	274.808.333,33	312.458.333,33

Pada akhir tahun 2020 terdapat saldo belanja dibayar di muka sebesar Rp274.808.333,33 yang dirinci sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp 312.458.333,33
Penambahan tahun 2020	Rp 274.808.333,33
Jumlah	Rp 587.266.666,66
Pengurangan tahun 2020	Rp 312.458.333,33
Saldo per 31 Desember 2020	Rp 274.808.333,33

Jumlah tersebut merupakan belanja dibayar di muka yang terdiri dari:

Tabel 7.5.64 Rincian Belanja Dibayar Di Muka

(dalam rupiah)				
Jenis	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2020
Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	64.708.333,33	25.000.000,00	64.708.333,33	25.000.000,00
Beban Sewa Gedung/Kantor/Tempat	247.750.000,00	249.808.333,33	247.750.000,00	249.808.333,33
Jumlah	312.458.333,33	274.808.333,33	312.458.333,33	274.808.333,33

Saldo akhir beban sewa dibayar di muka rumah jabatan/rumah dinas sebesar Rp25.000.000,00 berada di Dinas Kesehatan Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah untuk sewa rumah dokter dan Sekretariat Daerah yang merupakan beban sewa atas sewa rumah dinas Wakil Bupati.

Saldo akhir beban sewa gedung/kantor/tempat dibayar di muka sebesar Rp249.808.333,33 berada di beberapa SKPD dengan rincian:

Tabel 7.5.65 Rincian Beban Sewa Dibayar Di Muka Gedung/Kantor/Tempat

No	SKPD	Jumlah	(dalam rupiah)
1	Dinas Kesehatan	3.750.000,00	
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.333.333,33	
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.250.000,00	
4	Sekretariat Daerah	211.600.000,00	
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.375.000,00	
6	Kecamatan Bunguran Timur	17.500.000,00	
	Jumlah	249.808.333,33	

7.5.3.1.9 Persediaan

Persediaan	31 Desember 2020		31 Desember 2019	
	(Rp)	59.103.250.584,77	(Rp)	55.880.190.631,84

Pada tahun 2020, persediaan alat tulis kantor, persediaan dokumen/administrasi tender, persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, *battery* kering), persediaan perangko, meterai dan benda pos lainnya, persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, persediaan bahan bakar minyak/gas, persediaan bahan pakai habis, persediaan bahan kimia, alat perlengkapan beban persediaan bahan baku bangunan, beban bahan alat-alat olahraga, beban material/hadiah, beban cetak, beban penggandaan, beban dokumentasi, beban persediaan pengisian isi tabung gas, beban spanduk, beban dekorasi, beban atribut, persediaan bahan makanan pokok dan persediaan tempat sampah dicatat dengan metode periodik. Sedangkan persediaan bahan/bibit tanaman, persediaan bahan obat-obatan, persediaan alat-alat kesehatan pakai habis, barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga, bibit ternak, barang yang akan diserahkan kepada masyarakat dicatat dengan metode *perpetual*.

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp59.103.250.584,77 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.66 Nilai Keseluruhan Mutasi Persediaan

Sumber persediaan	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	(dalam rupiah)
Barang Persediaan APBD	55.880.190.631,84	73.243.238.177,08	70.020.178.224,15	59.103.250.584,77	
Jumlah	55.880.190.631,84	73.243.238.177,08	70.020.178.224,15	59.103.250.584,77	

Penambahan persediaan sebesar Rp73.243.238.177,08 terdiri dari:

Belanja Persediaan tahun 2020	Rp	56.955.293.440,00
Utang Belanja	Rp	6.945.016.293,00
Reklasifikasi dari Beban Luar Biasa	Rp	3.303.134.424,20
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	3.000.000,00
Reklasifikasi dari Beban Jasa	Rp	129.355.239,88
Hibah	Rp	1.063.122.780,00
Koreksi Pencatatan	Rp	4.844.316.000,00
Jumlah	Rp	73.243.238.177,08

Pengurangan persediaan sebesar Rp70.020.178.224,15 terdiri dari:

Menjadi Beban Persediaan tahun 2020	Rp	64.621.976.224,15
Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	343.064.000,00
Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp	9.000.000,00
Reklas ke Aset Tak Berwujud	Rp	199.380.000,00
Koreksi Pencatatan	Rp	4.844.316.000,00
Barang <i>Expired</i>	Rp	2.442.000,00
Jumlah	Rp	70.020.178.224,15

Penjelasan atas nilai mutasi persediaan di atas adalah:

Tabel 7.5.67 Daftar Mutasi Masuk dan Keluar

No	Uraian persediaan	Saldo Awal	Penambahan							Pengurangan					(dalam rupiah)	
			Belanja	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Reklasifikasi dari Beban Luar Biasa	Reklas Dari beban Jasa	Penambahan Dari Utang	Hibah	Koreksi Pencatatan	Menjadi Beban	Barang Eksipred	Reklas ke Peralatan dan Mesin	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Reklas Ke Aset Tak Berwujud	Koreksi Pencatatan	
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	26.954.535,00	8.637.637.482,00	0,00	0,00	0,00	157.986.140,00	0,00	0,00	6.706.277.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.300.380,00	
2	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	235.000,00	33.391.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.826.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	24.924.300,00	470.497.130,00	0,00	0,00	0,00	36.883.500,00	0,00	0,00	532.016.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
4	Persediaan Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	1.230.000,00	947.401.373,00	0,00	0,00	0,00	17.388.000,00	0,00	0,00	965.133.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.000,00
5	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.568.300,00	1.657.928.191,00	0,00	0,00	0,00	35.894.500,00	0,00	0,00	1.694.227.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.000,00
6	Persediaan Bahan Bakar dan Bahan Bahan Bahan	1.530.000,00	1.761.265.525,00	0,00	0,00	0,00	19.345.000,00	0,00	0,00	1.737.558.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.582.400,00
7	Persediaan Bahan Pakai Habis	601.458.080,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00	5.008.000,00	0,00	270006400	605.604.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.925.400,00
8	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	29.016.250,00	183.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.741.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian persediaan	Saldo Awal	Penambahan						Pengurangan						Saldo Akhir	
			Belanja	Reklasifikasi dari Jalan, irigasi dan Jaringan	Reklasifikasi dari Beban Luar Biasa	Reklas Dari beban Jasa	Penambahan Dari Utang	Hibah	Koreksi Pencatatan	Menjadi Beban	Barang Expired	Reklas Ke Peralatan dan Mesin	Reklas Ke Jalan, irigasi dan Jaringan	Reklas Ke Aset Tak Berwujud		
9	Persediaan Bahan Obat-obatan	6.374.923.733,67	5.128.376.425,00	0,00	0,00	106.355.239,88	74.720.100,00	9.457.800,00	0,00	209.955.340,00	2.442.000,00	0,00	0,00	0,00	11.481.435.958,55	
10	Persediaan Bahan Kimia	0,00	122.704.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.704.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Persediaan Alat-alat Kesehatan Pakai Habis	6.428.483.434,17	4.638.628.234,00	0,00	3.303.134.424,20	0,00	4.012.754.328,00	564.983.780,00	4.416.756.000,00	10.517.895.358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.140.000,00	
12	Barang Yang Akan Diserahkan kepada Masyarakat	31.158.937.120,00	9.269.455.534,00	0,00	0,00	819.345.828,00	488.681.200,00	0,00	24.508.213.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.230.205.982,00	
13	Barang Yang Akan Diserahkan kepada Pihak Ketiga	11.157.911.829,00	6.010.607.504,00	0,00	0,00	1.038.986.697,00	0,00	0,00	1.480.563.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.726.942.322,00	
14	Alat Perkakas dan Perlengkapan	0,00	10.474.359.232,00	3.000.000,00	0,00	259.736.000,00	0,00	0,00	5.758.374.632,00	0,00	198.291.000,00	9.000.000,00	199.380.000,00	4.564.106.600,00	0,00	
15	Beban Sertifikat	389.250,00	1.509.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	
16	Beban Persediaan barang bahan baku	49.953.000,00	64.230.000,00	0,00	0,00	15.860.000,00	0,00	157.494.600,00	80.090.000,00	0,00	49.953.000,00	0,00	0,00	0,00	157.494.600,00	
17	Beban bahan alat-alat olahraga	0,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Beban peralatan kesehatan	0,00	210.551.020,00	0,00	0,00	0,00	2.630.000,00	0,00	247.551.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Beban Cetak dan cetakan	0,00	3.550.872.031,00	0,00	0,00	0,00	298.319.000,00	0,00	3.569.923.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.067.400,00	
20	Beban Pengeluaran	0,00	3.681.568.084,00	0,00	0,00	0,00	128.753.700,00	0,00	0,00	3.807.321.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Beban dokumentasi	0,00	286.171.800,00	0,00	0,00	0,00	18.975.500,00	0,00	0,00	285.147.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Beban peralatan dan perlengkapan istirahat dan istirahat gas	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Beban spanduk	0,00	1.098.032.165,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.099.032.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Beban dekorasi	0,00	360.271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	Pembentahan Tempat Sampaikan	0,00	150.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.320.000,00	0,00	94.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Persediaan Bahan Makanan Pokok	20.677.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.141.700,00	
	Jumlah	55.890.190.631,64	56.955.293.440,00	3.000.000,00	3.303.134.424,20	129.355.239,88	6.945.016.293,00	1.063.122.780,00	4.844.316.000,00	64.621.976.224,15	2.442.000,00	343.064.000,00	9.000.000,00	199.380.000,00	4.844.316.000,00	59.103.250.584,77

Koreksi pencatatan merupakan perbaikan pencatatan antar rincian objek persediaan sesuai dengan *output* persediaan dan menyamakan informasi yang disajikan dengan dokumen administrasi penatausahaan persediaan. Jumlah persediaan sebesar Rp59.103.250.584,77 per 31 Desember 2020 terdiri dari:

Tabel 7.5.68 Daftar Saldo Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian Persediaan	Saldo
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	316.300.380,00
2	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampa pijar, battery kering)	288.000,00
3	Persediaan Perangko, metralai dan benda pos lainnya	886.000,00
4	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	3.163.000,00
5	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	44.582.400,00
6	Persediaan Bahan Pakai Habis	293.925.400,00
7	Persediaan Bahan obat-obatan	11.481.435.958,55
8	Persediaan Alat-alat Kesehatan	12.831.704.842,22
9	Persediaan Barang yang akan diberikan kepada Pihak Ketiga	16.726.942.322,00
10	Persediaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	17.230.205.982,00
11	Persediaan Bibit ternak	180.000,00
12	Persediaan Bahan baku bangunan	157.494.600,00
13	Persediaan Bahan Makanan Pokok	16.141.700,00
	Jumlah	59.103.250.584,77

1. Persediaan Alat Tulis kantor

Persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp316.300.380,00.

Persediaan alat tulis kantor pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.69 Rincian Persediaan Alat Tulis Kantor

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum Daerah	1.271.000,00
2	Dinas Sosial	209.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	110.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	478.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	829.000,00
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	290.988.950,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	295.000,00
8	Dinas Perhubungan	1.710.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.395.000,00
10	Dinas Perikanan	2.226.000,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	325.000,00
12	Sekretariat Daerah	9.928.600,00
13	Sekretariat DPRD	3.404.830,00
14	Inspektorat	1.020.000,00
15	Kecamatan Bunguran Barat	230.000,00
16	Kecamatan Bunguran Utara	670.000,00
17	Kecamatan Pulau Laut	560.000,00
18	Kecamatan Pulau Tiga	650.000,00
	Jumlah	316.300.380,00

2. Alat Listrik dan elektronik (lampa pijar, battery kering)

Persediaan alat listrik dan elektronik (lampa pijar, battery kering) per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp288.000,00 merupakan alat listrik dan elektronik (lampa pijar,

battery kering) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp288.000,00.

3. Perangko, meterai dan benda pos lainnya

Perangko, meterai dan benda pos lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp886.000,00. Perangko, meterai dan benda pos lainnya pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.70 Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya

No	SKPD	Jumlah (dalam rupiah)
1	Rumah Sakit Umum Daerah	36.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	130.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	160.000,00
4	Dinas Perikanan	400.000,00
5	Inspektorat	160.000,00
Jumlah		886.000,00

4. Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp3.163.000,00. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.71 Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

No	SKPD	Jumlah (dalam rupiah)
1	Rumah Sakit Umum Daerah	1.502.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	325.000,00
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	153.000,00
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	237.000,00
5	Dinas Perikanan	172.000,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	191.000,00
7	Inspektorat	489.000,00
8	Kecamatan Bunguran Barat	94.000,00
Jumlah		3.163.000,00

5. Bahan Bakar Minyak/Gas

Bahan bakar minyak/gas per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp44.582.400,00 bahan bakar minyak/gas setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.72 Bahan Bakar Minyak/Gas

No	SKPD	Jumlah (dalam rupiah)
1	Rumah Sakit Umum Daerah	3.270.000,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.157.400,00
3	Sekretariat Daerah	34.155.000,00
Jumlah		44.582.400,00

6. Bahan Pakai Habis

Bahan pakai habis per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp293.925.400,00 bahan pakai habis setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.73 Bahan Pakai Habis

No	SKPD	Jumlah (dalam rupiah)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	14.965.000,00
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	239.302.400,00
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	12.700.000,00
4	Dinas Perhubungan	860.000,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.800.000,00
6	Dinas Perikanan	1.400.000,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	20.898.000,00
8	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.050.000,00

No	SKPD	Jumlah
9	Inspektorat	950.000,00
	Jumlah	293.925.400,00

7. Bahan Obat-obatan

Bahan obat-obatan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.481.435.958,55 Bahan obat-obatan pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.74 Bahan Obat-Obatan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	
	- Dinas Kesehatan	8.338.830.319,89
	- Rumah Sakit Umum Daerah	3.141.525.638,66
2	Dinas Perikanan	1.080.000,00
	Jumlah	11.481.435.958,55

8. Alat-alat Kesehatan

Alat-alat Kesehatan per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp12.831.704.842,22. Alat-alat Kesehatan pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.75 Alat-alat Kesehatan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	
	- Dinas Kesehatan	2.960.978.878,02
	- Rumah Sakit Umum Daerah	9.870.725.964,20
	Jumlah	12.831.704.842,22

9. Barang yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga

Barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp16.726.942.322,00. Barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.76 Barang yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	259.500.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	16.467.442.322,00
	Jumlah	16.726.942.322,00

10. Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat

Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp17.230.205.982,00. Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.77 Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	7.379.350,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.958.882.100,00
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	14.081.110.892,00
4	Dinas Pemadam Kebakaran	78.016.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	58.619.080,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	1.198.560,00
7	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	45.000.000,00
	Jumlah	17.230.205.982,00

11. Bibit ternak

Persediaan bibit ternak per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp180.000,00 terdapat pada Dinas Perikanan Kabupaten Natuna yang merupakan bibit ikan.

12. Persediaan bahan baku bangunan

Persediaan bahan baku bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp157.494.600,00.
Persediaan bahan baku bangunan pada setiap SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.78 Persediaan Bahan Baku Bangunan

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pemuda dan Olahraga	116.419.600,00
2	Dinas Kesehatan	
	- Rumah Sakit Umum Daerah	21.075.000,00
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	20.000.000,00
	Jumlah	157.494.600,00

13. Persediaan Bahan Makanan Pokok

Persediaan bahan makan pokok per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.141.700,00 berada pada Dinas Kesehatan unit kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna.

Persediaan di atas merupakan persediaan dalam kondisi baik yang akan digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah. Untuk persediaan usang/rusak/kadaluwarsa tidak disajikan dalam neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020. Persediaan kadaluwarsa obat-obatan sebesar Rp7.130.509.088,30 dan Persediaan BHP/Alat Kesehatan yang telah kadaluwarsa Rp2.132.191.977,16. Merupakan persediaan dengan kondisi kadaluwarsa pada Dinas Kesehatan. Sampai dengan 31 Desember 2020 belum dilakukan pemusnahan atas persediaan tersebut karena terkendala dampak lingkungan Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas (P2LB3PK) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

7.5.3.1 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	61.387.100.074,00	62.531.324.501,95

Investasi jangka panjang tahun 2020 terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen dengan rincian sebagai berikut:

Investasi Non Permanen	Rp 382.846.348,00
Investasi Permanen	Rp 61.004.253.726,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp 61.387.100.074,00

Adapun penjelasan atas masing-masing jenis investasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

7.5.3.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Jangka Panjang	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Non Permanen	382.846.348,00	831.763.529,95

Jumlah investasi non permanen tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2020 yang merupakan dana bergulir yang dikelola oleh SKPD terdiri dari:

Tabel 7.5.79 Investasi Non Permanen Lainnya Tahun 2020

(dalam rupiah)

Uraian	Saldo per 31 Desember 2019 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo per 31 Desember 2020 (Rp)
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	831.763.529,95	0,00	448.917.181,95	382.846.348,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	831.763.529,95	0,00	448.917.181,95	382.846.348,00

Investasi non permanen lainnya dana bergulir dinilai berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Natuna.

(1) Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

Pengelolaan dana bergulir di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM di Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016, pengelolaan dana bergulir diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 18 Agustus 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Dana Bergulir Kabupaten Natuna dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 12 Tahun 2010. Untuk pelaksanaan usaha ekonomi produktif atas penggunaan dana bergulir diatur dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Melalui Penyaluran Pinjaman Bergulir Kabupaten Natuna dan telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 11 Tahun 2011.

Dana bergulir oleh Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Natuna yang disalurkan kepada 1.944 orang adalah sebesar Rp29.412.235.761,90 dengan rincian per kecamatan sebagai berikut:

Tabel 7.5.80 Dana Bergulir

No	Rekap Penerima Dana Bergulir	Baki Debet	Belum Jatuh Tempo dicadangkan 0,5%	(dalam rupiah)		
				0-3 Th Dicadangkan 50%	3-5 Th Dicadangkan 75%	>5 Th Dicadangkan 100%
1	Bunguran Timur	10.909.066.256,00	0,00	0,00	155.792.164,00	10.753.274.092,00
2	Bunguran Timur Laut	1.558.520.760,00	0,00	0,00	28.838.938,00	1.529.681.822,00
3	Bunguran Tengah	311.039.259,00	0,00	0,00	31.470.997,00	279.568.262,00
4	Bunguran Utara	1.283.450.740,00	0,00	0,00	32.522.500,00	1.250.928.240,00
5	Bunguran Barat	5.708.288.723,00	0,00	0,00	113.335.455,00	5.594.953.268,00
6	Pulau Tiga	3.409.776.970,00	0,00	6.500.000,00	15.000.000,00	3.388.276.970,00
7	Serasan	1.915.383.600,00	0,00	15.000.000,00	107.254.461,00	1.793.129.139,00
8	Subi	524.290.512,00	0,00	0,00	0,00	524.290.512,00
9	Midai	871.986.738,00	0,00	0,00	52.050.695,00	819.936.043,00
10	Pulau Laut	678.766.558,90	0,00	0,00	25.200.000,00	653.566.558,90
11	Koperasi	2.186.715.645,00	0,00	0,00	140.527.486,00	2.046.188.159,00
12	Bunguran Selatan	54.950.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	29.950.000,00
Jumlah		29.412.235.761,90	0,00	21.500.000,00	726.992.696,00	28.663.743.065,90

Dana bergulir dengan kualitas lancar adalah sebesar Rp0,00, sedangkan untuk kualitas kurang lancar, kualitas diragukan, dan kualitas macet dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.5.81 Dana Bergulir (Kualitas Kurang Lancar)

No	Rekap Penerima Dana Bergulir	Plafond	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	(dalam rupiah)	
					Baki Debet	
1	Kecamatan Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kecamatan Bunguran Timur Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Kecamatan Bunguran Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kecamatan Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kecamatan Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kecamatan Pulau Tiga	15.000.000,00	8.500.000,00	0,00	6.500.000,00	
7	Kecamatan Serasan	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	
8	Kecamatan Subi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kecamatan Midai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kecamatan Pulau Laut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Kecamatan Bunguran Selatan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		30.000.000,00	8.500.000,00	0,00	21.500.000,00	

Tabel 7.5.82 Dana Bergulir (Kualitas Diragukan)

No	Rekap Penerima Dana Bergulir	Plafond	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	(dalam rupiah)	
					Baki Debet	
1	Kecamatan Bunguran Timur	275.000.000,00	119.207.836,00	2.316.836,00	155.792.164,00	
2	Kecamatan Bunguran Timur Laut	55.000.000,00	26.161.062,00	0,00	28.838.938,00	
3	Kecamatan Bunguran Tengah	124.500.000,00	93.029.003,00	1.284.546,00	31.470.997,00	
4	Kecamatan Bunguran Utara	65.000.000,00	32.477.500,00	0,00	32.522.500,00	
5	Kecamatan Bunguran Barat	165.000.000,00	51.664.545,00	0,00	113.335.455,00	
6	Kecamatan Pulau Tiga	27.000.000,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	
7	Kecamatan Serasan	165.000.000,00	57.745.539,00	0,00	107.254.461,00	
8	Kecamatan Subi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kecamatan Midai	70.000.000,00	17.949.305,00	0,00	52.050.695,00	
10	Kecamatan Pulau Laut	50.000.000,00	24.800.000,00	0,00	25.200.000,00	
11	Koperasi	400.000.000,00	259.472.514,00	18.936.886,00	140.527.486,00	
12	Kecamatan Bunguran Selatan	25.000.000,00	0,00	0,00	25.000.000,00	
Jumlah		1.421.500.000,00	694.507.304,00	22.538.268,00	726.992.696,00	

Tabel 7.5.83 Dana Bergulir (Kualitas Macet)

(dalam rupiah)

No	Rekapan Penerima Dana Bergulir	Plafond	Angsuran Pokok	Angsuran Bunga	Baki Debet
1	Kecamatan Bunguran Timur	14.951.285.000,00	4.198.010.906,00	74.396.425,00	10.753.274.092,00
2	Kecamatan Bunguran Timur Laut	2.097.250.000,00	567.568.178,00	8.155.270,00	1.529.681.822,00
3	Kecamatan Bunguran Tengah	1.031.710.000,00	752.141.739,00	3.214.749,00	279.568.262,00
4	Kecamatan Bunguran Utara	1.505.830.000,00	254.901.760,00	333.136,00	1.250.928.240,00
5	Kecamatan Bunguran Barat	7.221.000.000,00	1.626.046.732,00	35.969.859,00	5.594.953.268,00
6	Kecamatan Pulau Tiga	3.662.480.000,00	274.203.030,00	3.575.644,00	3.388.276.970,00
7	Kecamatan Serasan	4.251.000.000,00	2.457.870.861,00	31.993.264,00	1.793.129.139,00
8	Kecamatan Subi	664.260.000,00	139.969.488,00	63.409,00	524.290.512,00
9	Kecamatan Midai	1.840.000.000,00	1.020.063.957,00	3.000.000,00	819.936.043,00
10	Kecamatan Pulau Laut	1.081.570.000,00	428.003.441,10	811.259,00	653.566.558,90
11	Koperasi	3.790.000.000,00	1.743.811.841,00	129.830.955,00	2.046.188.159,00
12	Kecamatan Bunguran Selatan	40.000.000,00	10.050.000,00	0,00	29.950.000,00
Jumlah		42.136.385.000,00	13.472.641.934,10	291.343.970,00	28.663.743.065,90

Berdasarkan analisis umur piutang diketahui bahwa nilai yang diperkirakan tidak tertagih adalah sebesar Rp29.029.389.413,90, sehingga nilai yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp382.846.348,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.84 Analisis Umur Piutang Dana Bergulir Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Belum Jatuh Tempo dicadangkan 0,5%	Umur Piutang			Jumlah
			0-3 Th Dicadangkan 10%	3-5 Th Dicadangkan 50%	>5 Th Dicadangkan 100%	
1	Nilai Dana Berdasarkan Nilai Umur Jatuh Tempo	0,00	21.500.000,00	726.992.696,00	28.663.743.065,90	29.412.235.761,90
2	Persentase Percadangan	0,5%	10%	50%	100%	
3	Nilai Percadangan	0,00	2.150.000,00	363.496.348,00	28.663.743.065,90	29.029.389.413,90
4	Yang Dapat Direalisasikan	0,00	19.350.000,00	363.496.348,00	0,00	382.846.348,00

(2) Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah dana bergulir yang disalurkan pada tahun 2002 adalah sebesar Rp5.000.000.000,00. Kemudian dana bergulir untuk 50 penerima sebesar Rp438.000.000,00 telah diserahkan kepada Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga dana bergulir yang masih dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan adalah 450 penerima dengan jumlah sebesar Rp4.562.000.000,00. Dari dana tersebut terdapat pengembalian berupa angsuran pokok tahun 2020 sebesar Rp19.407.400,00 sehingga total angsuran pokok sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp508.333.180,00. Sedangkan nilai baki debet (dana yang masih bergulir) adalah sebesar Rp4.053.666.820,00 (Rp4.562.000.000,00 - Rp508.333.180,00).

Jumlah dana bergulir yang disalurkan pada tahun 2003 adalah sebesar Rp4.900.000.000,00. Kemudian dana bergulir untuk 115 penerima sebesar Rp1.096.933.335,00 diserahkan kepada Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga dana bergulir yang masih dikelola Dinas Kelautan dan Perikanan adalah 365 penerima dengan jumlah sebesar Rp3.803.066.665,00. Dari dana tersebut terdapat pengembalian berupa angsuran pokok sebesar Rp532.733.245,00 sehingga nilai baki debet (dana yang masih bergulir) adalah sebesar Rp3.270.333.420,00 (Rp3.803.066.665,00 - Rp532.733.245,00).

Berdasarkan analisis umur piutang diketahui bahwa seluruh nilai dana bergulir telah melebihi empat tahun sehingga dikategorikan macet 100% diperkirakan diragukan dapat direalisasikan seluruhnya, dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 7.5.85 Analisis Umur Piutang Dana Bergulir Dinas Kelautan dan Perikanan

(dalam rupiah)

No	Keterangan	Belum Jatuh Tempo dicadangkan 0%	Umur Piutang			Jumlah
			0-3 Th Dicadangkan 50%	3-5 Th Dicadangkan 75%	>5 Th Dicadangkan 100%	
I.	Dinas Kelautan Perikanan tahun 2002					

No	Keterangan	Belum Jatuh Tempo dicadangkan 0%	Umur Piutang			Jumlah
			0-3 Th Dicadangkan 50%	3-5 Th Dicadangkan 75%	>5 Th Dicadangkan 100%	
1	Nilai Dana Berdasarkan Nilai Umur Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	4.053.666.820,00	4.053.666.820,00
2	Persentase Percadangan	0%	50%	75%	100%	
3	Nilai Percadangan	0,00	0,00	0,00	4.053.666.820,00	4.053.666.820,00
4	Yang Dapat Direalisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dinas Kelautan Perikanan tahun 2003						
1	Nilai Dana Berdasarkan Nilai Umur Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	3.270.333.420,00	3.270.333.420,00
2	Persentase Percadangan	0%	50%	75%	100%	
3	Nilai Percadangan	0,00	0,00	0,00	3.270.333.420,00	3.270.333.420,00
4	Yang Dapat Direalisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Dinas Kelautan Perikanan tahun 2002 & 2003						
1	Nilai Dana Berdasarkan Nilai Umur Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	7.324.000.240,00	7.324.000.240,00
2	Persentase Percadangan	0%	50%	75%	100%	
3	Nilai Percadangan	0,00	0,00	0,00	7.324.000.240,00	7.324.000.240,00
4	Yang Dapat Direalisasikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investasi Jangka Panjang Permanen	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	61.004.253.726,00	61.699.560.972,00

Investasi permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp61.004.253.726,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:

Tabel 7.5.86 Rincian Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Investasi Permanen	Saldo per 31 Desember 2019	Penambahan tahun 2020	Pengurangan 2020	Saldo per 31 Desember 2020
1	Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Kab. Natuna	7.058.767.337,00	0,00	940.904.900,00	6.117.862.437,00
2	Penyertaan Modal Kepada PT Bank Riau	33.938.100.000,00	0,00	0,00	33.938.100.000,00
3	Penyertaan Modal Kepada PT Riau Air Laines	9.500.000.000,00	0,00	0,00	9.500.000.000,00
4	Penyertaan Modal Kepada PDAM Tirta Nusa	11.202.693.635,00	245.597.654,00	0,00	11.448.291.289,00
	Jumlah	61.699.560.972,00	245.597.654,00	940.904.900,00	61.004.253.726,00

Metode penilaian investasi permanen Pemerintah Kabupaten Natuna pada setiap investasi per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.87 Metode Penilaian Investasi Permanen

(dalam rupiah)

No	Uraian	Saldo per 31 Desember 2020	Metode Penilaian
1	PERUSDA KAB. NATUNA	6.117.862.437,00	Metode Ekuitas
2	PT BANK RIAU	33.938.100.000,00	Metode Biaya
3	PT RIAU AIR LINES	9.500.000.000,00	Metode Biaya
4	PDAM TIRTA NUSA	11.448.291.289,00	Metode Ekuitas
	Jumlah	61.004.253.726,00	

(1) Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna

Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Daerah. Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah 100% dengan penyetoran modal sebesar Rp39.687.472.016,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.88 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/Lembaga	Jumlah
APBD 2001	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2002	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2003	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2004	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	500.000.000,00
APBD 2004	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	4.187.472.016,00
APBD 2006	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	5.000.000.000,00
APBD 2007	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	25.500.000.000,00
APBD 2013	Penyertaan Modal	Perusahaan Daerah	3.000.000.000,00
	Total		39.687.472.016,00

Sampai dengan tahun 2011 penyertaan modal pada Perusahaan Daerah disajikan dengan menggunakan metode biaya, namun mulai tahun 2012 menggunakan metode ekuitas. Sesuai Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Kabupaten Natuna tahun 2020 (*unaudited*) disajikan rugi tahun 2020 adalah sebesar Rp940.904.900,00. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebesar Rp6.117.862.437,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.89 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah (Metode Ekuitas) Tahun 2020

Uraian	Jumlah Penyertaan Modal 100% (Metode Ekuitas)		(dalam rupiah)
	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2020	
Modal Disetor	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
Modal Donasi	4.187.472.016,00	4.187.472.016,00	0,00
Modal Penyertaan	33.500.000.000,00	33.500.000.000,00	0,00
Laba (Rugi) Ditahan	(31.506.373.127,00)	(32.628.704.679,00)	(1.122.331.552,00)
Laba (Rugi) tahun Berjalan	(1.122.331.552,00)	(940.904.900,00)	181.426.652,00
Jumlah Ekuitas	7.058.767.337,00	6.117.862.437,00	(940.904.900,00)

(2) PT Bank Riau Kepri

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Natuna di PT Bank Riau Kepri adalah sebesar Rp33.938.100.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.90 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada PT Bank Riau Kepri

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/Lembaga	Jumlah (Rp)
APBD 2003	Saham	PT Bank Riau Kepri	6.000.000.000,00
APBD 2006	Saham	PT Bank Riau Kepri	9.000.000.000,00
APBD 2010	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri	3.154.600.000,00
APBD 2017	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri	5.000.000.000,00
2017	Deviden Saham	PT Bank Riau Kepri	783.500.000,00
APBD 2018	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri	5.000.000.000,00
APBD 2019	Penyertaan Modal	PT Bank Riau Kepri	5.000.000.000,00
Total			33.938.100.000,00

Pada tahun 2020 tidak terdapat perubahan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna pada PT Bank Riau Kepri. Pencatatan penyertaan modal menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan di bawah 20%. Berdasarkan metode tersebut nilai penyertaan diakui sebesar Rp33.938.100.000,00. Nilai Penyertaan modal tersebut termasuk pembagian Deviden Saham pada Tahun 2017 oleh PT Bank Riau Kepri kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna sebesar Rp783.500.000,00.

(3) PT Riau Airlines

Persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Natuna di PT Riau Airlines adalah sebesar 5,19% dengan nilai penyertaan sebesar Rp9.500.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.91 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada PT Riau Airlines

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/Lembaga	Jumlah
APBD 2001	Saham	PT Riau Air Lines	1.500.000.000,00
APBD 2007	Saham	PT Riau Air Lines	8.000.000.000,00
Total			9.500.000.000,00

Pada tahun 2019 tidak terdapat perubahan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna pada PT Riau Airlines. Pencatatan penyertaan modal menggunakan metode biaya karena persentase kepemilikan hanya sebesar 5,19% berdasarkan metode tersebut nilai penyertaan diakui sebesar Rp9.500.000.000,00.

(4) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa

Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa (PDAM Tirta Nusa) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pendirian PDAM. PDAM Tirta Nusa dimiliki sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Natuna (100%) dengan nilai penyetoran modal sebesar Rp24.444.169.005,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.92 Rekapitulasi Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Nusa

(dalam rupiah)

Dasar Hukum	Bentuk Investasi	Nama Badan/ Lembaga	Jumlah
APBD 2004	Modal Awal	PDAM Tirta Nusa	3.326.337.005,00
APBD 2009	Modal Donasi	PDAM Tirta Nusa	617.842.000,00
APBD 2010	Penyertaan Modal	PDAM Tirta Nusa	15.000.000.000,00
APBD 2013	Modal Donasi	PDAM Tirta Nusa	1.500.000.000,00
APBD 2014	Modal Donasi	PDAM Tirta Nusa	499.990.000,00
APBD 2015	Penyertaan Modal	PDAM Tirta Nusa	3.500.000.000,00
Total			24.444.169.005,00

Sampai dengan tahun 2011 penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa disajikan dengan menggunakan metode biaya, namun mulai tahun 2012 menggunakan metode ekuitas karena persentase kepemilikan pemerintah adalah 100%. Sesuai Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Nusa tahun 2020 disajikan laba di tahun 2020 adalah sebesar Rp250.731.113,00. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna sampai dengan 2020 adalah sebesar Rp11.448.291.289,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.93 Rincian Perhitungan Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Nusa (Metode Ekuitas)

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah Penyertaan Modal 100% (Metode Ekuitas)		Penambahan/ (Pengurangan)
	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2020	
Modal Disetor	18.326.337.005,00	18.326.337.005,00	0,00
Modal Donasi	6.117.832.000,00	6.117.832.000,00	0,00
Modal Penyertaan	0,00	0,00	0,00
Laba (Rugi) Ditahan	(12.538.073.598,00)	(13.246.608.829,00)	(708.535.231,00)
Laba (Rugi) tahun Berjalan	(639.001.992,00)	250.731.113,00	889.733.105,00
Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
Jumlah Ekuitas	11.267.093.415,00	11.448.291.289,00	181.197.874,00

7.5.3.3 Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
	2.522.190.202.303,24	2.486.943.170.907,17

Nilai saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	3.885.035.685.718,24
Penambahan tahun 2020	250.620.085.120,58
Jumlah	4.135.655.770.838,82
Pengurangan tahun 2020	64.770.706.734,10
Aset Tetap per 31 Desember 2020	4.070.885.064.104,72
Penyusutan s/d tahun 2020	(1.548.694.861.801,48)
Nilai Buku per 31 Desember 2020	2.522.190.202.303,24

Aset tetap Pemerintah Kabupaten Natuna per 31 Desember 2020 tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap

lainnya, konstruksi dalam penggerjaan dan akumulasi penyusutan. Jenis dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.94 Rincian Aset Tetap

(dalam rupiah)

Jenis Aset	31 Desember 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Desember 2020
Tanah	330.685.625.828,00	7.995.432.899,00	2.711.074.117,50	335.969.984.609,50
Peralatan dan Mesin	392.542.250.800,36	42.016.840.683,66	7.792.648.378,80	426.766.443.105,22
Gedung dan Bangunan	1.184.987.172.158,23	113.498.227.531,51	21.114.319.332,15	1.277.371.080.357,59
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.821.659.808.361,89	68.899.658.853,36	9.499.707.642,59	1.881.059.759.572,66
Aset Tetap Lainnya	70.980.442.193,87	5.852.017.979,05	4.544.669.156,80	72.287.791.016,12
Konstruksi Dalam Penggerjaan	84.180.386.375,89	12.357.907.174,00	19.108.288.106,26	77.430.005.443,63
Nilai Aset	3.885.035.685.718,24	250.620.085.120,58	64.770.706.734,10	4.070.885.064.104,72
Akumulasi Penyusutan	(1.398.092.514.811,07)	(160.917.786.409,80)	(10.315.439.419,39)	(1.548.694.861.801,48)
Nilai Buku	2.486.943.170.907,17	89.702.298.710,78	54.455.267.314,71	2.522.190.202.303,24

Penambahan dan pengurangan nilai aset tetap disajikan sesuai dengan klasifikasi data aset pada dokumen administrasi penatausahaan barang milik daerah. Penyajian atas penyesuaian data pada dokumen administrasi penatausahaan barang milik daerah dilakukan koreksi pencatatan antar rincian objek aset tetap. Saldo dan mutasi dari masing-masing kelompok aset tetap per 31 Desember 2020 tersebut di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.3.3.1 Tanah

Perhitungan nilai tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2020 sebesar Rp335.969.984.609,50 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp 330.685.625.828,00
Penambahan TA 2020	Rp 7.995.432.899,00
Jumlah	Rp 338.681.058.727,00
Pengurangan TA 2020	Rp 2.711.074.117,50
Nilai Aset Tetap Tanah tahun 2020	Rp 335.969.984.609,50

Aset tetap berupa tanah senilai Rp335.969.984.609,50 tersebut terdiri 503 bidang tanah di antaranya 369 bidang tanah yang sudah bersertifikat, 134 bidang tanah yang belum bersertifikat dan masih dalam proses sertifikasi.

Aset tetap berupa tanah Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2020 senilai Rp335.969.984.609,50 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.95 Rincian Aset Tetap Tanah

(dalam rupiah)

Jenis	Saldo Akhir 2020
Tanah Kuburan	2.331.083.000,00
Tanah Perkebunan	11.299.146.500,00
Tambak	314.375.000,00
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	146.669.066.896,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	6.384.152.500,00
Tanah Untuk Bangunan Industri	109.723.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	98.514.314.587,12
Tanah Kosong	1.829.160.000,00
Tanah Lapangan Olah Raga	7.455.337.600,00
Tanah Lapangan Parkir	725.306.000,00
Tanah Lapangan Penimbun Barang	14.235.098.000,00
Tanah Untuk Bangunan Jalan	12.069.359.400,00
Tanah Untuk Bangunan Instalasi	843.452.000,00
Tanah Untuk Bangunan Jaringan	36.636.000,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	1.878.060.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	315.690.000,00
Lapangan Lainnya	12.551.609.526,38
Tanah Basah	416.812.600,00
Tanah Kering	8.340.041.000,00
Tanah Hutan	9.651.561.000,00
JUMLAH	335.969.984.609,50

Aset tetap berupa tanah mengalami peningkatan sebesar Rp5.284.358.781,50 dari tahun 2019 sebesar Rp330.685.625.828,00 menjadi Rp335.969.984.609,50. Peningkatan nilai aset tanah tahun 2020 terdiri dari:

Tabel 7.5.96 Rincian Penambahan dan Pengurangan Nilai Aset Tanah

(dalam rupiah)

Jenis	Saldo Awal 2019	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2020
		Penambahan tahun 2020	Koreksi Pencatatan	Pengurangan tahun 2020	Koreksi Pencatatan	
Tanah Kuburan	2.211.230.000,00	119.853.000,00	0,00	0,00	0,00	2.331.083.000,00
Tanah Perkebunan	11.299.146.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299.146.500,00
Hutan Untuk Penggunaan Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tambak	0,00	314.375.000,00	0,00	0,00	0,00	314.375.000,00
Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	145.894.066.896,00	0,00	775.000.000,00	0,00	0,00	146.669.066.896,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	6.384.152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384.152.500,00
Tanah Untuk Bangunan Industri	109.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.723.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	98.068.021.805,62	712.407.200,00	0,00	266.114.418,50	0,00	98.514.314.587,12
Tanah Kosong	0,00	1.829.160.000,00	0,00	0,00	0,00	1.829.160.000,00
Tanah Lapangan Olah Raga	7.455.337.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.455.337.600,00
Tanah Lapangan Parkir	725.306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.306.000,00
Tanah Lapangan Penimbun Barang	14.235.098.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.235.098.000,00
Tanah Untuk Bangunan Jalan	9.389.156.400,00	3.333.262.699,00	0,00	653.059.699,00	0,00	12.069.359.400,00
Tanah Untuk Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Instalasi	843.452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.452.000,00
Tanah Untuk Bangunan Jaringan	6.228.000,00	30.408.000,00	0,00	0,00	0,00	36.636.000,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga	1.008.560.000,00	869.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.878.060.000,00
Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	315.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.690.000,00
Lapangan Lainnya	12.551.609.526,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.551.609.526,38
Tanah Basah	405.345.600,00	11.467.000,00	0,00	0,00	0,00	416.812.600,00
Tanah Kering	10.131.941.000,00	0,00	0,00	1.791.900.000,00	0,00	8.340.041.000,00
Tanah Hutan	9.651.561.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.651.561.000,00
JUMLAH	330.685.625.828,00	7.220.432.899,00	775.000.000,00	2.711.074.117,50	0,00	335.969.984.609,50

Penambahan bersih nilai tanah sebesar Rp7.220.432.899,00 pada tabel di atas berasal dari:

Belanja Modal Tanah tahun 2020	Rp 7.081.073.899,00
Utang Belanja Modal Tahun 2020	Rp 139.359.000,00
Jumlah	Rp 7.220.432.899,00

Pengadaan tanah pada tahun anggaran 2020 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.444.959.699,00 dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp4.636.114.200,00. Sehingga harga perolehan tanah pada tahun 2020 adalah sebesar Rp7.081.073.899,00.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Natuna memiliki utang belanja modal tanah yang diakui sebagai aset tetap tanah sebesar Rp139.359.000,00 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Selain Penambahan di atas, terdapat penambahan dari koreksi pencatatan atas tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal perumahan pegawai pemerintah Daerah yang belum tercatat pada tahun sebelumnya sebesar Rp775.000.000,00.

Pengurangan nilai tanah Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2020 sebesar Rp2.711.074.117,50 terdiri dari:

Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 2.444.959.699,00
Koreksi Pencatatan Tahun sebelumnya	Rp 266.114.418,50
Jumlah	Rp 2.711.074.117,50

Reklasifikasi aset tetap tanah ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp2.444.959.699,00 terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kemudian terdapat kesalahan pencatatan nilai *appraisal* tahun 2019 sehingga dikoreksi di tahun 2020 sebesar Rp266.114.418,50. Aset tetap tanah berada pada SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.97 Rincian Aset Tanah per SKPD

(dalam rupiah)

NO	NAMA SKPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	68.691.029.366,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.971.710.000,00
3	Dinas Kesehatan	4.159.390.000,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	478.480.800,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.962.100.000,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	43.510.909.700,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.466.795.000,00
8	Dinas Perhubungan	1.809.840.450,00
9	Dinas Perikanan	2.190.131.000,00
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.794.800.000,00
11	Dinas Pertanian	3.899.433.000,00
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	142.357.500,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.239.190.679,50
14	Sekretariat Daerah	186.585.679.306,38
15	Kecamatan Bunguran Timur	3.462.781.000,00
16	Kecamatan Bunguran Barat	257.000.000,00
17	Kecamatan Bunguran Utara	341.400.000,00
18	Kecamatan Pulau Laut	168.000.000,00
19	Kecamatan Midai	131.400.000,00
20	Kecamatan Serasan	76.600.000,00
21	Kecamatan Subi	280.200.000,00
22	Kecamatan Pulau Tiga	558.207.000,00
23	Kecamatan Bunguran Tengah	131.670.807,62
24	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.434.229.000,00
25	Kecamatan Serasan Timur	226.650.000,00
JUMLAH		335.969.984.609,50

7.5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

Perhitungan nilai peralatan dan mesin sebesar Rp426.766.443.105,22 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp 392.542.250.800,36
Penambahan Tahun 2020	Rp 42.016.840.683,66
Jumlah	Rp 434.559.091.484,02
Pengurangan Tahun 2020	Rp 7.792.648.378,80
Nilai Aset Tetap Tahun 2020	Rp 426.766.443.105,22

Jumlah tersebut merupakan aset tetap peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.98 Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Dalam Rupiah

No	Uraian	Saldo Akhir 2019	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2020
			Penambahan 2020	Koreksi Pencatatatan	Pengurangan 2020	Koreksi Pencatatatan	
1	Alat-Alat Besar Darat	1.070.409.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.409.175,00
2	Alat-alat Bantu	1.014.042.248,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.016.542.248,00
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	77.580.902.710,67	3.344.918.100,00	0,00	5.115.635.195,00	0,00	75.810.185.615,67
4	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	664.740.000,00	199.540.000,00	0,00	0,00	0,00	864.280.000,00
5	Alat Angkut Apung Bermotor	42.802.700.450,00	2.549.841.760,00	0,00	63.360.000,00	0,00	45.289.182.210,00
6	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	169.924.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.924.900,00
7	Alat Bengkel Bermesin	2.378.002.150,00	16.549.400,00	0,00	0,00	0,00	2.394.551.550,00
8	Alat Bengkel Tak Bermesin	145.672.483,00	23.060.000,00	0,00	0,00	0,00	168.732.483,00
9	Alat Ukur	1.645.447.784,01	0,00	0,00	104.011.856,01	0,00	1.541.435.928,00
10	Alat Pengolahan	5.534.144.568,00	0,00	0,00	14.500.500,00	0,00	5.519.644.068,00
11	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpanan	5.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780.000,00
12	Alat Kantor	16.717.767.789,85	2.651.155.302,00	0,00	128.663.400,00	0,00	19.240.259.691,85
13	Alat Rumah Tangga	55.103.272.960,00	6.733.247.286,80	0,00	1.837.624.908,80	0,00	59.998.895.338,00
14	Komputer	37.467.609.686,21	8.744.169.964,00	0,00	16.580.850,00	0,00	46.195.198.800,21
15	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	16.677.076.042,07	1.806.428.315,00	0,00	164.226.000,00	0,00	18.319.278.357,07
16	Alat Studio	8.252.257.613,00	585.296.936,00	0,00	0,00	0,00	8.837.554.549,00
17	Alat Komunikasi	1.731.604.350,00	283.409.000,00	0,00	0,00	0,00	2.015.013.350,00
18	Peralatan Pemancar	5.322.811.370,00	0,00	0,00	13.398.000,00	0,00	5.309.413.370,00
19	Alat Kedokteran	86.287.377.419,05	13.904.566.919,70	0,00	269.398.663,99	0,00	99.922.545.674,76
20	Alat Kesehatan	6.895.176.683,50	0,00	0,00	50.324.005,00	0,00	6.844.852.678,50
21	Unit-Unit Laboratorium	7.249.403.285,20	439.690.200,00	0,00	0,00	0,00	7.689.093.485,20
22	Alat Peraga/Praaktek Sekolah	8.795.735.578,00	2.059.000,00	0,00	0,00	0,00	8.797.794.578,00
23	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	118.169.000,00	18.174.300,00	0,00	0,00	0,00	136.343.300,00

No	Uraian	Saldo Akhir 2019	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2020
			Penambahan 2020	Koreksi Pencatatatan	Pengurangan 2020	Koreksi Pencatatatan	
24	Alat Laboratorium Fisika Nukir / Elektronika	54.535.300,00	108.151.856,00	0,00	0,00	0,00	162.687.156,00
25	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	14.925.000,00	0,00	0,00	14.925.000,00	0,00	0,00
26	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	197.988.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.988.666,00
27	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	912.200.517,59	0,01	0,00	0,00	0,00	912.200.517,60
28	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	8.215.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215.625,00
29	Senjata Api	0,00	29.319.000,00	0,00	0,00	0,00	29.319.000,00
30	Alat Keamanan dan Perlindungan	23.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800.000,00
31	Alat SAR	150.552.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.552.500,00
32	Peralatan Olah Raga	290.066.760,00	46.308.000,00	0,00	0,00	0,00	336.374.760,00
33	Rambu-rambu	7.259.938.186,21	528.455.344,15	0,00	0,00	0,00	7.788.393.530,36
Jumlah		392.542.250.800,36	42.016.840.683,66	0,00	7.792.648.378,80	0,00	426.766.443.105,22

Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2020 terdiri dari:

Belanja Modal Tahun 2020	Rp	26.843.918.763,00
Penambahan Utang Belanja	Rp	2.993.412.400,00
Reklasifikasi dari Beban Perlengkapan	Rp	185.391.000,00
Reklasifikasi dari Persediaan	Rp	122.803.000,00
Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan	Rp	315.810.000,00
Reklasifikasi dari Beban Luar Biasa Lainnya	Rp	4.495.466.924,00
Reklasifikasi dari Beban Atribut	Rp	34.870.000,00
Reklasifikasi dari Beban Jasa paket/pengiriman	Rp	8.150.000,00
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp	660.915.344,15
Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	Rp	4.544.669.156,80
Pendapatan Hibah	Rp	1.811.434.095,71
Jumlah	Rp	42.016.840.683,66

Pengurangan Aset Peralatan dan Mesin Tahun 2020 terdiri dari:

Penghapusan Aset	Rp	2.930.153.000,00
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	Rp	646.963.995,00
Reklasifikasi ke Aset <i>Ekstrakomptable</i>	Rp	1.847.700.788,80
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	63.360.000,00
Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	2.304.470.595,00
Jumlah	Rp	7.792.648.378,80

Penghapusan aset sebesar Rp2.930.153.000,00 merupakan penghapusan aset peralatan dan mesin dari Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna yaitu berupa Kendaraan Dinas Operasional dengan cara dilelang dan dihibahkan ke Kejaksaan Negeri Natuna. Saldo aset tetap peralatan dan mesin per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp426.766.443.105,22 yang berada pada:

Tabel 7.5.99 Daftar Peralatan dan Mesin Per SKPD

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	51.103.756.837,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.196.048.300,00
3	Dinas Kesehatan	50.846.745.302,11
4	Rumah Sakit Umum Daerah	100.419.577.525,72
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.399.352.924,00
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	13.846.937.790,67
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	1.128.368.100,00
8	Satuan Polisi Pamong Praja	1.993.114.875,00
9	Dinas Pemadam Kebakaran	5.448.861.424,00

No	SKPD	Jumlah
10	Dinas Sosial	466.157.215,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.824.291.500,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.861.659.025,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	1.375.392.150,00
14	Dinas Lingkungan Hidup	5.005.004.833,00
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.189.248.900,00
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.052.055.934,89
17	Dinas Perhubungan	21.467.876.795,36
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.517.437.446,66
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.238.521.102,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.538.981.263,97
21	Dinas Perikanan	15.981.660.278,74
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.891.379.914,00
23	Dinas Pertanian	7.137.423.862,10
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	3.732.195.960,00
25	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	3.555.386.290,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.658.995.800,00
27	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	1.609.340.820,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.782.817.001,00
29	Sekretariat Daerah	62.790.742.728,00
30	Sekretariat DPRD	17.204.578.467,00
31	Inspektorat	1.928.725.450,00
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	3.369.831.850,00
33	Kecamatan Bunguran Timur	1.638.111.718,00
34	Kecamatan Bunguran Barat	1.010.155.712,00
35	Kecamatan Bunguran Utara	1.203.642.868,00
36	Kecamatan Pulau Laut	2.996.106.496,00
37	Kecamatan Midai	1.484.809.918,00
38	Kecamatan Serasan	2.129.643.515,00
39	Kecamatan Subi	1.965.236.218,00
40	Kecamatan Pulau Tiga	1.105.245.468,00
41	Kecamatan Bunguran Tengah	646.744.248,00
42	Kecamatan Bunguran Timur Laut	588.086.771,00
43	Kecamatan Bunguran Selatan	590.568.184,00
44	Kecamatan Serasan Timur	1.409.818.324,00
45	Kecamatan Suak Midai	311.269.500,00
46	Kecamatan Bunguran Batubi	581.836.000,00
47	Kecamatan Pulau Tiga Barat	542.700.500,00
Jumlah		426.766.443.105,22

Dari jumlah aset peralatan dan mesin Rp426.765.743.105,22 terdapat pencatatan ganda atas aset tetap peralatan dan mesin berupa Kendaraan Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Sosial senilai Rp711.349.400,00. Sampai diterbitkannya Laporan keuangan ini, belum dilakukan koreksi atas aset tersebut menunggu sampai dengan terdapat dokumen penetapan (SK Mutasi) yang menetapkan OPD definitif yang mencatat aset tersebut.

Dari jumlah aset peralatan dan mesin sebesar Rp426.765.743.105,22 juga terdapat aset yang masa manfaatnya sudah habis dan mempunyai nilai buku dengan nilai Rp0,00 sebanyak 19.989 unit aset yang masih digunakan dalam operasional Pemerintah Daerah.

7.5.3.3 Gedung dan Bangunan

Perhitungan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp1.277.371.080.357,59 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp 1.184.987.172.158,23
Penambahan tahun 2020	Rp 113.498.227.531,51
Jumlah	Rp 1.298.485.399.689,74
Pengurangan tahun 2020	Rp 21.114.319.332,15
Saldo per 31 Desember 2020	Rp 1.277.371.080.357,59

Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.100 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

(dalam rupiah)

No	Gedung dan Bangunan	Saldo Per		Penambahan tahunan 2020	Koreksi pencatatan	Pengurangan		Saldo Per
		31 Desember 2019	Penambahan tahunan 2020			Pengurangan tahunan 2020	Koreksi pencatatan	
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	951.876.476.444,38	101.116.854.040,61	0,00	20.585.863.988,00	0,00	1.032.407.466.496,99	
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	175.044.776.061,15	3.572.407.673,47	4.978.737.200,00	0,00	0,00	183.595.920.934,62	
3	Bangunan Menara	23.482.106.950,02	335.232.972,58	0,00	0,00	0,00	23.817.339.922,60	
4	Bangunan Bersejarah	1.203.191.000,00	613.959.702,00	0,00	0,00	0,00	1.817.150.702,00	
5	Tugu Peringatan	281.279.000,42	0,00	0,00	0,42	0,00	281.279.000,00	
6	Candi	90.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000.000,00	
7	Tugu Titik Kontrol	33.009.342.702,26	2.352.580.599,12	0,00	0,00	0,00	35.361.923.301,38	
8	Rambu-Rambu	0,00	528.455.343,73	0,00	528.455.343,73	0,00	0,00	
9	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Jumlah		1.184.987.172.158,23	108.519.490.331,51	4.978.737.200,00	21.114.319.332,15	0,00	1.277.371.080.357,59	

Penambahan nilai aset gedung dan bangunan sebesar Rp113.498.227.531,51 terdiri dari:

Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	78.647.132.575,66
Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	Rp	646.963.995,00
Reklasifikasi dari Beban Luar Biasa Lainnya	Rp	305.210.000,00
Reklasifikasi dari Beban Pemeliharaan Gedung	Rp	5.729.346.730,00
Reklasifikasi dari Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp	1.159.145.940,59
Reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp	18.234.017.632,26
Koreksi Pencatatan	Rp	4.978.737.200,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	3.797.673.458,00
Jumlah	Rp	113.498.227.531,51

Di tahun 2020 belanja modal Gedung dan bangunan di Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp78.647.132.575,66 berasal dari SKPD:

Dinas Pendidikan	Rp	13.732.742.697,73
Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp	159.416.578,00
Dinas Kesehatan	Rp	11.462.555.971,79
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	966.747.701,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp	49.210.180.133,00
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Rp	172.841.201,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Rp	1.220.438.512,00
Dinas Perhubungan	Rp	888.114.965,14
Sekretariat DPRD	Rp	146.694.816,00
Kecamatan Bunguran Timur	Rp	337.400.000,00
Kecamatan Midai	Rp	350.000.000,00
Jumlah	Rp	78.647.132.575,66

Terjadi reclasifikasi tambah aset tetap Gedung dan bangunan sebesar Rp7.840.666.665,59 di antaranya reclasifikasi dari peralatan dan mesin sebesar Rp646.963.995,00, reclasifikasi dari beban luar biasa lainnya yang merupakan belanja tidak terduga di tahun 2020 sebesar Rp305.210.000,00 pada SKPD Rumah Sakit Umum Daerah, reclasifikasi dari beban pemeliharaan Gedung sebesar Rp5.729.346.730,00 dan reclasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.159.145.940,59, reclasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp18.234.017.632,26 serta koreksi pencatatan yang belum tercatat sebesar Rp4.978.737.200,00. Kemudian di tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Natuna mempunyai utang belanja modal Gedung dan bangunan sebesar Rp3.797.673.458,00.

Pengurangan nilai gedung dan bangunan sebesar Rp21.114.319.332,15 terdiri dari:

Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan	Rp	11.200.923.846,00
Reklasifikasi ke <i>Ekstrakomptable</i>	Rp	38.935.825,00

Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	Rp 660.915.344,15
Reklasifikasi ke Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 1.271.122.283,00
Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	Rp 196.438.000,00
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 7.745.984.034,00
Jumlah	Rp 21.114.319.332,15

Penghapusan aset Gedung dan bangunan sebesar Rp11.200.923.846,00 berdasarkan SK Penghapusan Nomor 79 Tahun 2020 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan SK Nomor 283 Tahun 2020 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro. Jumlah reklasifikasi kurang gedung dan bangunan di tahun 2020 sebesar Rp9.913.395.486,15.

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.277.371.080.357,59 yang berada pada:

Tabel 7.5.101 Rincian Gedung dan Bangunan per SKPD

No	SKPD	(dalam rupiah)
1	Dinas Pendidikan	357.482.898.464,07
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.597.203.766,00
3	Dinas Kesehatan	83.197.822.066,55
4	Rumah Sakit Umum Daerah	47.521.384.961,88
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.172.558.601,42
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	541.281.999.104,90
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.271.940.805,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.220.438.512,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	228.808.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	2.327.008.697,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	99.944.000,00
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.018.800.000,00
13	Dinas Perhubungan	42.269.830.713,57
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.410.000.000,00
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.107.759.300,00
16	Dinas Perikanan	21.861.490.061,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.497.090.012,00
18	Dinas Pertanian	7.730.038.130,00
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	12.086.153.693,02
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.907.072.179,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.422.537.200,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.450.000,00
23	Sekretariat Daerah	40.094.933.551,00
24	Sekretariat DPRD	34.744.486.269,00
25	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.182.548.000,00
26	Kecamatan Bunguran Timur	3.895.681.650,00
27	Kecamatan Bunguran Barat	5.396.477.654,00
28	Kecamatan Bunguran Utara	3.443.004.000,00
29	Kecamatan Pulau Laut	1.526.625.000,00
30	Kecamatan Midai	2.740.025.000,00
31	Kecamatan Serasan	2.014.167.000,00
32	Kecamatan Subi	3.541.525.000,00
33	Kecamatan Pulau Tiga	5.129.866.511,60
34	Kecamatan Bunguran Tengah	2.013.281.454,58
35	Kecamatan Bunguran Timur Laut	4.314.650.000,00
36	Kecamatan Bunguran Selatan	1.275.870.000,00
37	Kecamatan Serasan Timur	2.139.836.000,00
38	Kecamatan Bunguran Batubi	3.161.875.000,00
	Jumlah	1.277.371.080.357,59

7.5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Perhitungan nilai jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp1.881.059.759.572,66 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp 1.821.659.808.361,89
Penambahan Tahun 2020	Rp 68.899.658.853,36
Jumlah	Rp 1.890.559.467.215,25
Pengurangan Tahun 2020	Rp 9.499.707.642,59
Saldo Akhir per 31 Desember 2020	Rp 1.881.059.759.572,66

Jumlah tersebut merupakan rincian aset jalan, irigasi dan jaringan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.102 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan

(dalam rupiah)

Jenis	Saldo Awal 2020	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2020
		Penambahan tahun 2020	Koreksi Pencatatan	Pengurangan tahun 2020	Koreksi Pencatatan	
Jalan	1.256.664.937.812,21	41.737.242.688,48	0,00	3.223.017.837,71	0,00	1.295.179.162.662,98
Jembatan	253.801.768.154,67	108.197.809,00	0,00	100.365.500,00	0,00	253.809.600.463,67
Bangunan Air Irigasi	26.977.794.567,29	0,00	0,00	95.882.866,29	0,00	26.881.911.701,00
Bangunan Air Pasang Surut	221.340.000,00	99.779.900,00	0,00	0,00	0,00	321.119.900,00
Bangunan Air Rawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bangunan Pengaman						
Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	93.489.237.803,26	7.444.611.258,29	0,00	149.616.500,00	0,00	100.784.232.561,55
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	11.484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.484.000,00
Bangunan Air Bersih/Baku	11.045.237.957,00	8.934.750,00	0,00	8.934.750,00	0,00	11.045.237.957,00
Bangunan Air Kotor	35.911.114.859,00	14.262.529.538,00	0,00	0,00	0,00	50.173.644.397,00
Bangunan Air	0,00	1.159.145.940,59	0,00	1.159.145.940,59	0,00	0,00
Instalasi Air Minum Bersih	86.134.827.816,00	3.535.375.635,00	0,00	4.543.665.000,00	3.000.000,00	85.123.538.451,00
Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	3.421.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421.200.000,00
Instalasi Pembangkit Listrik	17.063.133.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.063.133.138,00
Instalasi Gardu Listrik	2.171.245.610,28	37.076.326,00	0,00	216.079.248,00	0,00	1.992.242.688,28
Jaringan Air Mirum	4.614.732.284,00	12.383.000,00	0,00	0,00	0,00	4.627.115.284,00
Jaringan Listrik	6.687.417.627,90	494.382.008,00	0,00	0,00	0,00	7.181.799.635,90
Jaringan Telepon	181.999.042,28	0,00	0,00	0,00	0,00	181.999.042,28
Jaringan Gas	23.262.337.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.262.337.690,00
JUMLAH	1.821.659.808.361,89	68.899.658.853,36	0,00	9.496.707.642,59	3.000.000,00	1.881.059.759.572,66

Penambahan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp68.899.658.853,36 terdiri dari:

Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 52.918.743.156,59
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 11.976.441.150,77
Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	Rp 2.444.959.699,00
Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp 1.271.122.283,00
Reklasifikasi dari Konstruksi dalam pengerjaan	Rp 279.392.564,00
Reklasifikasi dari Beban Alat Perlengkapan	Rp 9.000.000,00
Jumlah	Rp 68.899.658.853,36

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Natuna pada tahun 2020 sebesar Rp52.918.743.156,59 berasal dari:

Dinas Pendidikan	Rp 11.517.000,00
Dinas Kesehatan	Rp 1.048.340.589,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp 24.839.900.009,00
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Rp 25.146.864.618,00
Dinas Perhubungan	Rp 1.159.145.940,59
Sekretariat Daerah	Rp 40.975.000,00
Kecamatan Bunguran Timur	Rp 672.000.000,00
Jumlah	Rp 52.918.743.156,59

Pemerintah Kabupaten Natuna mencatat utang belanja modal jalan, irigasi dan jaringan di tahun 2020 sebesar Rp11.976.441.150,77 dan nilai tersebut diakui sebagai penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan.

Jumlah reklasifikasi tambah ke aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp3.725.081.982,00 di antaranya reklasifikasi dari aset tetap tanah sebesar Rp2.444.959.699,00, reklasifikasi dari aset tetap Gedung dan bangunan sebesar Rp1.271.122.283,00 dan reklasifikasi dari beban alat perlengkapan sebesar

Rp9.000.000,00. Kemudian Reklasifikasi dari Kontruksi dalam pengeraan sebesar Rp279.392.564,00.

Pengurangan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp9.499.707.642,59 terdiri dari:

Penghapusan Aset	Rp 5.036.655.500,00
Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	Rp 1.159.145.940,59
Koreksi Pencatatan	Rp 3.000.000,00
Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengeraan	Rp 3.300.906.202,00
Jumlah	Rp 9.499.707.642,59

Penghapusan nilai aset jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2020 sebesar Rp5.036.655.500,00 terdiri dari:

- SK Nomor 295 Tahun 2020 tentang Penghapusan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp2.612.460.000,00;
- SK Nomor 283 Tahun 2020 tentang Penghapusan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp100.365.500,00.
- SK Nomor 279 Tahun 2020 tentang Penghapusan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp2.323.830.000,00.

Jumlah reklasifikasi dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp4.460.052.142,59, divantaranya reklasifikasi ke aset tetap gedung dan bangunan sebesar Rp1.159.145.940,59 dan reklasifikasi ke konstruksi dalam pengeraan sebesar Rp3.300.906.202,00. Kemudian koreksi pencatatan sebesar Rp3.000.000,00 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro.

Sehingga saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.881.059.759.572,66 yang berada pada:

Tabel 7.5.103 Rincian Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

NO	SKPD	(dalam rupiah)
1	Dinas Pendidikan	3.744.607.579,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	448.334.495,00
3	Dinas Kesehatan	5.586.825.564,00
4	Rumah Sakit Umum Daerah	3.437.683.056,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.442.002.587.860,34
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	323.430.470.047,80
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	321.047.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	623.600.000,00
9	Dinas Perhubungan	51.034.370.291,22
10	Dinas Perikanan	24.499.808.331,00
11	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	8.688.299.082,30
12	Dinas Pertanian	1.998.568.966,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	9.000.000,00
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	35.174.000,00
15	Sekretariat Daerah	1.185.361.100,00
16	Sekretariat DPRD	88.987.000,00
17	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	11.083.344.000,00
18	Kecamatan Bunguran Timur	2.161.272.200,00
19	Kecamatan Midai	185.000.000,00
20	Kecamatan Serasan	389.159.000,00
21	Kecamatan Pulau Tiga	106.260.000,00
	Jumlah	1.881.059.759.572,66

7.5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya

Perhitungan aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2020 sebesar Rp72.287.791.016,12 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp 70.980.442.193,87
Penambahan Tahun 2020	Rp 5.852.017.979,05

Jumlah	Rp 76.832.460.172,92
Pengurangan Tahun 2020	Rp 4.544.669.156,80
Nilai Aset Tetap Lainnya Tahun 2020	Rp 72.287.791.016,12

Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap lainnya milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.104 Rincian Aset Tetap Lainnya

(dalam rupiah)

Jenis	Saldo Awal 2019	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2020
		Penambahan tahun 2020	Koreksi Pencatatan	Pengurangan tahun 2020	Koreksi Pencatatan	
Buku	35.744.431.777,87	3.592.427.669,05	0,00	2.557.993.126,60	0,00	36.778.866.320,32
Terbitan	57.599.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.599.030,00
Barang-Barang Perpustakaan	231.610.250,00	2.247.790.310,00	0,00	0,00	0,00	2.479.400.560,00
Barang Bercorak Kebudayaan	2.201.973.278,00	11.800.000,00	0,00	1.986.676.030,20	0,00	227.097.247,80
Alat Olah Raga Lainnya	350.319.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.319.975,00
Hewan	93.527.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.527.273,00
Tanaman	5.449.868.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449.868.925,00
Aset Tetap Renovasi	26.851.111.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.851.111.685,00
Jumlah	70.980.442.193,87	5.852.017.979,05	0,00	4.544.669.156,80	0,00	72.287.791.016,12

Penambahan nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp5.852.017.979,05 terdiri dari:

Belanja Modal tahun 2020	Rp 5.650.827.888,00
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	Rp 4.752.091,05
Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp 196.438.000,00
Jumlah	Rp 5.852.017.979,05

Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2020 sebesar Rp5.650.827.888,00 yang berada pada:

Dinas Pendidikan	Rp 5.649.795.888,00
Badan Pengelola Perbatasan Daerah	Rp 1.032.000,00
Jumlah	Rp 5.650.827.888,00

Koreksi pencatatan tahun sebelumnya sebesar Rp4.752.091,05 berasal dari kurang catat Dana BOS tahun 2019 pada Dinas Pendidikan. Kemudian reklasifikasi dari gedung dan bangunan sebesar Rp196.438.000,00.

Pengurangan nilai aset tetap lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp4.544.669.156,80 berasal dari reklasifikasi ke peralatan dan mesin yang berasal dari belanja dana BOS pada Dinas Pendidikan.

Sehingga saldo aset tetap lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp72.287.791.016,12 yang berada pada:

Tabel 7.5.105 Rincian Aset Tetap Lainnya per SKPD

(dalam rupiah)

NO	SKPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	46.759.608.525,12
2	Dinas Kesehatan	64.486.700,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	18.690.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	20.139.133.885,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	35.750.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.650.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	3.500.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	344.450.000,00
9	Dinas Perhubungan	76.000.300,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.687.748.430,00
11	Dinas Perikanan	203.500.000,00
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	176.179.778,00
13	Dinas Pertanian	640.999.898,00
14	Sekretariat Daerah	54.465.000,00
15	Sekretariat DPRD	1.050.389.000,00
16	Inspektorat	3.500.000,00
17	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	4.869.500,00
18	Kecamatan Bunguran Timur Laut	3.870.000,00

NO	SKPD	JUMLAH
19	Kecamatan Bunguran Selatan	3.000.000,00
	JUMLAH	72.287.791.016,12

7.5.3.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Perhitungan Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp77.430.005.443,63 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp 84.180.386.375,89
Penambahan tahun 2020	Rp 12.357.907.174,00
Jumlah	Rp 96.538.293.549,89
Pengurangan tahun 2020	Rp 19.108.288.106,26
Nilai Aset Tetap Tahun 2020	Rp 77.430.005.443,63

Jumlah tersebut merupakan rincian aset tetap konstruksi dalam pengerjaan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari

Tabel 7.5.106 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam rupiah)

Jenis	Saldo Awal 2019	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2020
		Penambahan tahun 2020	Koreksi Pencatatan	Pengurangan tahun 2020	Koreksi Pencatatan	
Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	29.624.572.529,89	8.508.289.664,00	0,00	18.828.895.542,26	0,00	19.303.966.651,63
Konstruksi Dalam Pengerjaan – Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.754.546.181,00	3.699.786.510,00	0,00	279.392.564,00	0,00	7.174.940.127,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	50.801.267.665,00	63.360.000,00	0,00	0,00	0,00	50.864.627.665,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tanah	0,00	86.471.000,00	0,00	0,00	0,00	86.471.000,00
Jumlah	84.180.386.375,89	12.357.907.174,00	0,00	19.108.288.106,26	0,00	77.430.005.443,63

Penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp12.357.907.174,00 terdiri dari:

Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	Rp 7.695.289.434,00
Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 1.064.395.750,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 63.360.000,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 836.935.330,00
Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 2.611.455.660,00
Utang Belanja Modal Tanah	Rp 86.471.000,00
Jumlah	Rp 12.357.907.174,00

Penambahan Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp7.695.289.434,00 terjadi pada:

1. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Dinas Perhubungan sebesar Rp174.802.100,00;
2. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp6.993.995.434,00;
3. Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan sebesar Rp49.350.400,00;
4. Reklasifikasi dari gedung dan bangunan Dinas Pendidikan sebesar Rp477.141.500,00.

Penambahan Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.064.395.750,00 terjadi pada:

1. Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp50.694.600,00;
2. Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp1.002.184.150,00;
3. Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pendidikan sebesar Rp11.517.000,00.

Penambahan Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp63.360.000,00 terjadi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Penambahan dari utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan di tahun 2020 sebesar Rp836.935.330,00. Penambahan dari utang belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.611.455.660,00 terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penambahan dari utang belanja modal tanah sebesar Rp86.471.000,00 terjadi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Pengurangan nilai konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp19.108.288.106,26 terjadi pada:

1. Reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar Rp594.877.910,00;
2. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp15.546.089.072,34 ;
3. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.513.296.559,92 ;
4. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp174.632.000,00;
5. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp250.209.564,00;
6. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan sebesar Rp29.183.000,00.

Sehingga saldo Konstruksi dalam pengerjaan Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp77.430.005.443,63 yang berada pada:

Tabel 7.5.107 Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per SKPD

NO	SKPD	Jumlah (dalam rupiah)
1	Dinas Pendidikan	1.288.062.300,00
2	Dinas Kesehatan	8.355.724.390,63
3	Rumah Sakit Umum Daerah	68.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.411.792.108,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	56.104.122.419,00
6	Dinas Perhubungan	3.552.071.676,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	47.927.000,00
8	Dinas Perikanan	54.140.000,00
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	455.475.550,00
10	Sekretariat Daerah	92.690.000,00
JUMLAH		77.430.005.443,63

Aset-aset tetap sebagaimana dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan ini adalah aset-aset mempunyai nilai batasan kapitalisasi yang diatur dalam kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yaitu untuk peralatan dan mesin mempunyai nilai minimal Rp1.000.000,00 dan pada gedung dan bangunan Rp10.000.000,00.

7.5.3.3.6 Akumulasi Penyusutan

Perhitungan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp(1.548.694.861.801,48) adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp	1.398.092.514.811,07
Penambahan Tahun 2020	Rp	160.917.786.409,80
Jumlah	Rp	1.559.010.301.220,87
Pengurangan Tahun 2020	Rp	10.315.439.419,39
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	1.548.694.861.801,48

Jumlah tersebut merupakan rincian Akumulasi Penyusutan milik Pemerintah Kabupaten Natuna yang terdiri dari:

Tabel 7.5.108 Rincian Akumulasi Penyusutan

(dalam rupiah)

Jenis	Saldo Awal 2019	Penambahan		Pengurangan		Saldo Akhir 2020
		Penambahan Tahun 2020	Koreksi Pencatatan	Pengurangan Tahun 2020	Koreksi Pencatatatan	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	286.991.398.123,49	31.376.929.120,86	0,00	5.246.972.971,67	0,00	313.121.354.272,68
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	475.604.918.227,02	27.181.091.919,05	0,00	3.433.469.920,70	0,00	199.352.540.225,37
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	935.496.198.460,56	102.359.765.369,89	0,00	1.634.996.527,02	0,00	1.036.220.967.303,43
Jumlah	1.398.092.514.811,07	160.917.786.409,80	0,00	10.315.439.419,39	0,00	1.548.694.861.801,48

Penambahan akumulasi Penyusutan sebesar Rp160.917.786.409,80 sedangkan untuk pengurangan akumulasi Penyusutan sebesar Rp10.315.439.419,39 dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penghapusan Peralatan dan Mesin	5.246.972.971,67
Akumulasi Penghapusan Gedung dan Bangunan	3.433.469.920,70
Akumulasi Penghapusan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.634.996.527,02
Jumlah	10.315.439.419,39

7.5.3.3.7 Aset-aset *Ekstrakomptable*

Aset-aset yang nilai perolehannya di bawah nilai kapitalisasi aset tetap dan aset yang tidak diyakini keberadaannya sesuai yang ditetapkan dalam kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disajikan sebagai Aset *ekstrakomptable*. Aset *ekstrakomptable* tetap disajikan dalam Dokumen penatausahaan Barang Milik Daerah tetapi tidak disajikan di neraca Pemerintah. Aset *ekstrakomptable* untuk Peralatan dan mesin adalah dengan nilai di bawah Rp1.000.000,00, sedangkan untuk gedung dan bangunan dengan nilai di bawah Rp10.000.000,00.

Aset *ekstrakomptable* peralatan dan mesin sebesar Rp114.928.717.824,73 disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7.5.109 Aset *Ekstrakomptable* Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	64.706.685.417,00	4.178.396.184,00	0,00	68.885.081.601,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga		13.650.000,00	0,00	13.650.000,00
3	Dinas Kesehatan	4.352.288.045,11	474.849.024,02	0,00	4.827.137.069,13
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	140.593.100,00	0,00	0,00	140.593.100,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	42.076.200,00	16.472.500,00	0,00	58.548.700,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	38.306.900,00	15.000.000,00	0,00	53.306.900,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	54.287.866,69	45.325.500,00	0,00	99.613.366,69
8	Dinas Pemadam Kebakaran	6.750.000,00	30.899.800,00	0,00	37.649.800,00
9	Dinas Sosial		9.800.000,00	0,00	9.800.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	347.032.300,00	35.344.100,00	0,00	382.376.400,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.821.000,00	4.925.000,00	0,00	25.746.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	20.156.000,00	0,00	0,00	20.156.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	31.646.900,00	0,00	0,00	31.646.900,00
14	Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil	44.686.000,00	998.800,00	0,00	45.684.800,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	120.735.726,00	0,00	0,00	120.735.726,00
16	Dinas Perhubungan	120.748.100,00	0,00	0,00	120.748.100,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.620.000,00	9.100.000,00	0,00	31.720.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77.200.701,00	0,00	0,00	77.200.701,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	146.964.217,00	20.000.000,00	0,00	166.964.217,00
20	Dinas Perikanan	1.154.307.984,00	0,00	0,00	1.154.307.984,00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	117.759.100,00	5.500.000,00	0,00	123.259.100,00
22	Dinas Pertanian	227.974.067,91	0,00	0,00	227.974.067,91
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	54.712.000,00	24.750.000,00	0,00	79.462.000,00
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	88.425.100,00	22.500.000,00	0,00	110.925.100,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	98.577.866,00	0,00	26.475.366,00	72.102.500,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00
27	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	26.475.366,00	0,00	26.475.366,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.297.000,00	0,00	0,00	32.297.000,00
29	Sekretariat Daerah	35.119.304.058,00	152.317.000,00	0,00	35.271.621.058,00
30	Sekretariat DPRD	723.886.458,00	17.405.850,00	0,00	741.292.308,00
31	Inspektorat	29.128.050,00	3.800.000,00	0,00	32.928.050,00

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	9.576.000,00	3.150.000,00	0,00	12.726.000,00
33	Kecamatan Bunguran Timur	121.364.000,00	50.820.000,00	0,00	172.184.000,00
34	Kecamatan Bunguran Barat	34.478.750,00	9.900.000,00	0,00	44.378.750,00
35	Kecamatan Bunguran Utara	207.336.960,00	0,00	0,00	207.336.960,00
36	Kecamatan Pulau Laut	245.588.500,00	0,00	0,00	245.588.500,00
37	Kecamatan Midai	127.134.500,00	0,00	0,00	127.134.500,00
38	Kecamatan Serasan	61.604.500,00	0,00	0,00	61.604.500,00
39	Kecamatan Subi	185.736.500,00	0,00	0,00	185.736.500,00
40	Kecamatan Pulau Tiga	220.053.250,00	0,00	0,00	220.053.250,00
41	Kecamatan Bunguran Tengah	40.934.500,00	0,00	0,00	40.934.500,00
42	Kecamatan Bunguran Timur Laut	302.842.500,00	0,00	0,00	302.842.500,00
43	Kecamatan Bunguran Selatan	30.784.450,00	29.340.000,00	0,00	60.124.450,00
44	Kecamatan Serasan Timur	37.124.500,00	0,00	0,00	37.124.500,00
45	Kecamatan Suak Midai	31.475.000,00	0,00	0,00	31.475.000,00
46	Kecamatan Bunguran Batubi	51.970.000,00	4.750.000,00	0,00	56.720.000,00
47	Kecamatan Pulau Tiga Barat	101.750.000,00	0,00	0,00	101.750.000,00
Total		109.755.424.066,71	5.205.469.124,02	32.175.366,00	114.928.717.824,73

Nilai Aset *Ekstrakomptable* Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.883.689.630,07 sebagai berikut:

Tabel 7.5.110 Aset *Ekstrakomptable* Gedung dan Bangunan

(dalam rupiah)

No.	Nama SKPD	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Kurang	
1	Dinas Pendidikan	18.004.923.200,00	0,00	17.693.364.157,00	311.559.043,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	21.647.735,00	0,00	21.647.735,00
3	Dinas Kesehatan	42.228.400,00	0,00	0,00	42.228.400,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	0,00	6.468.000,00	0,00	6.468.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dinas Pemadam Kebakaran	9.990.750,00	0,00	0,00	9.990.750,00
9	Dinas Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dinas Perhubungan	5.612.714.222,07	0,00	0,00	5.612.714.222,07
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Dinas Perikanan	87.649.880,00	0,00	0,00	87.649.880,00
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	30.294.880,00	0,00	16.819.880,00	13.475.000,00
22	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	251.795.500,00	0,00	0,00	251.795.500,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Sekretariat Daerah	275.595.200,00	0,00	0,00	275.595.200,00
30	Sekretariat DPRD	214.823.600,00	5.492.300,00	0,00	220.315.900,00
31	Inspektorat	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Kecamatan Bunguran Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Kecamatan Bunguran Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Kecamatan Bunguran Utara	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Kecamatan Pulau Laut	7.590.000,00	0,00	7.590.000,00	0,00
37	Kecamatan Midai	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Kecamatan Serasan	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Kecamatan Subi	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Kecamatan Pulau Tiga	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Kecamatan Bunguran Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Kecamatan Bunguran Timur Laut	16.400.000,00	0,00	10.000.000,00	6.400.000,00
43	Kecamatan Bunguran Selatan	23.850.000,00	0,00	0,00	23.850.000,00
44	Kecamatan Serasan Timur	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Kecamatan Suak Midai	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Kecamatan Bunguran Batubi	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Kecamatan Pulau Tiga Barat	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		24.577.855.632,07	33.608.035,00	17.727.774.037,00	6.883.689.630,07

Nilai *ekstrakomptable* sebagaimana dimaksud di atas sudah termasuk tanah dan gedung yang tidak diyakini keberadaannya berdasarkan temuan audit manajemen aset tahun 2014 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau.

7.5.3.4 Aset Lainnya

Aset Lainnya	31 Desember 2020 (Rp)	31 Desember 2019 (Rp)
	68.034.269.631,74	67.651.136.423,92

Perhitungan nilai aset lainnya pada Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2020 sebesar Rp68.034.269.631,74 adalah sebagai berikut:

Nilai Perolehan per 31 Desember 2019	Rp 117.156.491.733,65
Penambahan Tahun 2020	Rp 7.412.448.470,00
Jumlah	Rp 124.718.320.203,65
Pengurangan Tahun 2020	Rp 6.160.751.518,79
Saldo Aset Lainnya	Rp 118.408.188.684,86
Akumulasi Per 31 Desember 2020	Rp (50.373.919.053,12)
Saldo per 31 Desember 2020	Rp 68.034.269.631,74

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp68.034.269.631,74 Aset Lainnya pada tahun 2020 bertambah sebesar Rp7.412.448.470,00 dan berkurang sebesar Rp6.160.751.518,79 atau dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.111 Rincian Aset Lainnya

(dalam rupiah)

Jenis	31 Des 2019	Penambahan	Pengurangan	31 Des 2020
Tagihan Jangka Panjang	16.530.260.515,00	0,00	785.434.018,79	15.744.826.496,21
Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga	12.593.683.910,71	0,00	0,0	12.593.683.910,71
Aset Tidak Berwujud	8.224.455.150,00	2.558.786.875,00	3.197.421.000,00	7.585.821.025,00
Aset Lain-Lain	79.808.092.157,94	4.853.661.595,00	2.177.896.500,00	82.483.857.252,94
Saldo Aset Lainnya	117.156.491.733,65	7.412.448.470,00	6.160.751.518,79	118.408.188.684,86
Akumulasi Penyusutan Aset Lain lain	(44.088.478.580,56)	(4.595.360.015,48)	(2.177.896.500,00)	(46.505.942.096,04)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(5.416.876.729,16)	(1.563.383.794,59)	(3.112.283.566,67)	(3.867.976.957,08)
Jumlah	67.651.136.423,93	1.253.704.659,93	870.571.452,12	68.034.269.631,74

Penambahan dan pengurangan nilai Aset lainnya disajikan sesuai dengan klasifikasi Aset pada Berita Acara Rekonsiliasi Aset.

7.5.3.4.1 Tagihan Jangka Panjang

Tagihan Jangka Panjang tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp(785.434.018,79) disebabkan bertambahnya Tuntutan Ganti Rugi di tahun 2020 sebesar Rp1.455.368.783,86, sedangkan Pengurangan sebesar Rp2.240.802.802,64 merupakan penerimaan pembayaran atas Tuntutan Ganti Rugi selama tahun 2020.

7.5.3.4.2 Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Tidak terjadi penambahan dan pengurangan aset kemitraan dengan pihak ketiga di tahun 2020, sehingga saldo aset kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.593.683.910,71. Aset kemitraan dengan pihak ketiga merupakan pemanfaatan sarana dan prasarana *Integrated Cold Storage* (ICS) di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa bersama dengan Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor SPRJ-059/PERINDO/DIR.A/III/2018 selama 4 tahun terhitung tanggal 21 Maret 2018 sampai 20 Maret 2022.

7.5.3.4.3 Aset Tidak Berwujud

Penambahan aset tidak berwujud tahun 2020 sebesar Rp2.558.786.875,00 adalah sebagai berikut:

Belanja Modal Tahun 2020	Rp	213.740.000,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	Rp	196.100.000,00
Koreksi Pencatatan Tahun Sebelumnya	Rp	517.481.000,00
Reklasifikasi dari Beban Jasa Konsultansi perencanaan	Rp	896.890.000,00
Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	734.575.875,00
Jumlah	Rp	2.558.786.875,00

Belanja modal aset tidak berwujud tahun 2020 berasal dari pengadaan *software/aplikasi* sebesar Rp213.740.000,00 pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah. Penambahan utang pada perangkat lunak/*software* sebesar Rp196.100.000,00 berasal dari Belanja modal yang belum terbayarkan tahun 2020 pada Dinas Pendidikan dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Koreksi pencatatan tahun sebelumnya sebesar Rp517.481.000,00 terjadi karena belum tercatatnya aset tahun lalu yang berada pada Dinas Kesehatan. Beban jasa konsultansi perencanaan sebesar Rp896.890.000,00 merupakan barang yang seharusnya tercatat di aset tidak berwujud tetapi tercatat di beban perangkat lunak/*software* dan beban jasa konsultasi perencanaan. Kemudian reclasifikasi dari konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp734.575.875,00 merupakan pengadaan 2020 hasil maket *master plan DED sport centre* pada Dinas Pemuda dan Olahraga yang seharusnya tercatat di aset tidak berwujud.

Pengurangan aset tidak berwujud tahun 2020 sebesar Rp3.197.421.000,00 adalah sebagai berikut:

Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	Rp	2.549.191.000,00
Penghapusan Aset	Rp	648.230.000,00
Jumlah	Rp	3.197.421.000,00

Reklasifikasi ke Aset Lain-lain pada tahun 2020 sebesar Rp2.549.191.000,00 berada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp212.790.000,00, Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp44.000.000,00, Sekretariat Daerah sebesar Rp117.094.000,00, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp69.500.000,00 dan pada PPKD sebesar Rp2.105.807.000,00. Penghapusan nilai aset tidak berwujud pada tahun 2020 sebesar Rp648.230.000,00 dikarenakan tidak digunakan lagi aset tidak berwujud berupa *software* berada di Dinas Pendidikan.

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.585.821.025,00 menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.112 Rincian Aset Tidak Berwujud per SKPD

(dalam rupiah)

NO	SKPD	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	344.630.000,00
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	734.575.875,00
3	Dinas Kesehatan	833.423.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	961.360.900,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	497.060.000,00
6	Dinas Pemadam Kebakaran	320.347.500,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	49.900.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	743.545.000,00
9	Dinas Perhubungan	817.410.000,00
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	149.900.000,00
11	Dinas Perikanan	410.698.750,00
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	927.935.000,00
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	305.260.000,00
14	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	363.120.000,00
15	Sekretariat Daerah	76.755.000,00
16	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	49.900.000,00
	JUMLAH	7.585.821.025,00

7.5.3.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB)

Nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud sebesar Rp(3.867.976.957,08). Terjadi penambahan sebesar Rp(1.563.383.794,59) merupakan pertambahan nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud yang ada di beberapa SKPD. Kemudian terjadi reklasifikasi ke aset lain-lain sebesar Rp(2.464.053.566,67) yang ada di beberapa SKPD dan penghapusan aset sebesar Rp(648.230.000,00) merupakan nilai aset tidak berwujud berupa *software* yang tidak digunakan lagi pada Dinas Pendidikan.

Sehingga saldo akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp(3.867.976.957,08) menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.113 Rincian Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (ATB)

NO	SKPD	(dalam rupiah)
		JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	(335.967.500,00)
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	(12.242.931,25)
3	Dinas Kesehatan	(333.834.283,33)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(282.611.071,67)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(295.570.333,33)
6	Dinas Pemadam Kebakaran	(133.478.125,00)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(25.781.666,67)
8	Dinas Lingkungan Hidup	(458.519.416,67)
9	Dinas Perhubungan	(746.942.900,00)
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(4.996.666,67)
11	Dinas Perikanan	(253.264.229,17)
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(536.168.583,33)
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	(204.009.333,33)
14	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	(152.942.333,33)
15	Sekretariat Daerah	(41.747.583,33)
16	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	(49.900.000,00)
JUMLAH		(3.867.976.957,08)

7.5.3.4.5 Aset Lain-lain

Aset lain-lain merupakan aset yang dicadangkan untuk dilakukan penghapusan menunggu dokumen keputusan penghapusan terbit. Perhitungan aset lain-lain sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	Rp	79.808.092.157,94
Penambahan	Rp	4.853.661.595,00
Jumlah	Rp	84.661.753.752,94
Pengurangan	Rp	2.177.896.500,00
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	82.483.857.252,94

Terjadi penambahan aset lain-lain sebesar Rp4.853.661.595,00 pada tahun 2020 yang berasal dari Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud, sedangkan pengurangan sebesar Rp2.177.896.500,00 merupakan Penghapusan Aset Lain-lain berdasarkan SK No. 328 Tahun 2020 yang berada di beberapa SKPD.

Aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp82.483.857.252,94 menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7. 5.114 Rincian Aset Lain-lain per SKPD

NO	SKPD	(dalam rupiah)
		JUMLAH
1	Dinas Pendidikan	1.408.370.545,00
2	Dinas Kesehatan	7.053.613.310,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	13.430.902.525,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	31.281.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	589.624.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	157.111.400,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	900.684.500,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	335.000.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.430.000,00

NO	SKPD	JUMLAH
10	Dinas Ketahanan Pangan	98.000.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	73.860.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	122.753.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	183.148.250,00
14	Dinas Perhubungan	9.605.385.167,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	212.790.000,00
16	Dinas Perikanan	1.508.082.439,94
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	708.582.300,00
18	Dinas Pertanian	108.396.500,00
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	61.748.500,00
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	149.254.920,00
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	39.479.359.034,00
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.625.000,00
23	Sekretariat Daerah	3.092.813.200,00
24	Sekretariat DPRD	908.718.650,00
25	Inspektorat	26.149.000,00
26	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	9.955.000,00
27	Kecamatan Bunguran Timur	158.910.200,00
28	Kecamatan Bunguran Barat	185.990.500,00
29	Kecamatan Bunguran Utara	202.294.800,00
30	Kecamatan Pulau Laut	600.200.200,00
31	Kecamatan Midai	124.822.000,00
32	Kecamatan Serasan	593.375.653,00
33	Kecamatan Subi	130.399.500,00
34	Kecamatan Pulau Tiga	31.399.500,00
35	Kecamatan Bunguran Tengah	34.252.806,00
36	Kecamatan Bunguran Timur Laut	51.651.153,00
37	Kecamatan Bunguran Selatan	44.141.500,00
38	Kecamatan Serasan Timur	59.781.200,00
JUMLAH		82.483.857.252,94

7.5.3.4.6 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Pada tahun 2020 terdapat penambahan nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp(4.595.360.015,48) serta ada pengurangan dikarenakan tahun 2020 terjadi penghapusan akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp(2.177.896.500,00). Sehingga akumulasi penyusutan aset lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp(46.505.942.096,04) menurut SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.115 Akumulasi Penyusutan Rincian Aset Lain-lain per SKPD

NO	SKPD	(dalam rupiah)
1	Dinas Pendidikan	(1.408.370.545,00)
2	Dinas Kesehatan	(4.530.786.667,38)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(13.383.265.702,71)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(31.281.000,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	(589.624.000,00)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	(157.111.400,00)
7	Satuan Polisi Pamong Praja	(856.481.523,81)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(335.000.000,00)
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(1.430.000,00)
10	Dinas Ketahanan Pangan	(98.000.000,00)
11	Dinas Lingkungan Hidup	(73.860.000,00)
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(44.753.000,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(183.148.250,00)
14	Dinas Perhubungan	(9.208.482.452,58)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(146.377.500,00)
16	Dinas Perikanan	(430.154.115,44)
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(708.582.300,00)
18	Dinas Pertanian	(108.396.500,00)
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	(61.748.500,00)
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(149.254.920,00)
21	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(7.800.474.693,79)
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(9.625.000,00)
23	Sekretariat Daerah	(3.092.813.200,00)
24	Sekretariat DPRD	(847.794.680,00)
25	Inspektorat	(26.149.000,00)
26	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	(9.955.000,00)
27	Kecamatan Bunguran Timur	(158.910.200,00)
28	Kecamatan Bunguran Barat	(185.990.500,00)
29	Kecamatan Bunguran Utara	(202.294.800,00)
30	Kecamatan Pulau Laut	(598.013.950,00)
31	Kecamatan Midai	(124.822.000,00)

NO	SKPD	JUMLAH
32	Kecamatan Serasan	(593.375.653,00)
33	Kecamatan Subi	(130.399.500,00)
34	Kecamatan Pulau Tiga	(31.399.500,00)
35	Kecamatan Bunguran Tengah	(34.252.806,00)
36	Kecamatan Bunguran Timur Laut	(50.693.236,33)
37	Kecamatan Bunguran Selatan	(43.088.800,00)
38	Kecamatan Serasan Timur	(59.781.200,00)
JUMLAH		(46.505.942.096,04)

7.5.3.5 Kewajiban

Kewajiban	Tahun 2020	Tahun 2019
	Rp	Rp
	48.974.913.245,44	3.404.288.274,67

Utang Pemerintah Kabupaten Natuna Per tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp48.974.913.245,44 yang dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Utang Per 31 Desember 2019	Rp	3.404.288.274,67
Pengurangan Utang		
Pelunasan Tahun 2020	Rp	3.404.288.274,67
Koreksi Pencatatan	Rp	0,00
Jumlah	Rp	0,00
Penambahan Utang		
Penambahan Utang Tahun 2020	Rp	48.974.913.245,44
Saldo Akhir Per 31 Desember 2020	Rp	48.974.913.245,44

Jumlah kewajiban sebesar Rp48.974.913.245,44 merupakan jumlah kewajiban jangka pendek per 31 Desember 2020 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.116 Rincian Kewajiban

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2019	(dalam rupiah)		
			Pengurangan Utang Tahun 2020	Penambahan Utang Tahun 2020	Saldo Akhir per 31 Desember 2020
1	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	12.622.135,00
2	Pendapatan Diterima Di Muka	115.666.666,67	115.666.666,67	0,00	46.666.666,67
3	Utang Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	32.676.120.723,77
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.288.621.608,00	3.288.621.608,00	0,00	16.239.503.720,00
	Jumlah	3.404.288.274,67	3.404.288.274,67	0,00	48.974.913.245,44

7.5.3.5.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2020 sebesar Rp12.622.135,00 yang merupakan Pajak makan minum yang telah dipungut namun belum disetor ke Kas Daerah oleh Bendahara BOS.

7.5.3.5.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka berkang sebesar Rp115.666.666,67 yang merupakan pelunasan saldo awal pendapatan diterima di muka yang menjadi pendapatan LO tahun berjalan sebesar Rp115.666.666,67. Sedangkan penambahan pendapatan terima di muka berasal dari pendapatan sewa ruangan ATM sebesar Rp46.666.666,67 yang gedungnya berada pada Sekretariat Daerah dan RSUD Kabupaten Natuna. Saldo akhir pendapatan diterima di muka sebesar Rp46.666.666,67 yang dicatat di PPKD sebesar Rp10.000.000,00 dan di RSUD sebesar Rp36.666.666,67.

7.5.3.5.3 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2020 sebesar Rp32.676.120.723,77 dengan rincian sebagai berikut:

Utang Belanja Barang dan Jasa	Rp	12.317.376.277,00
Utang Belanja Modal	Rp	20.358.744.446,77
Jumlah	Rp	32.676.120.723,77

Adapun utang pihak ketiga per tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp32.676.120.723,77 yang berada pada:

Tabel 7.5.117 Daftar Utang Kepada Pihak Ketiga Per SKPD

No	SKPD	Utang Belanja Barang dan Jasa	Utang Belanja Modal	JUMLAH	(dalam rupiah)
1	Dinas Pendidikan	14.732.300,00	2.028.522.630,00	2.043.254.930,00	
2	Dinas Pemuda dan Olahraga	105.222.000,00	889.979.535,00	995.201.535,00	
3	Dinas Kesehatan	4.213.381.529,00	293.120.000,00	4.506.501.529,00	
4	Rumah Sakit Umum Daerah	1.237.958.110,00	127.521.000,00	1.365.479.110,00	
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.165.315.018,00	8.913.716.500,77	10.079.031.518,77	
6	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	1.910.896.565,00	5.230.438.427,00	7.141.334.992,00	
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	74.763.300,00	74.250.000,00	149.013.300,00	
8	Satuan Polisi Pamong Praja	53.921.000,00	0,00	53.921.000,00	
9	Dinas Pemadam Kebakaran	103.444.300,00	1.363.298.900,00	1.466.743.200,00	
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	73.266.519,00	0,00	73.266.519,00	
11	Dinas Lingkungan Hidup	82.182.000,00	0,00	82.182.000,00	
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.840.000,00	0,00	4.840.000,00	
13	Dinas Perhubungan	63.634.811,00	640.376.000,00	704.010.811,00	
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	400.816.000,00	0,00	400.816.000,00	
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	36.367.100,00	149.900.000,00	186.267.100,00	
16	Dinas Perikanan	95.251.944,00	0,00	95.251.944,00	
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	189.353.350,00	0,00	189.353.350,00	
18	Dinas Pertanian	67.190.380,00	0,00	67.190.380,00	
19	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	321.421.000,00	3.000.000,00	324.421.000,00	
20	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	58.800.000,00	58.800.000,00	
21	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	124.084.500,00	0,00	124.084.500,00	
22	Sekretariat Daerah	1.210.041.940,00	0,00	1.210.041.940,00	
23	Sekretariat DPRD	623.553.611,00	532.921.454,00	1.156.475.065,00	
24	Kecamatan Serasan	96.396.000,00	2.900.000,00	99.296.000,00	
25	Kecamatan Bunguran Tengah	49.343.000,00	50.000.000,00	99.343.000,00	
	Jumlah	12.317.376.277,00	20.358.744.446,77	32.676.120.723,77	

7.5.3.5.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Pengurangan Utang jangka pendek lainnya sebesar Rp3.288.621.608,00 merupakan pelunasan utang jangka pendek lainnya selama tahun 2020. Sedangkan penambahan Utang tahun 2020 adalah sebesar Rp16.239.503.720,00. Sehingga saldo utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp16.239.503.720,00 berada pada SKPD:

Tabel 7.5.118 Daftar Utang Jangka Pendek Lainnya Per SKPD

No	SKPD	Kredit	Uraian Utang	(dalam rupiah)
1	Dinas Pendidikan	96.651.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	
2	Dinas Pendidikan	168.224.800,00	Utang Belanja Honorarium PNS/Non PNS	
3	Dinas Pendidikan	43.263.570,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas	
4	Dinas Pemuda dan Olahraga	27.204.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	197.000.000,00	Utang Belanja Honorarium PNS/Non PNS	
6	Dinas Pemuda dan Olahraga	183.370.530,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas	
7	Dinas Kesehatan	129.778.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	
8	Dinas Kesehatan	343.167.000,00	Utang Belanja Honorarium PNS/Non PNS	
9	Dinas Kesehatan	187.270.200,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas	
10	Dinas Kesehatan	533.460.455,00	Utang Belanja Jasa Pelayanan Medis	
11	Dinas Kesehatan	994.025,00	Utang Belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	
12	Dinas Kesehatan	16.650.000,00	Utang Jangka Pendek Lainnya	
13	Rumah Sakit Umum Daerah	50.051.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	
14	Rumah Sakit Umum Daerah	901.176.920,00	Utang Belanja Jasa Pelayanan Medis	
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.776.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	103.429.473,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas	
17	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	149.570.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	
18	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	65.391.793,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas	
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	24.684.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	11.750.000,00	Utang Belanja Honorarium PNS/Non PNS	
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	96.550.537,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas	
22	Satuan Polisi Pamong Praja	29.300.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan	
23	Satuan Polisi Pamong Praja	152.395.000,00	Utang Belanja Honorarium PNS/Non PNS	
24	Satuan Polisi Pamong Praja	44.144.900,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas	

No	SKPD	Kredit	Uraian Utang
25	Dinas Pemadam Kebakaran	21.160.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
26	Dinas Pemadam Kebakaran	9.700.000,00	Utang Belanja Honorarium PNS/Non PNS
27	Dinas Pemadam Kebakaran	38.885.400,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas
28	Dinas Sosial	15.660.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
29	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.810.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
30	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.689.600,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas
31	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.450.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
32	Dinas Ketahanan Pangan	19.460.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
33	Dinas Lingkungan Hidup	37.104.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
34	Dinas Lingkungan Hidup	12.777.180,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas
35	Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil	18.110.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
36	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	21.760.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
37	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	79.700.000,00	Utang Belanja Honorarium PNS/Non PNS
38	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	51.544.340,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas
39	Dinas Perhubungan	47.525.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
40	Dinas Perhubungan	1.920.000,00	Utang Belanja Honorarium PNS/Non PNS
41	Dinas Perhubungan	71.072.707,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas
42	Dinas Komunikasi dan Informatika	24.054.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
43	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.181.200,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas
44	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20.910.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
45	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	21.110.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
46	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	64.226.696,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas
47	Dinas Perikanan	35.914.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
48	Dinas Perikanan	8.400.000,00	Utang Belanja Honorarium PNS/Non PNS
49	Dinas Perikanan	108.919.325,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas
50	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	17.110.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
51	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	22.975.000,00	Utang Belanja Honorarium PNS/Non PNS
52	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	232.669.279,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas
53	Dinas Pertanian	23.632.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
54	Dinas Pertanian	14.800.000,00	Utang Belanja Honorarium PNS/Non PNS
55	Dinas Pertanian	55.425.417,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas
56	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	23.760.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
57	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	6.000.000,00	Utang Belanja Honorarium PNS/Non PNS
58	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro	11.904.000,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas
59	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	32.108.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
60	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	103.350.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
61	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKD)	9.875.003.850,00	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
62	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	27.404.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
63	Badan Kepegawai dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.900.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
64	Sekretariat Daerah	156.165.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
65	Sekretariat Daerah	83.600.000,00	Utang Belanja Honorarium PNS/Non PNS
66	Sekretariat Daerah	349.781.173,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas
67	Sekretariat DPRD	63.068.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
68	Sekretariat DPRD	13.320.000,00	Utang Belanja Honorarium PNS/Non PNS
69	Sekretariat DPRD	188.724.720,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas
70	Inspektorat	24.254.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
71	Inspektorat	121.169.400,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas
72	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	18.110.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
73	Kecamatan Bunguran Timur	40.306.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
74	Kecamatan Bunguran Barat	21.120.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
75	Kecamatan Bunguran Barat	1.283.130,00	Utang Iuran Asuransi Kesehatan ke BPJS Kesehatan
76	Kecamatan Bunguran Utara	17.860.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
77	Kecamatan Pulau Laut	17.360.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
78	Kecamatan Midai	23.832.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
79	Kecamatan Serasan	24.422.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
80	Kecamatan Serasan	5.900.000,00	Utang Belanja Perjalanan Dinas
81	Kecamatan Subi	16.660.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
82	Kecamatan Pulau Tiga	15.860.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
83	Kecamatan Bunguran Tengah	13.310.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
84	Kecamatan Bunguran Timur Laut	16.660.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
85	Kecamatan Bunguran Selatan	15.810.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
86	Kecamatan Serasan Timur	15.960.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
87	Kecamatan Suak Midai	16.110.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
88	Kecamatan Bunguran Batubi	15.510.100,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
89	Kecamatan Pulau Tiga Barat	14.010.000,00	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
Jumlah		16.239.503.720,00	

7.5.3.6 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

Ekuitas	Tahun 2020		Tahun 2019	
	Rp	2.704.848.157.849,20	Rp	2.895.139.009.739,77

Jumlah Ekuitas Pemerintah Kabupaten Natuna Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp2.704.848.157.849,20 berasal dari:

Ekuitas Awal (Saldo Akhir Tahun 2019)	Rp 2.895.139.009.739,76
Penambahan Selama Tahun 2020	Rp 829.850.097.993,10
Jumlah	Rp 3.724.989.107.732,86
Pengurangan Selama Tahun 2020	Rp 1.020.140.949.883,66
Saldo Per 31 Desember 2020	Rp 2.704.848.157.849,20

7.5.4 LAPORAN OPERASIONAL

7.5.4.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)
	825.433.974.466,09	1.389.462.045.920,21

Pendapatan - LO tahun 2020 sebesar Rp825.433.974.466,09 atau menurun sebesar 40,59% dibanding tahun 2019. Rincian Pendapatan - LO tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 7.5.119 Rincian Pendapatan-LO

No	Uraian	(dalam rupiah)		Kenaikan / Penurunan (%)
		2020	2019	
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	52.149.670.508,53	58.349.735.649,87	(10,63)
2	Pendapatan Transfer – LO	756.929.222.631,00	1.275.816.274.353,00	(40,67)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	16.355.081.326,56	55.296.035.917,34	(70,42)
	Jumlah	825.433.974.466,09	1.389.462.045.920,21	(40,59)

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Hak Pemerintah Daerah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp52.149.670.508,53 mengalami penurunan sebesar 10,63% dibanding tahun sebelumnya. Kelompok Pendapatan Asli Daerah terdiri dari 4 (empat) jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.120 Rincian Pendapatan Asli Daerah - LO

No	Uraian	(dalam rupiah)		Kenaikan / Penurunan (%)
		2020	2019	
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	14.034.191.425,05	17.265.115.198,17	(18,71)
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	689.889.656,00	435.390.328,00	58,45
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.119.170.581,00	4.008.805.474,00	27,70
4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	32.306.418.846,48	36.640.424.649,70	(11,83)
	Jumlah	52.149.670.508,53	58.349.735.649,87	(10,63)

Pendapatan Pajak Daerah - LO mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar 18,71%. Sedangkan pendapatan Retribusi Daerah - LO mengalami peningkatan, yaitu sebesar 58,45% dari tahun sebelumnya.

7.5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Pendapatan Pajak Daerah - LO yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Natuna sebesar Rp14.034.191.425,05 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.121 Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO

No	Uraian	(dalam rupiah)		Kenaikan / Penurunan (%)
		2020	2019	
1	Pajak Hotel – LO	132.936.644,00	183.556.671,00	(27,58)
2	Pajak Restoran – LO	2.127.274.603,47	3.270.846.325,70	(34,96)
3	Pajak Hiburan – LO	27.213.825,00	19.780.000,00	37,58
4	Pajak Reklame – LO	105.495.000,00	141.293.000,00	(25,34)
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	5.834.966.658,00	7.906.826.933,00	(26,20)
6	Pajak Parkir – LO	6.162.000,00	7.470.000,00	(17,51)
7	Pajak Air Tanah – LO	1.190.000,00	0,00	0,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	759.308.631,50	1.211.994.056,00	(37,35)
9	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	3.892.467.203,00	3.602.040.999,00	8,06
10	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	1.147.176.860,08	921.307.213,47	24,52
	Jumlah	14.034.191.425,05	17.265.115.198,17	(10,63)

Penurunan pendapatan pajak ini dikarenakan berkurangnya pajak hotel, hasil penjualan di tempat makan, pemasangan reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan bahan-bahan galian, sehingga pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna turun sebesar 18,71% dari tahun sebelumnya. Penjelasan masing-masing Pendapatan Pajak Daerah-LO tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a) Pajak Hotel-LO

Pajak Hotel - LO tahun 2020 sebesar Rp132.936.644,00 mengalami penurunan sebesar 27,58% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp183.556.671,00.

b) Restoran - LO

Restoran-LO tahun 2020 sebesar Rp2.127.274.603,47 mengalami penurunan sebesar 34,96% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.270.846.325,70.

c) Pajak Hiburan - LO

Pajak Hiburan - LO tahun 2020 sebesar Rp27.213.825,00 mengalami peningkatan sebesar 37,58% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp19.780.000,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.122 Rincian Pajak Hiburan - LO

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah) Kenaikan / Penurunan (%)
1	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya – LO	25.876.825,00	17.100.000,00	51,33
2	Permainan Bilyar, Golf, Bowling – LO	255.000,00	605.000,00	(57,85)
3	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO	1.082.000,00	2.075.000,00	(47,86)
Jumlah		27.213.825,00	19.780.000,00	37,58

d) Pajak Reklame - LO

Pajak Reklame - LO tahun 2020 sebesar Rp105.495.000,00 mengalami penurunan sebesar 25,34% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp141.293.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.123 Rincian Pajak Reklame - LO

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah) Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO	89.307.000,00	113.578.000,00	(21,37)
2	Pajak Reklame Kain – LO	13.706.000,00	18.421.000,00	(25,60)
3	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO	0,00	7.200.000,00	(100,00)
4	Pajak Reklame Berjalan – LO	2.482.000,00	2.094.000,00	18,53
Jumlah		105.495.000,00	141.293.000,00	(25,34)

e) Pajak Penerangan Jalan - LO

Pajak Penerangan Jalan - LO tahun 2020 sebesar Rp5.834.966.658,00 mengalami penurunan sebesar 26,20% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp7.906.826.933,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.124 Rincian Pajak Penerangan Jalan - LO

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah) Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri – LO	5.834.966.658,00	5.519.925.429,00	5,71
2	Pajak Penerangan Jalan sumber lain – LO	0,00	2.386.901.504,00	(100,00)
Jumlah		5.834.966.658,00	7.906.826.933,00	(26,20)

f) Pajak Parkir - LO

Pajak Parkir - LO tahun 2020 sebesar Rp6.162.000,00 mengalami penurunan sebesar 17,51% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp7.470.000,00.

g) Pajak Air Tanah - LO

Pajak Air Tanah - LO tahun 2020 sebesar Rp1.190.000,00 mengalami peningkatan sebesar 0,00% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp0,00.

h) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO tahun 2020 sebesar Rp759.308.631,50 mengalami penurunan sebesar 37,35% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.211.994.056,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.125 Rincian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah)
				Kenaikan / Penurunan (%)
1	Batu Apung - LO	7.880.000,00	4.140.000,00	90,34
2	Granit/Andesit - LO	244.636.461,50	394.339.953,00	(37,96)
3	Pasir Kuarsa - LO	201.986.869,00	341.265.814,00	(40,81)
4	Tanah Diatomite - LO	68.479.167,00	136.655.418,00	(49,89)
5	Batu Sirtu - LO	179.512.500,00	265.434.089,00	(32,37)
6	Pasir Beton - LO	32.295.506,00	32.489.943,00	(0,60)
7	Koral Beton - LO	21.953.018,00	35.435.059,00	(38,05)
8	Tanah urug - LO	2.565.110,00	2.233.780,00	14,83
Jumlah		759.308.631,50	1.211.994.056,00	(37,35)

i) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO tahun 2020 sebesar Rp3.892.467.203,00 mengalami peningkatan sebesar 8,06% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp3.602.040.999,00.

j) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO tahun 2020 sebesar Rp1.147.176.860,08 mengalami peningkatan sebesar 24,52% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp921.307.213,47.

7.5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO

Pendapatan Retribusi Daerah - LO sebesar Rp689.889.656,00 meningkat sebesar 58,45% dari tahun sebelumnya. Rincian masing-masing Pendapatan Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.126 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah)
				Kenaikan / Penurunan (%)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	575.839.900,00	282.344.100,00	103,95
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	62.400.000,00	58.800.000,00	6,12
3	Retribusi Perizinan Tertentu-LO	51.649.756,00	94.246.228,00	(45,20)
Jumlah		689.889.656,00	435.390.328,00	58,45

Rincian masing-masing pendapatan Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut:

a) Retribusi Jasa umum - LO

Retribusi Jasa umum - LO sebesar Rp575.839.900,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.127 Rincian Retribusi Jasa Umum-LO

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah)
				Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pelayanan kesehatan di Puskesmas – LO	464.724.900,00	209.525.100,00	121,80
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	87.103.000,00	44.344.000,00	96,43
3	Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus - LO	16.000.000,00	8.700.000,00	83,91
4	Pelayanan tera-tera ulang	8.012.000,00	19.775.000,00	(59,48)
Jumlah		575.839.900,00	282.344.100,00	103,95

b) Retribusi Jasa Usaha-LO

Retribusi Jasa Usaha-LO di tahun 2020 sebesar Rp62.400.000,00 mengalami peningkatan 6,12% dibandingkan tahun sebelumnya.

c) Retribusi Perizinan Tertentu-LO

Retribusi Perizinan Tertentu-LO sebesar Rp51.649.756,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.128 Rincian Retribusi Perizinan Tertentu-LO

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	2020	2019	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan – LO	51.649.756,00	94.246.228,00	(45,20)
	Jumlah	51.649.756,00	94.246.228,00	(45,20)

7.5.4.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp5.119.170.581,00 merupakan hasil dari investasi jangka panjang permanen yang ditanamkan pada Bank Riau Kepri (Deviden BUMD).

7.5.4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO tahun 2020 sebesar Rp32.306.418.846,48 terdiri dari:

Tabel 7.5.129 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	2020	2019	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	0,00	699.940.000,00	(100,00)
2	Penerimaan Jasa Giro – LO	1.918.868.787,08	2.756.578.460,10	(30,39)
3	Pendapatan Bunga – LO	2.724.845.337,35	2.218.767.123,42	22,81
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LO	255.523.493,60	592.322.240,54	(56,86)
5	Pendapatan Denda Pajak – LO	119.186.134,32	142.343.151,59	(16,27)
6	Pendapatan Denda Retribusi – LO	92.158,00	0,00	0,00
7	Pendapatan dari Pengembalian –LO	318.682.707,00	1.330.161.917,00	(76,04)
8	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah – LO	29.000.000,00	49.833.333,33	(41,81)
9	Pendapatan BLUD – LO	15.516.608.437,33	17.966.294.967,05	(13,63)
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	4.646.395.921,80	4.198.681.889,67	10,66
11	Pendapatan Dana Kapitalisasi JKN – LO	6.777.215.870,00	6.685.501.567,00	1,37
	Jumlah	32.306.418.846,48	36.640.424.649,70	(11,83)

Rincian masing-masing Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO tahun 2020 adalah sebagai berikut:

a) Pendapatan dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO sebesar Rp0,00.

b) Penerimaan Jasa Giro - LO

Penerimaan Jasa Giro - LO tahun 2020 sebesar Rp1.918.868.787,08 mengalami penurunan sebesar 30,39%, dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp2.756.578.460,10 terdiri dari:

Tabel 7.5.130 Rincian Penerimaan Jasa Giro - LO

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	2020	2019	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Jasa Giro Kas Daerah - LO	1.670.750.358,08	2.479.935.805,09	(32,63)
2	Jasa Giro Kas Bendahara - LO	248.118.429,00	276.642.655,01	(10,31)
	Jumlah	1.918.868.787,08	2.756.578.460,10	(30,39)

c) Pendapatan Bunga-LO sebesar Rp2.724.845.337,35 dari pendapatan bunga deposito.

d) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO sebesar Rp255.523.493,60 yang merupakan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada bidang Pendidikan sebesar Rp255.523.493,60.

e) Pendapatan Denda Pajak - LO

Pendapatan Denda Pajak - LO sebesar Rp119.186.134,32 terdiri dari:

Tabel 7.5.131 Rincian Pendapatan Denda Pajak-LO

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah) Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	657.975,00	421.120,00	56,24
2	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	1.478.830,44	1.327.876,58	11,37
3	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	358.464,00	533.100,00	(32,76)
4	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	1.194.020,00	3.437.540,00	(65,27)
5	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	53.760,00	57.000,00	(5,68)
6	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	110.970.385,00	134.598.743,00	(17,55)
7	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	4.472.699,88	1.967.772,01	127,30
Jumlah		119.186.134,32	142.343.151,59	(16,27)

f) Pendapatan Denda Retribusi - LO

Pendapatan denda retribusi - LO tahun 2020 sebesar Rp92.158,00 mengalami peningkatan sebesar 0,00% dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp0,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.132 Rincian Pendapatan Denda Retribusi – LO

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah) Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-LO	92.158,00	0,00	0,00
	Jumlah	92.158,00	0,00	0,00

g) Pendapatan Dari Pengembalian - LO

Pendapatan Dari Pengembalian - LO sebesar Rp318.682.707,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.133 Rincian Pendapatan Dari Pengembalian-LO

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah) Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	230.435.225,00	1.317.012.917,00	(82,50)
2	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO	88.247.482,00	13.149.000,00	571,13
	Jumlah	318.682.707,00	1.330.161.917,00	(76,04)

h) Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO

Pendapatan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah-LO sebesar Rp29.000.000,00 mengalami penurunan sebesar 41,81% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp49.833.333,33 yang merupakan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa.

i) Pendapatan BLUD - LO

Pendapatan BLUD - LO 2020 sebesar Rp15.516.608.437,33 mengalami penurunan sebesar 13,63%, dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp17.966.294.967,05. Pendapatan tersebut merupakan pendapatan hasil jasa operasional BLUD.

j) Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO

Lain-lain PAD yang sah lainnya merupakan pendapatan yang secara informasi transaksi tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak bisa diklasifikasikan ke kodifikasi pendapatan yang sudah ada. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO pada tahun 2020 sebesar Rp4.646.395.921,80 terdiri dari:

Tabel 7.5.134 Rincian Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah Lainnya-LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	2020	2019	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	4.646.395.921,80	4.198.681.889,67	10,66
	Jumlah	4.646.395.921,80	4.198.681.889,67	10,66

k) Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO

Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO sebesar Rp6.777.215.870,00 mengalami peningkatan sebesar 1,37%, dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp6.685.501.567,00.

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan transfer - LO yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi pada tahun 2020 adalah sebesar Rp756.929.222.631,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.135 Rincian Pendapatan Transfer - LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	2020	2019	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	678.247.180.060,00	1.186.260.645.013,00	(42,82)
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	28.129.235.000,00	27.826.858.000,00	1,09
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (Daerah Lainnya)- LO	50.552.807.571,00	61.728.771.340,00	(18,10)
	Jumlah	756.929.222.631,00	1.275.816.274.353,00	(40,67)

Rincian masing-masing jenis penerimaan transfer - LO adalah sebagai berikut:

7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO pada tahun 2020 sebesar Rp678.247.180.060,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.136 Rincian Transfer Pemerintah Pusat/Dana Perimbangan-LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	2020	2019	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Bagi Hasil Pajak – LO	56.658.750.074,00	108.460.389.639,00	(47,76)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	140.939.250.380,00	523.647.089.965,00	(73,09)
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	396.383.552.000,00	391.521.681.000,00	1,24
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	84.265.627.606,00	162.631.484.409,00	(48,19)
	Jumlah	678.247.180.060,00	1.186.260.645.013,00	(42,82)

a) Dana Bagi Hasil Pajak-LO tahun 2020 sebesar Rp56.658.750.074,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.137 Rincian Dana Bagi Hasil Pajak-LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	2020	2019	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO	41.498.143.237,00	99.207.262.016,00	(58,17)
2	Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Prabadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	13.968.427.895,00	6.193.593.124,00	125,53
3	Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	19.982.142,00	299.449.487,00	(93,33)
4	Hasil Dari Biaya Pungut PBB - LO	1.172.196.800,00	2.760.085.012,00	(57,53)
	Jumlah	56.658.750.074,00	108.460.389.639,00	(47,76)

b) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO tahun 2020 sebesar Rp140.939.250.380,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.138 Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO

(dalam rupiah)				
No	Uraian	2020	2019	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan – LO	28.144.050,00	75.616.468,00	(62,78)
2	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksloitasi (Royalti) - LO	2.059.746.900,00	7.401.230.567,00	(72,17)
3	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan – LO	780.921.711,00	397.939.860,00	96,24
4	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan – LO	3.677.289,00	295.077.900,00	(98,75)
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LO	73.514.540.564,00	168.948.744.605,00	(56,49)
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LO	64.552.219.866,00	346.528.480.565,00	(81,37)
	Jumlah	140.939.250.380,00	523.647.089.965,00	(73,09)

c) Dana Alokasi Umum - LO tahun 2020 sebesar Rp396.383.552.000,00 mengalami kenaikan sebesar 1,24% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp391.521.681.000,00.

- d) Dana Alokasi Khusus - LO tahun 2020 sebesar Rp84.265.627.606,00 terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik terdiri dari:

Tabel 7.5.139 Rincian Dana Alokasi Khusus-LO

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah) Kenaikan / Penurunan (%)
1	DAK Bidang Infrastruktur Jalan – LO	0,00	31.208.770.950,00	(100,00)
2	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi – LO	0,00	2.163.782.137,00	(100,00)
3	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum – LO	751.269.000,00	5.726.255.466,00	(86,88)
4	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO	5.133.333.000,00	6.117.589.999,00	(16,09)
5	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman – LO	3.588.702.000,00	6.448.801.000,00	(44,35)
6	DAK Bidang Kesehatan – LO	19.076.847.223,00	37.144.188.300,00	(48,64)
7	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan – LO	1.090.497.950,00	1.497.261.000,00	(27,17)
8	DAK Bidang Transportasi Perdesaan – LO	2.095.449.128,00	7.112.108.134,00	(70,54)
9	DAK Bidang Pertanian – LO	220.000.000,00	1.069.754.987,00	(79,43)
10	DAK Bidang Pendidikan – LO	8.397.266.200,00	20.273.753.273,00	(58,58)
11	DAK Bidang Pariwisata – LO	0,00	1.212.023.250,00	(100,00)
12	DAK Bidang Pasar – LO	0,00	930.719.300,00	(100,00)
Jumlah		40.353.364.546,00	120.905.007.796,00	(66,62)

Dana Alokasi Khusus Non Fisik - LO terdiri dari:

Tabel 7.5.140 Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik-LO

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah) Kenaikan / Penurunan (%)
1	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru – LO	653.430.000,00	1.520.411.000,00	(57,02)
2	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru PNSD – LO	760.500.000,00	531.500.000,00	43,09
3	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD – LO	18.526.638.000,00	18.521.352.987,00	0,03
4	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP) - LO	2.119.755.000,00	1.893.448.100,00	11,95
5	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan - LO	18.997.557.000,00	14.244.379.576,00	33,37
6	DAK Non Fisik Akreditasi Rumah Sakit - LO	152.050.000,00	635.700.000,00	(76,08)
7	DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas - LO	0,00	358.000.000,00	(100,00)
8	DAK Non Fisik Jaminan Persalinan - LO	373.619.040,00	798.225.000,00	(53,19)
9	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana - LO	1.359.862.000,00	2.087.416.700,00	(34,85)
10	DAK Non Fisik Data Pelayanan Administrasi Kependudukan - LO	968.852.020,00	1.136.043.250,00	(14,72)
Jumlah		43.912.263.060,00	41.726.476.613,00	5,24

7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO pada tahun 2020 sebesar Rp28.129.235.000,00.

7.5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi) - LO tahun 2020 sebesar Rp50.552.807.571,00 terdiri dari:

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi) tahun 2020 sebesar Rp50.052.807.571 terdiri dari:

Tabel 7.5.141 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi) - LO

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah) Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO	22.350.343.718,00	11.380.560.457,00	96,39
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.052.548.415,00	8.628.668.121,00	(64,62)
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	16.390.624.988,00	34.595.422.109,00	(52,62)
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	23.137.356,00	112.436.905,00	(79,42)
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	8.236.153.094,00	7.011.683.748,00	17,46
Jumlah		50.052.807.571,00	61.728.771.340,00	(18,91)

- b) Bantuan Keuangan-LO Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi) Tahun 2020 sebesar Rp500.000.000,00.

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO tahun 2020 sebesar Rp16.355.081.326,56 merupakan Pendapatan hibah berupa uang maupun barang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Provinsi ataupun pihak lainnya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.142 Rincian lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah) Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah – LO	16.355.081.326,56	55.296.035.917,34	(70,42)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan / Penurunan (%)
2	Pendapatan Lainnya – LO Jumlah	0,00 16.355.081.326,56	0,00 55.296.035.917,34	0,00 (70,42)

Rincian masing-masing jenis penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO adalah sebagai berikut:

7.5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah - LO pada tahun 2020 sebesar Rp16.355.081.326,56 terdiri dari:

Tabel 7.5.143 Rincian Pendapatan Hibah-LO

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan / Penurunan (%)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	1.815.084.095,71	44.175.419.232,20	(95,89)
2	Pendapatan Hibah BOS – LO	13.476.874.450,85	11.120.616.685,14	21,19
3	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO	498.139.000,00	0,00	100,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri.... - LO Jumlah	564.983.780,00 16.355.081.326,56	0,00 55.296.035.917,34	100,00 (70,42)

Rincian Pendapatan hibah dari Pemerintah-LO sebesar Rp1.815.084.095,71 berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan TA 2020 sebesar Rp44.450.000,00, Kementerian Nasional Republik Indonesia Tahun 2020 sebesar Rp28.260.000,00, dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp1.742.374.095,71. Hibah yang diberikan berupa barang yang terdiri dari:

Tabel 7.5.144 Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO

No	Uraian	Nilai
1	Pendapatan Hibah Peralatan dan Mesin	1.815.084.095,71
	Jumlah	1.815.084.095,71

Pendapatan Hibah BOS-LO pada tahun 2020 sebesar Rp13.476.874.450,85 merupakan pendapatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tingkat Pendidikan Dasar.

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO pada tahun 2020 sebesar Rp498.139.000,00 mengalami peningkatan sebesar 100,00% dibandingkan tahun 2019. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO merupakan hibah dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri pada tahun 2020 sebesar Rp564.983.780,00 mengalami peningkatan sebesar 100,00% dibandingkan tahun 2019.

7.5.4.1.3.2 Pendapatan Lainnya - LO

Tidak terdapat Pendapatan Lainnya - LO pada tahun 2020.

7.5.4.2 Beban - LO

Beban – LO	Tahun 2020		Tahun 2019	
	(Rp)	1.014.537.122.115,86	(Rp)	1.081.801.301.043,07

Beban-LO Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2020 sebesar Rp1.014.537.122.115,86. Rincian beban tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.145 Rincian Beban Operasi

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai – LO	474.718.661.937,00	464.827.029.413,50	2,13
2	Beban Persediaan	64.621.976.224,15	67.605.926.760,55	(4,41)
3	Beban Jasa	109.317.719.851,00	137.273.100.116,36	(20,36)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
4	Beban Pemeliharaan	12.849.791.623,10	19.838.680.883,68	(35,23)
5	Beban Perjalanan Dinas	79.286.570.588,50	128.558.609.285,03	(38,33)
6	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
7	Beban Hibah	35.219.806.760,00	3.763.000.000,00	835,95
8	Beban Bantuan Sosial	2.745.675.000,00	6.842.494.000,00	(59,87)
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	158.552.508.700,63	154.287.719.948,77	2,76
10	Beban Transfer	60.091.637.400,00	86.413.253.563,00	(30,46)
11	Beban Penyiihan Piutang	2.038.000.310,55	1.104.599.220,97	84,50
12	Beban Penyiihan Dana Bergulir	448.917.181,95	0,00	0,00
13	Beban Lain-lain	14.645.856.538,98	11.286.887.851,22	29,76
Jumlah		1.014.537.122.115,86	1.081.801.301.043,08	(6,22)

7.5.4.2.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai tahun 2020 sebesar Rp474.718.661.937,00 naik 2,13% dari tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.146 Rincian Beban Pegawai

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	191.252.282.997,00	165.779.326.782,00	15,37
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	170.411.071.149,00	204.637.508.566,00	(16,73)
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	6.026.500.000,00	6.075.000.000,00	(0,80)
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	431.327.967,50	(100,00)
5	Beban Uang Lembur - LO	0,00	73.524.000,00	(100,00)
6	Beban Honorarium Non Pegawai	6.786.350.000,00	0,00	0,00
7	Honorarium PNS	10.685.333.717,00	8.492.207.676,00	25,83
8	Honorarium Non PNS	88.167.670.311,00	76.921.571.755,00	14,62
9	Uang untuk diberikan kepada pihak masyarakat - LO	0,00	310.498.000,00	(100,00)
10	Beban Pegawai BOS - LO	1.389.453.763,00	2.106.064.667,00	(34,03)
Jumlah		474.718.661.937,00	464.827.029.413,50	2,13

Realisasi Beban Pegawai tahun 2020 sebesar Rp474.718.661.937,00 terdiri dari:

a) Beban Gaji dan Beban tunjangan

Beban Gaji dan Beban tunjangan tahun 2020 sebesar Rp191.252.282.997,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.147 Rincian Beban Gaji dan Beban Tunjangan

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	127.254.102.840,00	125.732.105.300,00	1,21
2	Beban Tunjangan Keluarga - LO	12.290.568.048,00	12.167.521.962,00	1,01
3	Beban Tunjangan Jabatan - LO	6.974.985.000,00	6.911.154.000,00	0,92
4	Beban Tunjangan Fungsional - LO	5.383.048.000,00	5.294.368.000,00	1,67
5	Beban Tunjangan Beras - LO	7.298.740.050,00	7.249.958.806,00	0,67
6	Beban Tunjangan PPH/tunjangan Khusus - LO	92.705.167,00	231.955.686,00	(60,03)
7	Beban Pembulatan Gaji - LO	1.926.037,00	1.932.726,00	(0,35)
8	Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO	8.538.377.943,00	3.576.141.907,00	138,76
9	Beban Uang Paket - LO	38.682.000,00	38.535.000,00	0,38
10	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO	20.249.250,00	7.673.400,00	163,89
11	Beban Tunjangan Perumahan - LO	100.200.000,00	83.500.000,00	20,00
12	Uang Jasa Pengabdian - LO	2.100.000,00	180.810.000,00	(98,84)
13	Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO	201.600.000,00	184.800.000,00	9,09
14	Beban Tunjangan Umum - LO	3.028.900.000,00	3.025.313.494,00	0,12
15	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	249.548.657,00	258.912.076,00	(3,62)
16	Iuran Jaminan Kematian	785.571.629,00	776.667.422,00	1,15
17	Tunjangan Alat Kelengkapan - LO	60.659.136,00	57.977.003,00	4,63
18	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO	17.601.239.040,00	0,00	0,00
19	Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO	583.750.000,00	0,00	0,00
20	Tunjangan Khusus Guru PNSD - LO	745.330.200,00	0,00	0,00
Jumlah		191.252.282.997,00	165.779.326.782,00	15,37

b) Beban Tambahan Penghasilan PNS

Beban Tambahan Penghasilan PNS tahun 2020 sebesar Rp170.411.071.149,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.148 Rincian Beban Tambahan Penghasilan PNS

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	46.541.885.695,00	120.755.633.861,00	(61,46)
2	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas - LO	3.411.077.512,00	28.871.103.752,00	(88,19)
3	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja - LO	2.065.612.805,00	21.598.345.878,00	(90,44)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
4	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi - LO	3.534.127.114,00	11.374.877.515,00	(68,93)
5	Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja	93.212.061.942,00	0,00	0,00
6	Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	21.646.306.081,00	0,00	0,00
7	Tambahan penghasilan Guru PNSD	0,00	880.500.000,00	(100,00)
8	Tunjangan Profesi Guru PNSD	0,00	19.094.320.760,00	(100,00)
9	Tunjangan Khusus Guru PNSD - LO	0,00	2.062.726.800,00	(100,00)
Jumlah		170.411.071.149,00	204.637.508.566,00	(16,73)

c) Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH tahun 2020 sebesar Rp6.026.500.000,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.149 Rincian Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDH/WKDH

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD – LO	2.520.000.000,00	2.520.000.000,00	0,00
2	Beban Perjalanan Operasional KDH/WKDH - LO	332.500.000,00	300.000.000,00	10,83
3	Tunjangan reses	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00
4	Tunjangan transportasi	2.754.000.000,00	2.835.000.000,00	(2,86)
Jumlah		6.026.500.000,00	6.075.000.000,00	(0,80)

d) Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2020 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00% dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp431.327.967,50.

e) Beban Uang Lembur-LO

Beban Uang Lembur-LO tahun 2020 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan sebesar 100,00% dibanding dengan tahun 2019 yaitu sebesar Rp73.524.000,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.150 Rincian Beban Uang Lembur-LO

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Uang Lembur PNS - LO	0,00	29.623.000,00	(100,00)
2	Beban Uang Lembur Non PNS - LO	0,00	43.901.000,00	(100,00)
Jumlah		0,00	73.524.000,00	(100,00)

f) Beban Honorarium Non Pegawai

Beban Honorarium Non Pegawai sebesar Rp6.786.350.000,00 atau mengalami peningkatan 0,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp0,00.

g) Beban Honorarium PNS

Beban Honorarium PNS sebesar Rp10.685.333.717,00 atau mengalami peningkatan 25,83% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdiri dari:

Tabel 7.5.151 Rincian Beban Honorarium PNS

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Honorarium paritaria pelaksana kegiatan-LO	3.718.595.000,00	2.120.100.000,00	75,40
2	Honorarium tim pengadaan barang dan jasa-LO	8.000.000,00	0,00	0,00
3	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	289.030.000,00	330.130.000,00	(12,45)
4	Honorarium pejabat dan staf pelaksana teknis kegiatan-LO	0,00	0,00	0,00
5	Honorarium panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan-LO	4.500.000,00	0,00	0,00
6	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan-LO	429.625.000,00	380.273.000,00	12,98
7	Honorarium pegawai BLUD	142.200.000,00	1.126.426.120,00	(87,38)
8	Honorarium jasa pelayanan	2.996.873.917,00	1.832.528.556,00	63,54
9	Honorarium pegawai BOS/BROS/BOP PAUD	599.824.800,00	411.600.000,00	45,73

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
10	Honorarium pengembangan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah PNS	1.688.010.000,00	1.593.900.000,00	5,90
11	Honorarium pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik PNS	808.675.000,00	697.250.000,00	15,98
Jumlah		10.685.333.717,00	8.492.207.676,00	25,83

h) Beban Honorarium Non PNS

Beban Honorarium Non PNS sebesar Rp88.167.670.311,00 terdiri dari:

Tabel 7.5.152 Rincian Beban Honorarium Non PNS

(dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2020	Realisasi 2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	26.250.000,00	57.213.861.357,00	(99,95)
2	Honorarium pegawai honorer/tidak tetap-LO	66.238.135.800,00	0,00	0,00
3	Honorarium petugas/pengawas lapangan/peserta kegiatan-LO	18.167.550.000,00	16.461.737.500,00	10,36
4	Honorarium panitia pelaksana kegiatan-LO	216.800.000,00	138.000.000,00	57,10
5	Honorarium jasa pelayanan	2.159.834.511,00	2.187.222.898,00	(1,25)
6	Honorarium pegawai BOS/BROS/BOP PAUD	747.200.000,00	679.000.000,00	10,04
7	Honorarium pengembangan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Non PNS	373.800.000,00	209.750.000,00	78,21
8	Honorarium pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik Non PNS	238.100.000,00	32.000.000,00	644,06
Jumlah		88.167.670.311,00	76.921.571.755,00	14,62

i) Uang untuk Diberikan kepada Pihak Masyarakat

Uang untuk Diberikan kepada Pihak Masyarakat tahun 2020 sebesar Rp0,00 atau mengalami penurunan 100,00% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp310.498.000,00.

j) Beban Pegawai BOS

Beban Pegawai BOS tahun 2020 sebesar Rp1.389.453.763,00 atau mengalami penurunan 34,03% dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp2.106.064.667,00.

7.5.4.2.2 Beban Persediaan

Pengakuan beban persediaan pada tahun 2020 sebesar Rp64.621.976.224,15 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.153 Rincian Beban Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	6.706.277.777,00	6.927.262.494,33	(3,19)
2	Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	33.626.700,00	40.508.200,00	(16,99)
3	Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	532.016.930,00	1.014.555.273,00	(47,56)
4	Beban Persediaan Perangko, Meterai dan Benda Pos Lainnya	965.133.373,00	1.105.107.736,00	(12,67)
5	Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.694.227.991,00	1.564.936.999,00	8,26
6	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	1.737.558.125,00	452.535.502,00	283,96
7	Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	7.800.000,00	8.400.000,00	(7,14)
8	Beban Persediaan Bahan Pakai Habis	605.604.080,00	386.819.357,00	56,56
9	Beban Spanduk	1.099.032.165,00	1.071.958.347,00	2,53
10	Beban Dekorasi	360.271.500,00	384.283.000,00	(6,25)
11	Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	80.090.000,00	64.946.100,00	23,32
12	Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	212.741.250,00	155.820.000,00	36,53
13	Beban Persediaan Bibit Ternak	1.709.250,00	68.060.750,00	(97,49)
14	Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	209.955.340,00	7.889.729.005,79	(97,34)
15	Beban Persediaan Bahan Kimia	122.704.500,00	54.905.000,00	123,49
16	Beban Persediaan Makanan Pokok	4.536.100,00	0,00	0,00
17	Beban Alat-alat Olahraga	26.400.000,00	1.028.984.700,00	(97,43)
18	Beban Atribut	0,00	467.665.970,00	(100,00)
19	Beban Alat Perlengkapan	5.766.374.632,00	4.084.582.136,13	41,17
20	Beban Material/Hadiah	217.531.030,00	355.554.900,00	(36,82)
21	Beban Persediaan Alat-alat Kesehatan Pakai Habis	10.517.895.358,15	5.443.684.174,30	93,21
22	Beban Alat Kelengkapan Kebersihan	0,00	0,00	0,00
23	Beban Persediaan Tempat Sampah	55.320.000,00	94.738.000,00	(41,61)
24	Beban Cetak	3.585.923.631,00	4.849.899.752,00	(26,06)
25	Beban Penggandaan	3.807.321.784,00	4.477.095.987,00	(14,96)
26	Beban Dokumentasi	285.147.300,00	390.888.800,00	(27,05)
27	Beban Barang Yang Akan Diberikan Kepada Masyarakat	24.506.213.700,00	21.104.353.935,00	16,12
28	Beban Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga	1.480.563.708,00	4.118.650.642,00	(64,05)
Jumlah		64.621.976.224,15	67.605.926.760,55	(4,41)

7.5.4.2.3 Beban Jasa

Pengakuan beban Jasa pada tahun 2020 sebesar Rp109.317.719.851,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.154 Rincian Beban Jasa

(dalam rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Jasa telepon	109.938.166,00	105.471.301,00	4,24
2	Beban Jasa air	611.474.200,00	484.101.209,00	26,31
3	Beban Jasa listrik	4.960.414.507,00	4.400.870.874,00	12,71
4	Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang	9.980.000,00	0,00	0,00
5	Beban Jasa surat kabar/majalah	733.609.001,00	1.085.245.500,00	(32,40)
6	Beban Jasa kawat/faksimili/internet	3.412.526.144,00	2.785.648.886,00	22,50
7	Beban Jasa paket/pengiriman	115.293.150,00	260.774.772,00	(55,79)
8	Beban Jasa Sertifikasi	141.745.031,00	91.849.916,00	54,32
9	Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	0,00	4.665.000,00	(100,00)
10	Beban Jasa medis/laboratorium	6.654.649.125,12	13.861.481.385,58	(51,99)
11	Beban Jasa kebersihan	2.184.687.649,00	2.382.419.742,50	(8,30)
12	Beban Jasa kesenian	68.900.000,00	340.725.000,00	(79,78)
13	Beban Jasa administrasi	1.698.156.465,00	1.578.145.974,00	7,60
14	Beban Jasa publikasi	7.046.910.500,00	6.374.451.000,00	10,55
15	Beban Jasa humas	6.177.402.000,00	6.792.320.000,00	(9,05)
16	Beban Jasa keamanan	23.600.000,00	28.300.000,00	(16,61)
17	Beban perangkat lunak (software)	24.803.290,00	20.000.000,00	24,02
18	Beban upah	98.330.440,00	137.279.843,00	(28,37)
19	Beban Jasa kalibrasi alat kesehatan/laboratorium	0,00	48.585.000,00	(100,00)
20	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	21.537.249.099,00	16.343.862.238,00	31,78
21	Beban Premi Asuransi Kecelakaan – LO	75.585.150,00	102.727.806,00	(26,42)
22	Beban Premi Asuransi Kematian – LO	95.226.177,00	119.371.808,00	(20,23)
23	Beban Jasa Konsultansi Penelitian	867.893.000,00	921.347.500,00	(5,80)
24	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan	571.518.310,00	3.778.131.341,00	(84,87)
25	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	256.256.000,00	826.920.511,89	(69,01)
26	Beban Jasa konsultasi IT	0,00	31.515.000,00	(100,00)
27	Beban Jasa konsultasi hukum	0,00	0,00	0,00
28	Beban Jasa konsultan penilai	0,00	213.847.700,00	(100,00)
29	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	4.054.459.736,00	5.767.742.663,00	(29,70)
30	Beban Jasa service	2.048.566.324,00	2.040.860.013,00	0,38
31	Beban pengantinan suku cadang	2.556.719.276,00	2.511.669.400,00	1,79
32	Beban surat tanda nomor kendaraan	190.810.155,00	225.988.667,00	(15,57)
33	Beban Sewa rumah jabatan/rumah dinas	267.000.000,00	272.208.333,33	(1,91)
34	Beban Sewa gedung/ kantor/tempat	1.142.964.600,00	1.272.806.700,00	(10,20)
35	Beban Sewa ruang rapat/pertemuan	279.176.600,00	291.660.000,00	(4,28)
36	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	593.964.760,00	1.099.101.200,00	(45,96)
37	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air	1.212.179.950,00	1.737.229.850,00	(30,22)
38	Beban Sewa meja kursi	0,00	6.970.000,00	(100,00)
39	Beban Sewa generator	3.000.000,00	3.400.000,00	(11,76)
40	Beban Sewa tenda	2.500.000,00	77.900.000,00	(96,79)
41	Beban Sewa peralatan sound system	102.840.000,00	167.540.000,00	(38,62)
42	Beban Sewa peralatan survei	0,00	11.240.000,00	(100,00)
43	Beban Sewa alat Selam - LO	111.842.500,00	0,00	0,00
44	Beban makanan dan minuman harian pegawai	1.853.884.090,00	4.560.920.660,00	(59,35)
45	Beban makanan dan minuman rapat	4.738.694.700,00	3.673.961.700,00	28,98
46	Beban makanan dan minuman tamu	2.311.279.000,00	2.631.663.800,00	(12,17)
47	Beban makanan dan minuman kegiatan	9.830.494.030,00	17.471.959.040,00	(43,74)
48	Beban makanan dan minuman pelajar/siswa	0,00	608.760.000,00	(100,00)
49	Beban makanan dan minuman pasien	412.274.930,00	391.311.650,00	5,36
50	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan	349.512.000,00	2.439.897.352,00	(85,68)
51	Beban kontribusi diklat teknis/fungsional	2.275.000,00	169.245.747,00	(98,66)
52	Beban kontribusi bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, dan lokakarya	44.275.000,00	236.650.000,00	(81,29)
53	Beban kontribusi diklat struktural	126.897.000,00	162.158.000,00	(21,74)
54	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	0,00	8.500.000,00	(100,00)
55	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	3.468.450.000,00	413.500.000,00	738,80
56	Beban Barang Dana BOS	6.700.394.943,88	5.885.007.948,06	13,86
57	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	2.941.692.000,00	3.674.610.000,00	(19,95)
58	Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO	3.998.585.000,00	12.972.127.000,00	(69,18)
59	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH	0,00	11.250.000,00	(100,00)
60	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	106.320.000,00	107.954.000,00	(1,51)
61	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	25.800.000,00	194.786.000,00	(86,75)
62	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	134.315.500,00	275.375.000,00	(51,22)
63	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	56.450.000,00	159.581.500,00	(64,63)
64	Belanja pakaian sipil resmi (PSR)	49.720.000,00	45.100.000,00	10,24
65	Belanja pakaian dinas lengkap (PDL)	0,00	217.010.380,00	(100,00)
66	Belanja atribut	23.308.000,00	0,00	0,00
67	Beban pakaian kerja lapangan	529.797.852,00	233.255.640,00	127,13
68	Belanja pakaian dinas non PNS	0,00	10.500.000,00	(100,00)
69	Belanja sepatu lapangan	16.300.000,00	207.238.460,00	(92,13)
70	Beban pakaian adat daerah	372.336.700,00	194.272.975,00	91,66
71	Beban pakaian batik tradisional	10.900.000,00	46.000.000,00	(76,30)
72	Beban pakaian olahraga	352.676.800,00	680.710.330,00	(48,19)
73	Beban pakaian muslim	80.000.000,00	12.600.000,00	534,92
74	Beban pakaian seragam	249.416.000,00	194.479.900,00	28,25
75	Beban pakaian kegiatan	54.500.000,00	51.337.500,00	6,16
76	Beban beasiswa tugas belajar D3	0,00	160.000.000,00	(100,00)
77	Beban beasiswa tugas belajar S1	144.000.000,00	180.000.000,00	(20,00)
78	Beban beasiswa tugas belajar S2	156.000.000,00	250.000.000,00	(37,60)
79	Beban beasiswa tugas belajar spesialis	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
Jumlah		109.317.719.851,00	137.273.100.116,36	(20,36)

7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

Pengakuan Beban Pemeliharaan pada tahun 2020 sebesar Rp12.849.791.623,10 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.155 Rincian Beban Pemeliharaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.915.395.420,00	3.508.354.076,00	(16,90)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.888.658.921,46	11.257.917.112,95	(47,69)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.465.970.365,00	4.007.220.345,00	(13,51)
4	Beban pemeliharaan sistem komputerisasi (software)	0,00	81.070.000,00	(100,00)
5	Beban pemeliharaan lahan	99.859.200,00	188.767.402,00	(47,10)
6	Beban pemeliharaan perlengkapan	479.907.716,64	795.351.947,73	(39,66)
Jumlah		12.849.791.623,10	19.838.680.883,68	(35,23)

7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada tahun 2020 sebesar Rp79.286.570.588,50 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.156 Rincian Beban Perjalanan Dinas

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	49.742.468.972,00	54.787.766.250,03	(9,21)
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.544.101.616,50	73.335.286.804,00	(59,71)
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	435.556.231,00	(100,00)
	Jumlah	79.286.570.588,50	128.558.609.285,03	(38,33)

7.5.4.2.6 Beban Hibah

Beban Hibah tahun 2020 sebesar Rp35.219.806.760,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.157 Rincian Beban Hibah

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Hibah Barang Kepada Pemerintah	28.038.970.000,00	820.000.000,00	3.319,39
2	Beban Hibah BOP PAUD	1.532.700.000,00	1.377.900.000,00	11,23
3	Beban Hibah kepada Badan/lembaga/organisasi bidang keagamaan	4.650.000.000,00	1.237.500.000,00	275,76
4	Beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang sosial kemasyarakatan	250.000.000,00	0,00	0,00
5	Beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang pendidikan dan penelitian	225.000.000,00	0,00	0,00
6	Beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang kepemudaan dan olah raga	51.300.000,00	327.600.000,00	(84,34)
7	Beban hibah kepada badan/lembaga/organisasi bidang sosial kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
8	Beban hibah kepada partai politik	471.836.760,00	0,00	0,00
	Jumlah	35.219.806.760,00	3.763.000.000,00	835,95

7.5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2020 sebesar Rp2.745.675.000,00 yang terdiri dari:

Tabel 7.5.158 Rincian Beban Bantuan Sosial

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat untuk Perlindungan Sosial - LO	2.415.675.000,00	0,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat untuk Jaminan Sosial – LO	330.000.000,00	419.994.000,00	(21,43)
3	Beban Bantuan Sosial Kepada Kelompok/Anggota Masyarakat untuk Penanggulangan Kemiskinan	0,00	6.422.500.000,00	(100,00)
	Jumlah	2.745.675.000,00	6.842.494.000,00	(59,87)

7.5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2020 Rp158.552.508.700,63 mengalami kenaikan sebesar 2,76% dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar Rp154.287.719.948,77. Berikut rincian beban penyusutan dan amortisasi:

Tabel 7.5.159 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Penyusutan 2020	Penyusutan 2019	(dalam rupiah)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	30.880.586.678,95	26.915.540.919,85	
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	23.770.997.781,73	22.682.935.138,47	
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	102.405.577.645,36	103.732.952.777,12	
4	Amortisasi Aset Tidak berwujud	1.495.346.594,59	956.291.113,33	
	Jumlah	158.552.508.700,63	154.287.719.948,77	

7.5.4.2.9 Beban Transfer

Beban Transfer tahun 2020 sebesar Rp60.091.637.400,00 atau menurun sebesar 30,46% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp86.413.253.563,00. Berikut rincian Beban Transfer:

Tabel 7.5.160 Rincian Beban Transfer

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	578.546.400,00	1.314.875.000,00	(56,00)
3	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota/Desa	25.116.000,00	50.232.000,00	(50,00)
4	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa ADD	59.487.975.000,00	84.106.019.628,00	(29,27)
5	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	480.000.000,00	(100,00)

No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan (%)
6	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik	0,00	462.126.935,00	(100,00)
	Jumlah	60.091.637.400,00	86.413.253.563,00	(30,46)

7.5.4.2.10 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2020 sebesar Rp2.038.000.310,55 terdiri dari:

Tabel 7.5.161 Rincian Beban Penyisihan Piutang

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah) Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	2.001.060.988,18	966.071.108,80	107,13
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	36.939.322,37	138.528.112,17	(73,33)
	Jumlah	2.038.000.310,55	1.104.599.220,97	84,50

7.5.4.2.11 Beban Lain-lain

Beban lain-lain tahun 2020 sebesar Rp14.645.856.538,98 terjadi peningkatan sebesar Rp3.358.968.687,76 atau 29,76% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp11.286.887.851,22.

Tabel 7.5.162 Rincian Beban Lain-lain

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah) Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Lain-lain (Reklasifikasi Aset Tetap ke <i>Eksstrakomptable</i>)	1.890.286.613,80	4.172.244.373,01	(54,69)
2	Beban Penghapusan Aset	12.755.569.925,18	7.114.643.478,21	79,29
	Jumlah	14.645.856.538,98	11.286.887.851,22	29,76

7.5.4.2.12 Beban Penyisihan Dana Bergulir

Beban Penyisihan Dana Bergulir tahun 2020 sebesar Rp448.917.181,95 terjadi peningkatan sebesar Rp448.917.181,95 atau 0,00% dibandingkan tahun 2019 yang sebesar Rp0,00.

7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Defisit dari kegiatan operasional tahun 2020 sebesar Rp189.103.147.649,77 terinci sebagai berikut:

Tabel 7.5.163 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah) Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan-LO	825.433.974.466,09	1.389.462.045.920,21	(40,59)
2	Beban Operasional	1.014.537.122.115,86	1.081.801.301.043,07	(6,22)
	Jumlah	(189.103.147.649,77)	307.660.744.877,14	(161,46)

7.5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pada tahun 2020 defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp648.474.987,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.164 Rincian Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

No	Uraian	2020	2019	(dalam rupiah) Kenaikan / Penurunan
				(%)
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	0,00	0,00 0,00
2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	294.871.913,00	0,00	294.871.913,00 0,00
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	(943.346.900,00)	(2.039.402.674,00)	1.098.497.774,00 (53,74)
	Jumlah	(648.474.987,00)	(2.039.402.674,00)	1.393.369.687,00 (68,20)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp648.474.987,00 mengalami penurunan sebesar 68,20% dibanding tahun 2019 sebesar Rp2.039.402.674,00.

Surplus dari kegiatan non operasional lainnya terjadi atas investasi jangka panjang permanen yang dicatat dengan metode ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.165 Rincian Surplus Non Operasional

<i>(dalam rupiah)</i>			
No	SKPD/Lembaga	Uraian	Jumlah
1	PDAM Tirta Nusa	Penyertaan Modal Kepada PDAM Tirta Nusa	294.871.913,00
Jumlah			294.871.913,00

Defisit dari kegiatan non operasional lainnya terjadi atas investasi jangka panjang permanen yang dicatat dengan metode ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.166 Rincian Defisit Non operasional

<i>(dalam rupiah)</i>			
No	SKPD/Lembaga	Uraian	Jumlah
1	Perusahaan Daerah	Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Kab. Natuna	943.346.900,00
Jumlah			943.346.900,00

7.5.4.5 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Defisit dari Pos Luar Biasa pada tahun 2020 sebesar Rp5.603.827.767,80 atau naik 100% dibanding tahun 2019.

7.5.4.6 Surplus/Defisit-LO

Pada tahun 2020 mengalami Defisit sebesar Rp195.355.450.404,57 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.167 Rincian Surplus/Defisit LO

<i>(dalam rupiah)</i>				
No	Uraian	2020	2019	Kenaikan/Penurunan (%)
1	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional	(189.103.147.649,77)	307.660.744.877,14	(161,46)
2	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	(648.474.987,00)	(2.039.402.674,00)	(68,20)
3	Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa	(5.603.827.767,80)	(291.452.705,00)	1.822,72
Jumlah		(195.355.450.404,57)	305.329.889.498,14	(163,98)

7.5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas adalah Laporan yang memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari aktivitas operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Arus Kas Masuk	897.669.966.306,72	1.319.545.212.042,81
Arus Kas Keluar	875.669.555.982,60	971.797.256.255,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	22.000.410.324,12	347.747.955.787,12

Pada tahun 2020, terdapat Arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp22.000.410.324,12 yang merupakan selisih antara arus kas masuk sebesar Rp897.669.966.306,72 dengan Arus kas keluar sebesar Rp875.669.555.982,60. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

Tabel 7.5.168 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	11.545.052.215,25	15.096.327.674,17
Penerimaan Retribusi Daerah	689.889.656,00	435.390.328,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.119.170.581,00	4.008.805.474,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	18.902.882.420,47	16.579.114.339,64
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	95.573.589.308,00	69.545.550.405,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	142.606.417.689,00	521.979.922.656,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	396.383.552.000,00	391.521.681.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	84.265.627.606,00	162.631.484.409,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
Penerimaan Dana Penyesuaian	28.129.235.000,00	27.826.858.000,00
Penerimaan Dana Desa	64.932.954.000,00	63.632.478.000,00
Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	49.021.595.831,00	46.287.599.757,00
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
Penerimaan Lainnya	0,00	0,00
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Penerimaan Bantuan Keuangan	500.000.000,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	897.669.966.306,72	1.319.545.212.042,81
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	473.368.380.211,00	460.125.464.076,50
Pembayaran Barang	235.478.467.345,60	350.721.076.411,19
Pembayaran Bunga	0,00	0,00
Pembayaran Subsidi	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	35.219.806.760,00	3.763.000.000,00
Pembayaran Bantuan Sosial	2.745.675.000,00	6.842.494.000,00
Pembayaran Bantuan Keuangan	0,00	0,00
Pembayaran Tak Terduga	13.707.639.116,00	299.490.205,00
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	578.546.400,00	1.314.875.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	25.116.000,00	50.232.000,00
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	114.545.925.150,00	148.680.624.563,00
Jumlah Arus Kas Keluar	875.669.555.982,60	971.797.256.255,69
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	22.000.410.324,12	347.747.955.787,12

1. Perbedaan Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi dengan Pendapatan LRA

Arus Kas Masuk	Pendapatan LRA	Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi	Selisih
926.418.003.270,96	897.669.966.306,72		28.748.036.964,24

Selisih sebesar Rp28.748.036.964,24 terdiri dari:

- Pendapatan RSUD BLUD sejumlah Rp15.271.271.870,33 yang merupakan lain-lain PAD yang sah yang tidak masuk dalam bagian Laporan Arus Kas dikarenakan pengelolaannya tidak melalui rekening Kas Umum Daerah.
- Pendapatan Dana BOS tingkat SD dan SMP sejumlah Rp13.476.765.093,91 yang merupakan lain-lain pendapatan yang sah yang tidak masuk dalam bagian Laporan Arus Kas dikarenakan pengelolaannya tidak melalui rekening Kas Umum Daerah.

2. Perbedaan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dengan Belanja Operasi, Tidak Terduga dan Transfer LRA

Arus Kas Keluar	Belanja Operasi, Tidak Terduga dan Transfer	Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi	Selisih
	898.116.708.353,54	875.669.555.982,60	22.447.152.370,94

Selisih sebesar Rp22.447.152.370,94 terdiri dari:

- Belanja Barang pada RSUD BLUD sebesar Rp14.215.213.021,00 dan belanja pegawai sebesar Rp142.200.000,00 yang tidak masuk dalam bagian Laporan Arus Kas dikarenakan pengelolaannya tidak melalui rekening Kas Umum Daerah.

- b. Belanja Barang dan Jasa Dana BOS tingkat SD dan SMP sebesar Rp6.700.285.586,94 dan Belanja Pegawai Dana BOS tingkat SD dan SMP sebesar Rp1.389.453.763,00 yang tidak masuk dalam bagian Laporan Arus Kas dikarenakan pengelolaannya tidak melalui rekening Kas Umum Daerah.

7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan Aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Arus Kas Masuk	5.593.338.919,30	699.940.000,00
Arus Kas Keluar	165.873.441.726,25	261.720.578.339,60
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(160.280.102.806,95)	(261.020.638.339,60)

Arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp(160.280.102.806,95) merupakan selisih antara Arus kas masuk sebesar Rp5.593.338.919,30 dan Arus kas keluar sebesar Rp165.873.441.726,25. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi tahun 2020 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.169 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas Investasi

(dalam rupiah)

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019
Arus Kas Masuk		
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	699.940.000,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	5.593.338.919,30	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	5.593.338.919,30	699.940.000,00
Arus Kas Keluar		
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00
Perolehan Tanah	7.081.073.899,00	1.984.075.000,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	26.909.132.595,00	26.035.503.104,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	78.647.132.575,66	79.044.504.071,61
Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	52.918.743.156,59	154.248.747.663,99
Perolehan Aset Tetap Lainnya	317.354.500,00	407.748.500,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	165.873.441.726,25	261.720.578.339,60
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(160.280.102.806,95)	(261.020.638.339,60)

Dalam Laporan Arus Kas terdapat perbedaan dengan Laporan Realisasi Anggaran. Perbedaan dijelaskan sebagai berikut:

Arus Kas Keluar	Belanja Modal LRA	Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi	Selisih
	171.347.334.782,25	165.873.441.726,25	5.473.893.056,00

Selisih sebesar Rp5.473.893.056,00 terdiri dari:

- Belanja Modal pada RSUD BLUD sebesar Rp140.419.668,00 yang tidak masuk dalam bagian Laporan Arus Kas dikarenakan pengelolaannya tidak melalui rekening Kas Umum Daerah.
- Belanja Modal Dana BOS tingkat SD dan SMP sebesar Rp5.333.473.388,00 yang tidak masuk dalam bagian Laporan Arus Kas dikarenakan pengelolaannya tidak melalui rekening Kas Umum Daerah.

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk melakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Natuna yang mempengaruhi Pembiayaan pada LRA dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar	0,00	5.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(5.000.000.000,00)

7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas *Transitoris*

Aktivitas *transitoris* adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari Aktivitas *Transitoris* mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Arus Kas Masuk	56.974.254.592,03	67.933.441.869,37
Arus Kas Keluar	56.974.254.592,03	67.933.441.869,37
Arus Kas Bersih dari Aktivitas <i>Transitoris</i>	0,00	0,00

Arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0,00. Rincian aliran Kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2020 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.170 Rincian Aliran Kas dari Aktivitas *Transitoris*

(dalam rupiah)

Uraian	tahun 2020	tahun 2019
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	56.974.254.592,03	67.933.441.869,37
Kiriman Uang Masuk	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	56.974.254.592,03	67.933.441.869,37
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	56.974.254.592,03	67.933.441.869,37
Kiriman Uang Keluar	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	56.974.254.592,03	67.933.441.869,37
Arus Kas Bersih dari Aktivitas <i>Transitoris</i>	0,00	0,00

Perhitungan fihak ketiga (PFK) belanja gaji pegawai dan perhitungan pajak belanja yang harus disetorkan ke Kas Negara dan Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5.171 Rincian Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

(dalam rupiah)

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	IWP 2%	2.572.986.138,00	2.572.986.138,00	0,00
2	IWP 8%	9.536.816.265,00	9.536.816.265,00	0,00
3	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	10.283.823.247,00	10.283.823.247,00	0,00
4	Taperum	154.250.000,00	154.250.000,00	0,00
5	JKM	785.518.238,00	785.518.238,00	0,00
6	JKK	261.912.340,00	261.912.340,00	0,00
7	PPH 21	12.698.024.906,00	12.698.024.906,00	0,00
8	PPH 22	452.029.286,00	452.029.286,00	0,00
9	PPH 23	125.299.058,00	125.299.058,00	0,00
10	PPH 4 AYAT 2	3.179.448.651,00	3.179.448.651,00	0,00
11	PPN	16.350.595.731,00	16.350.595.731,00	0,00
12	Utang Lain-lain	3.247.164,00	3.247.164,00	0,00
13	Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	277.871.721,03	277.871.721,03	0,00
14	Pajak Daerah	292.431.847,00	292.431.847,00	0,00
	Jumlah	56.974.254.592,03	56.974.254.592,03	0,00

7.5.5.4 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(138.279.692.482,83)	81.727.317.447,52

Kenaikan kas bersih selama periode tahun 2020 sebesar Rp(138.279.692.482,83) menunjukkan adanya defisit realisasi APBD tahun 2020 atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan lebih kecil dari belanja dan pengeluaran pembiayaan. Perhitungan kenaikan kas bersih adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5.172 Perhitungan Kenaikan/Penurunan Bersih Kas

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2019	<i>(dalam rupiah)</i>
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	22.000.410.324,12	347.747.955.787,12	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(160.280.102.806,95)	(261.020.638.339,60)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	0,00	(5.000.000.000,00)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	0,00	0,00	
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(138.279.692.482,83)	81.727.317.447,52	

7.5.5.5 Saldo Awal Kas di BUD

Saldo Awal Kas di BUD	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	142.106.884.449,31	60.379.567.001,79

Saldo Awal Kas di BUD dirincikan sebagai berikut:

Tabel 7.5.173 Perhitungan Saldo Awal BUD

No	Uraian Saldo	Jumlah	<i>(dalam rupiah)</i>
1	Kas di Kas Daerah	142.106.274.449,31	
2	Kas di Bendahara Penerimaan	610.000,00	
	Jumlah	142.106.884.449,31	

7.5.5.6 Saldo Akhir Kas di BUD

Saldo Akhir Kas di BUD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	3.827.191.966,48	142.106.884.449,31

Saldo akhir kas di BUD sebesar Rp3.827.191.966,48 merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Natuna per tanggal 31 Desember 2020 yang dicatat pada kas di Kasda dan Kas di Bendahara Penerimaan. Perhitungan saldo akhir kas sebagai berikut:

Tabel 7.5.174 Perhitungan Saldo Akhir BUD

No	Uraian Saldo	Jumlah	<i>(dalam rupiah)</i>
1	Kas di Kasda	3.827.161.966,48	
2	Kas di Bendahara Penerimaan	30.000,00	
	Jumlah	3.827.191.966,48	

7.5.5.7 Saldo Akhir Kas di BLUD

Saldo Akhir Kas di BLUD	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	11.351.691.748,96	10.578.252.567,63

Saldo akhir kas di BLUD sebesar Rp11.351.691.748,96 merupakan saldo kas RSUD Kabupaten Natuna selaku BLUD per tanggal 31 Desember 2020 dengan rincian:

Tabel 7.5.175 Daftar Saldo Akhir BLUD

Uraian	Jumlah	<i>(dalam rupiah)</i>
Kas di Rekening Bank Riau (No.Rek. 11-70-20213-9)	10.636.560.065,58	

Uraian	Jumlah
Kas di Rekening Bank Mandiri (No.Rek. 109-00-1378157-0)	715.131.683,38
Jumlah Kas di BLUD RSUD Natuna	11.351.691.748,96

7.5.5.7 Saldo Akhir Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp847.606.656,39 merupakan saldo dana BOS pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga tahun 2020.

7.5.5.7 Saldo Kas Akhir

Saldo Kas Akhir sebesar Rp16.026.490.371,83 merupakan jumlah saldo kas/setara kas Pemerintah Daerah dengan rincian:

1. Saldo Akhir Kas di BUD	3.827.191.966,48
2. Saldo Akhir Kas di BLUD	11.351.691.748,96
3. Saldo Akhir Kas Lainnya	847.606.656,39
Jumlah Kas Akhir	16.026.490.371,83

7.5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang memberi informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.6.1 Ekuitas Awal

Saldo awal ekuitas tahun 2020 sebesar Rp2.895.139.009.739,76 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2019.

7.5.6.2 Surplus/defisit - LO

Defisit - LO sebesar Rp195.355.450.404,57 merupakan defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang mengurangi nilai ekuitas pada neraca Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2020.

7.5.6.3 Koreksi-koreksi

Selisih sebesar Rp5.064.598.514,01 merupakan koreksi-koreksi sebagai dampak akumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar dengan rincian:

- Koreksi Pencatatan Aset Tetap Tanah Tahun Sebelumnya merupakan Koreksi Pencatatan terlebih catat nilai *Appraisal* tanah tahun sebelumnya sebesar Rp266.114.418,50.
- Koreksi Pencatatan Aset Tetap Lainnya Tahun Sebelumnya sebesar Rp4.752.091,05
- Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp5.325.960.841,46 dengan rincian:

Tabel 7.5.176 Daftar Koreksi Pencatatan Ekuitas Lainnya

No	Uraian	(dalam rupiah) Jumlah
Penambahan		
1	Koreksi Pencatatan Penghentian Dana Bergulir dan Mutasi Kas dari Kas Lainnya	84.729.089,00
2	Koreksi pencatatan utang BPJS tahun sebelumnya	357.408.080,00
3	Koreksi pencatatan utang Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi tahun sebelumnya	16.200.000,00
4	Koreksi Pencatatan Aset Tidak Berwujud Tahun 2019	517.481.000,00
5	Penyesuaian Piatang BPHTB yang belum tercatat di Laporan Keuangan Tahun Sebelumnya	103.132.720,52
6	Koreksi Pencatatan Piatang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun Sebelumnya	3.000,00

No	Uraian	Jumlah
7	Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Tahun Sebelumnya disebabkan perubahan kodefikasi	49.475.666,67
8	Koreksi pencatatan saldo akhir dana bergulir pada kas lainnya	122.064.597,00
9	Koreksi Pencatatan Nilai DefisitBUMD (PDAM Tirta Nusa) Tahun 2019	64.399.780,00
10	Koreksi atas Aset Tanah yang belum tercatat di Neraca	775.000.000,00
11	Koreksi atas Aset Gedung dan Bangunan yang belum tercatat di Neraca	4.978.737.200,00
12	Penambahan TGR 2020	616.880.195,26
13	Koreksi Pelunasan TGR Tahun 2020 Yang Dicatat di 2019	19.470.000,00
14	Total Penambahan	7.704.981.328,45
II	Pengurangan	
15	Koreksi pencatatan utang BPJS Ketenagakerjaan tahun sebelumnya	5.698.236,00
16	Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Tahun Sebelumnya disebabkan perubahan kodefikasi	2.723.333,34
17	Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Tahun Sebelumnya disebabkan Aset Tetap yang belum tercatat di Neraca	1.800.643.287,33
18	Koreksi Pencatatan Kelebihan Piutang Perusda Tahun 2016	800
19	Koreksi Pencatatan Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor tahun lalu yang belum disusutkan	402.800.000,00
20	Koreksi Atas TGR yang Dilunasi Tahun sebelumnya dan Dicatat Tahun 2020	53.480.791,32
21	Koreksi atas Laba Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Nusa berdasarkan LK PDAM tahun sebelumnya	113.674.039,00
22	Total Pengurangan	2.379.020.486,99
III	Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya	5.325.960.841,46

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir adalah sebesar Rp2.704.848.157.849,20.

7.5.7 Pengungkapan atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya

7.5.7.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan LO dengan Pendapatan-LRA

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Pendapatan Pajak Daerah	LO	LRA	Selisih
	14.034.191.425,05	11.545.052.215,25	2.489.139.209,80

Selisih antara Pendapatan pajak daerah-LO dengan pendapatan pajak daerah - LRA tahun 2020 adalah sebesar Rp2.489.139.209,80. Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.177 Selisih Pendapatan Pajak Daerah

Uraian	Jumlah (dalam rupiah)
Penambahan Piutang tahun 2020	2.971.843.923,81
Dikurangi atas Penerimaan Pembayaran Piutang Pajak tahun sebelumnya	482.704.714,01
Jumlah	2.489.139.209,80

Penambahan dan pengurangan piutang pajak tahun 2020 untuk masing-masing jenis pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.178 Rincian Selisih Pendapatan Pajak Daerah

No	Jenis Pajak	Jumlah (dalam rupiah)
1	Penambahan	
2	Penambahan Piutang Pajak Reklame	19.410.000,00
3	Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan	2.837.575.799,00
4	Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	114.858.124,81
5	Jumlah Penambahan	2.971.843.923,81
6	Pengurangan	
7	Perlunasan Piutang Pajak Reklame	7.038.000,00
8	Pelunasan BPHTP	14.972.934,01
9	Perlunasan Piutang PBB Pedesaan dan Perkotaan	460.693.780,00
10	Jumlah Pengurangan	482.704.714,01
	Jumlah	2.489.139.209,80

	Pendapatan Retribusi	LO	LRA	Selisih
2.	Daerah	689.889.656,00	689.889.656,00	0,00
Tidak terdapat selisih antara Pendapatan retribusi daerah-LO dengan Pendapatan retribusi daerah-LRA, ini dikarenakan tidak adanya transaksi yang mempengaruhi Pendapatan retribusi daerah-LO dengan Pendapatan retribusi daerah-LRA.				
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	LO	LRA	Selisih
		5.119.170.581,00	5.119.170.581,00	0,00
Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA, ini dikarenakan tidak adanya transaksi yang mempengaruhi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO dengan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO - LRA.				
4	Lain-lain PAD yang Sah	LO	LRA	Selisih
		32.306.418.846,48	34.174.154.290,80	(1.867.735.444,32)

Selisih sebesar Rp(1.867.735.444,32) antara Lain-lain PAD yang Sah - LO dengan Lain-lain PAD yang Sah - LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.179 Selisih Lain-lain PAD yang Sah

		<i>(dalam rupiah)</i>
Uraian		Jumlah
Penambahan		
Penambahan Lain-lain PAD yang Sah - LO dari Pendapatan dibayar di muka		114.000.000,00
Penambahan dari Piutang BPJS kesehatan		2.183.168.200,00
Penambahan dari Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		51.250.000,00
Jumlah Penambahan		2.348.418.200,00
Pengurangan		
Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka		45.000.000,00
Pelunasan Piutang BPJS		1.977.831.633,00
Pelunasan Piutang Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan		6.000.000,00
Pelunasan TGR Tahun Sebelumnya		2.187.322.011,32
Jumlah Pengurangan		4.216.153.644,32
Selisih LO dan LRA		(1.867.735.444,32)

b. Pendapatan Transfer

	Pendapatan Transfer	LO	LRA	Selisih
1.	Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	678.247.180.060,00	718.829.186.603,00	(40.582.006.543,00)

Selisih antara pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan Dana Perimbangan sebesar Rp(40.582.006.543,00) merupakan pelunasan piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019 yang diterima di tahun 2020.

	Pendapatan Transfer	LO	LRA	Selisih
2.	Pemerintah Pusat - Lainnya	28.129.235.000,00	93.062.189.000,00	(64.932.954.000,00)

Selisih antara Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya - LO dengan Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya - LRA sebesar Rp(64.932.954.000,00)

merupakan pendapatan atas dana desa yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Natuna yang langsung disalurkan ke desa di tahun 2020 yang dicatat sebagai utang pada saat dibukukan.

	Pendapatan Transfer	LO	LRA	Selisih
3. Pemerintah Daerah Lainnya		50.552.807.571,00	49.521.595.831,00	1.031.211.740,00

Selisih antara Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya - LO dengan Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya – LRA sebesar Rp1.031.211.740,00 merupakan selisih antara penambahan piutang bagi hasil pajak provinsi tahun 2020 sebesar Rp16.472.383.323,00 dengan pelunasan piutang bagi hasil pajak provinsi tahun 2019 sebesar Rp15.441.171.583,00.

c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

	Pendapatan Hibah	LO	LRA	Selisih
1. Hibah		16.355.081.326,56	13.476.765.093,91	2.878.316.232,65

Selisih sebesar Rp2.878.316.232,65 antara pendapatan hibah - LO dengan pendapatan hibah - LRA merupakan pendapatan hibah barang yang tidak disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Pendapatan tersebut adalah:

Tabel 7.5.180 Rincian Pendapatan Hibah

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Pendapatan Hibah Barang Persediaan	1.063.122.780,00
Pendapatan Hibah atas Peralatan dan Mesin	1.815.084.095,71
Koreksi Belanja BOS	109.356,94
Jumlah	2.878.316.232,65

2. Pendapatan Lainnya	LO	LRA	Selisih
	0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat selisih pendapatan lainnya-LO dengan pendapatan lainnya-LRA, ini karena Realisasi Pendapatan Lainnya – LO - LRA.

7.5.7.2 Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA Belanja Operasi

	Beban Pegawai - Belanja Pegawai	LO	LRA	Selisih
1. Beban Pegawai - Belanja Pegawai		474.718.661.937,00	474.900.033.974,00	(181.372.037,00)

Selisih antara beban pegawai - LO dan belanja pegawai - LRA tahun 2020 sebesar Rp(181.372.037,00) merupakan selisih antara penambahan utang belanja pegawai sebesar Rp 2.735.693.900,00 dengan pelunasan utang belanja pegawai tahun 2019 sebesar Rp2.917.065.937,00.

	Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas- Belanja Barang dan Jasa	LO	LRA	Selisih
2. Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas- Belanja Barang dan Jasa		266.076.058.286,75	256.393.965.953,54	9.682.092.333,21

Terdapat perbedaan nilai beban barang dan jasa pada LO dengan nilai belanja barang dan jasa pada LRA sebesar Rp9.682.092.333,21 dengan rincian sebagai berikut:

7.5.181 Perbedaan Beban Barang dan Jasa LO dan LRA

(dalam rupiah)

No	Nama Beban/Belanja	LO	LRA	Selisih
1	Beban/Belanja Persediaan	64.621.976.224,15	56.955.293.440,00	7.666.682.784,15
2	Beban/Belanja Jasa	109.317.719.851,00	105.321.752.983,94	3.995.966.867,06
3	Beban/Belanja Pemeliharaan	12.849.791.623,10	16.920.640.381,10	(4.070.848.758,00)
4	Beban/Belanja Perjalanan Dinas	79.286.570.588,50	77.196.279.148,50	2.090.291.440,00
	Jumlah	266.076.058.286,75	256.393.965.953,54	9.682.092.333,21

- a. Selisih antara beban persediaan dengan belanja persediaan senilai Rp7.666.682.784,15 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.182 Perbedaan Beban Persediaan LO dan Belanja yang menjadi Persediaan LRA

(dalam rupiah)

No	Penambahan	Jumlah
1	Penambahan	
2	Reklas dari Beban Luar Biasa	3.303.134.424,20
3	Reklas dari Beban Jasa	129.355.239,88
4	Penambahan Persediaan dari Timbulnya Utang	6.945.016.293,00
5	Pendapatan Hibah atas Persediaan	1.063.122.780,00
6	Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.000.000,00
7	Jumlah Penambahan	11.443.628.737,08
8	Pengurangan	
9	Reklas ke Peralatan dan Mesin	343.064.000,00
10	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	9.000.000,00
11	Reklas ke Aset Tidak Berwujud	199.380.000,00
12	Barang <i>Expired</i> yang Dicatat sebagai Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2.442.000,00
13	Selisih antara Persediaan Awal tahun yang Menjadi Beban dengan Penambahan Persediaan tahun 2019 yang Masuk Menjadi Persediaan Beban Persediaan	3.223.059.952,93
14	Jumlah Pengurangan	3.776.945.952,93
15	Jumlah Perbedaan (7-14)	7.666.682.784,15

- b. Selisih antara beban jasa dengan belanja jasa senilai Rp3.995.966.867,06 dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 7.5.183 Perbedaan Beban Jasa LO dan Belanja yang menjadi Jasa LRA

(dalam rupiah)

No	Penambahan	Jumlah
1	Penambahan	
2	Selisih antara Penambahan Beban Dibayar Dimuka dan Saldo Akhir	37.650.000,00
3	Penambahan Beban dari Timbulnya Utang	4.934.289.387,00
4	Koreksi Belanja Barang dan Jasa BOS yang Tidak Mempengaruhi Beban Jasa	109.356,94
5	Jumlah Penambahan	4.972.048.743,94
6	Pengurangan	
7	Reklasifikasi ke Beban Persediaan	129.355.239,88
8	Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	8.150.000,00
9	Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	837.207.965,00
10	Pelunasan Utang	1.368.672,00
11	Jumlah Pengurangan	976.081.876,88
12	Jumlah Perbedaan (5-11)	3.995.966.867,06

- c. Selisih antara beban pemeliharaan dengan belanja pemeliharaan tahun 2020 adalah senilai Rp(4.070.848.758,00) dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 7.5.184 Perbedaan Beban Pemeliharaan LO dan Belanja yang menjadi Pemeliharaan LRA

(dalam rupiah)

No	SKPD	Jumlah
1	Penambahan	
2	Penambahan Beban Jasa dari Utang	1.974.307.972,00
3	Pengurangan	
4	Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	315.810.000,00
5	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	5.729.346.730,00
6	Jumlah Pengurangan	6.045.156.730,00
7	Jumlah Perbedaan (2-6)	(4.070.848.758,00)

- d. Selisih antara beban perjalanan dinas dengan belanja perjalanan dinas tahun 2020 adalah senilai Rp2.090.291.440,00. Penambahan beban karena timbulnya utang Pemerintah Daerah.

	LO	LRA	Selisih
3. Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00

Selisih antara beban subsidi LO dengan belanja subsidi LRA dengan belanja bantuan sosial senilai Rp0,00.

	LO	LRA	Selisih
4. Beban Hibah	35.219.806.760,00	35.219.806.760,00	0,00

Selisih antara beban hibah LO dengan belanja hibah LRA dengan belanja bantuan sosial senilai Rp0,00.

	LO	LRA	Selisih
5. Beban Bantuan Sosial	2.745.675.000,00	2.745.675.000,00	0,00

Selisih antara beban bantuan sosial dengan belanja bantuan sosial senilai Rp0,00.

	LO	LRA	Selisih
6. Beban Penyusutan	158.552.508.700,63	0,00	158.552.508.700,63

Selisih antara beban penyusutan LO dengan LRA adalah sebesar Rp158.552.508.700,63. Ini disebabkan beban penyusutan adalah akun LO yang merupakan belanja operasional dan bukan merupakan akun LRA.

Beban Transfer	LO	LRA	Selisih
7. dan Belanja Tranfer	60.091.637.400,00	115.149.587.550,00	(55.057.950.150,00)

Selisih antara Beban Transfer LO dan Belanja Transfer LRA sebesar Rp(55.057.950.150,00) merupakan selisih pengurangan penambahan beban transfer yang berasal dari utang alokasi dana desa sebesar Rp9.875.003.850,00 dan pengurangan beban transfer yang berasal dari dana desa sebesar Rp(64.932.954.000,00).

	LO	LRA	Selisih
8. Belanja Modal	0,00	171.347.334.782,25	(171.347.334.782,25)

Selisih antara belanja modal adalah sebesar Rp(171.347.334.782,25). Ini disebabkan belanja modal bukanlah akun LO karena bukan merupakan belanja operasional.

	LO	LRA	Selisih
9. Beban Penyisihan Piutang	2.038.000.310,55	0,00	2.038.000.310,55

Selisih antara beban penyisihan piutangan adalah sebesar Rp2.038.000.310,55. Ini disebabkan beban penyisihan piutang adalah akun LO yang merupakan akun dari Laporan Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

	LO	LRA	Selisih
10. Beban Lain-lain	14.645.856.538,98	0,00	14.645.856.538,98

Selisih antara Beban Lain-lain adalah sebesar Rp14.645.856.538,98 merupakan penghapusan atas aset tetap dan reklas aset tetap ke aset *ekstramkomptable*. Selisih ini disebabkan beban Lain-lain adalah akun LO yang merupakan akun dari Laporan Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

	LO	LRA	Selisih
11. Beban penyisihan dana bergulir	448.917.181,95	0,00	448.917.181,95

Selisih antara Beban penyisihan dana bergulir adalah sebesar Rp448.917.181,95 merupakan Beban penyisihan dana bergulir. Selisih ini disebabkan Beban penyisihan dana bergulir adalah akun LO yang merupakan akun dari Laporan Operasional 1 dan bukan merupakan akun LRA.

	LO	LRA	Selisih
12. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	294.871.913,00	0,00	294.871.913,00

Selisih antara Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO sebesar Rp294.871.913,00 merupakan keuntungan atas investasi jangka panjang permanen pemerintah daerah yang dicatat dengan metode ekuitas. Selisih ini disebabkan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO yang merupakan akun dari Laporan Operasional dan bukan merupakan akun LRA.

	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	LO	LRA	Selisih
13. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(943.346.900,00)	0,00	(943.346.900,00)	

Selisih Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO dengan LRA sebesar Rp(943.346.900,00). Selisih Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO tidak disajikan pada LRA dikarenakan bukan akun LRA. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO merupakan kerugian dari penghapusan aset tetap.

Tabel 7.5.185 Rincian Kegiatan Non Operasional Lainnya

(dalam rupiah)

No	SKPD/Lembaga	Jumlah	Keterangan
1	Perusahaan Daerah	(940.904.900,00)	Kerugian Perusahaan Daerah
2.	Dinas Kesehatan	(2.442.000,00)	Persediaan Obat Ekspired
	Jumlah	(943.346.900,00)	

	LO	LRA	Selisih
14. Beban Luar Biasa	5.603.827.767,80	13.707.639.116,00	(8.103.811.348,20)

Selisih antara beban Beban Luar Biasa dengan belanja tidak terduga LRA senilai Rp(8.103.811.348,20) merupakan reklasifikasi ke Persediaan Rp3.303.134.424,20 dan reklasifikasi ke gedung bangunan Rp4.800.676.924,00.

7.6 Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

7.6.1 Domisili dan Operasional Entitas

Natuna disamping sebagai nama pulau juga sebagai nama salah satu kabupaten yang tergabung dalam Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Natuna. Pulau yang tergabung dalam gugusan Pulau Tujuh ini berada di lintasan jalur pelayaran internasional dari dan atau ke Hongkong, Taiwan dan Jepang. Kabupaten yang langsung berbatasan dengan negara tetangga ini, berada pada posisi 1016' - 7019' Lintang Utara dan 1050 00' - 110000' Bujur Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja
- Sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Bintan
- Sebelah timur : berbatasan dengan Malaysia Timur dan Kalimantan Barat
- Sebelah barat : berbatasan dengan Semenanjung Malaysia dan Pulau Bintan (Kabupaten Bintan)

Luasnya mencapai 141.901,20 Km² dengan rincian 138.666,0 Km² perairan (lautan) dan 3.235,20 Km² daratan. Ini berarti bahwa wilayah Kabupaten Natuna sebagian besar berupa lautan. Daratannya pun bukan hanya satu pulau, tetapi berpulau-pulau yang struktur tanahnya berupa padsolik merah kuning, alluvial, organosol, dangley humus.

Kabupaten yang berada di ketinggian 3 - 959 meter dari permukaan air laut ini beribukota di Ranai. Jarak kota ini dengan kota-kota lainnya yang berada di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut: Tanjungpinang (562 Km), Tanjung Balai Karimun (642 Km), Batam (589 Km), Sedanau (58 Km), Midai (139 Km), Serasan (177 Km), Tarempa (258 Km), Letung (322 Km), Tambelan (344 Km), Kijang (545 Km), Tanjung Uban (561 Km), Moro (618 Km), Tanjung Batu (654 Km), Senayang (593 Km), Dabo (954 Km), dan Daik (626 Km).

Pemerintah Kabupaten Natuna menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Daftar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Natuna mencakup urusan:

1. Kesehatan
2. Pekerjaan umum dan penataan ruang
3. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
4. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
5. Tenaga kerja
6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
7. Pangan
8. Lingkungan hidup
9. Administrasi kependudukan dan catatan sipil
10. Pemberdayaan masyarakat dan desa
11. Perhubungan

12. Komunikasi dan informasi
13. Penanaman modal
14. Perpustakaan.

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kabupaten Natuna juga melaksanakan urusan pilihan dan urusan lainnya yang mencakup:

- a. Urusan Pilihan
 1. Perikanan
 2. Pariwisata
 3. Pertanian
 4. Perdagangan
- b. Urusan Lainnya
 1. Perencanaan
 2. Keuangan
 3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
 4. Fungsi lain

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap SKPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Natuna yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Natuna sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna.

7.6.2 Penerapan IPSAP Nomor 02

Dalam upaya penerapan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah terdapat tambahan pengakuan realisasi pada penyajian beberapa pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna tahun 2020 yaitu:

- a. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana Jaminan Kesehatan Nasional
- b. Pengakuan penerimaan dan pengeluaran Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)

Dalam pengelolaan keuangan tidak semua pendapatan dalam bentuk kas diterima oleh RKUD. Pada tahun 2020 terdapat beberapa pendapatan yang diterima langsung oleh entitas selain Bendahara Umum Daerah, bahkan ada yang langsung digunakan oleh SKPD. Pendapatan tersebut terjadi pada:

a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jumlah Pendapatan/Dana Kapitasi JKN Tahun 2020 dari 13 Pusat Kesahatan Masyarakat (Puskesmas) se Kabupaten Natuna sebesar Rp6.777.215.870,00 dan sudah dikeluarkan/digunakan sebesar Rp6.113.217.538,00 sehingga sisa dana JKN sebesar Rp2.466.442.619,00 dicatat kas di kasda dan diungkapkan secara memadai pada penjelasan akun kas di kasda pada catatan atas laporan keuangan ini.

Tabel 7.6.1 Daftar Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi JKN

(dalam rupiah)					
NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO AKHIR
1	PUSKESMAS RANAI	501.109.099,00	1.581.067.105,00	1.317.138.568,00	765.037.636,00
2	PUSKESMAS TANJUNG	31.750.093,00	325.530.835,00	291.083.509,00	66.197.419,00
3	PUSKESMAS BUNG. SELATAN	27.532.877,00	244.490.998,00	234.886.797,00	37.137.078,00
4	PUSKESMAS BUNG. TENGAH	109.630.942,00	310.243.158,00	236.561.352,00	183.312.748,00
5	PUSKESMAS SERASAN	94.921.438,00	609.814.237,00	607.049.062,00	97.686.613,00
6	PUSKESMAS BATUBI JAYA	47.001.887,00	221.009.516,00	188.312.178,00	79.699.225,00
7	PUSKESMAS SERASAN TIMUR	51.741.073,00	369.959.077,00	365.386.103,00	56.314.047,00
8	PUSKESMAS PULAU TIGA	327.355.520,00	655.515.696,00	608.680.702,00	374.190.514,00
9	PUSKESMAS KELARIK	150.701.186,00	482.334.826,00	495.231.086,00	137.804.926,00
10	PUSKESMAS SEDANAU	190.571.199,00	767.137.598,00	657.154.760,00	300.554.037,00
11	PUSKESMAS MIDAI	141.904.505,00	595.720.861,00	541.283.548,00	196.341.818,00
12	PUSKESMAS SUBI	51.112.966,00	336.457.333,00	327.415.763,00	60.154.536,00
13	PUSKESMAS PULAU LAUT	77.111.502,00	277.934.630,00	243.034.110,00	112.012.022,00
TOTAL		1.802.444.287,00	6.777.215.870,00	6.113.217.538,00	2.466.442.619,00

b. Bantuan Operasional Sekolah

Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, dimana Urusan Pendidikan menengah beralih dari Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi urusan Provinsi, maka untuk Pendapatan dan Belanja BOS Tingkat SLTA sederajat tidak disajikan dan diungkapkan. Yang disajikan dan diungkapkan hanya untuk urusan pendidikan Dasar. Untuk Dana BOS mengikuti Pendapatan dan Belanja yang telah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2020. Untuk pendapatan dicatat pada kode rekening Pendapatan Dana BOS, sedangkan untuk belanja dicatat pada belanja pegawai BOS, belanja barang dan jasa BOS dan belanja modal BOS.

Total Dana BOS yang diterima oleh sekolah SD dan SMP Negeri se-Kabupaten Natuna sebesar Rp13.476.773.093,91 dan sudah digunakan sebagai realisasi belanja sebesar Rp13.423.212.737,94. Realisasi terhadap penerimaan dan pengeluaran BOS Terinci sebagai berikut:

Saldo Awal BOS TA 2020	794.054.300,42
Penerimaan Dana BOS Tahun 2020	13.476.773.093,91
Belanja Dana BOS TA 2020	<u>13.423.212.737,94</u>
Saldo Akhir Dana BOS Tahun 2020	847.614.656,39

7.7 Penutup

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2020 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), laporan keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini atau pun nanti.

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2020 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Natuna dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian dengan hasil penyusunan Laporan Keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan Laporan Keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangan, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2020 secara umum telah memenuhi target dan sasaran.

Kami berharap dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2020, pengungkapan yang kami sajikan dalam laporan keuangan ini, dapat lebih berguna bagi *stakeholder* dan seluruh pihak yang berkepentingan. Masukan dan saran selalu kami harapkan untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Natuna di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, dan mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Natuna yang lebih baik.

